MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

Tegalboto

Menuju Pencerahan Masyarakat

PUBLICA SPHAERA

EDISI XVI MEI 2012

ISSN 1411 - 9048

Berbicara Tentang Kesetaraan

DARI RUANG REDAKSI

Obrolan dalam Ruang

TERUCAP satu kata yang menandai kelegaan. “Akhirnya”. Ya, akhirnya momen itu terlewati. Momen dimana mata diharuskan menahan kantuk di tengah ketidakkuasaannya. Otak dipaksa berputar keras di tengah kelelahannya. Emosi dituntun untuk terus berkobar dan berkoar. Dan hatipun hanya menjadi sosok yang sendu dan sepi.

Akhirnya, pergulatan dalam tiga sasi yang tak terelakkan itu, sampai pula pada ujungnya. Dimana kini hanya hati yang masih terus berharap cemas akan akhir dari proses (yang lumayan) panjang ini. Sebelumnya, dalam bayangan yang mengawang-ngawang, dan dalam puluhan peluh keringat intelektualitas, kami mencoba mencari definisi. Definisi atas segala sesuatu yang mungkin dapat atau tidak dapat kami definisikan. Berdebat dalam ucap-ucap antusiasme, juga bersenggama dengan berbagai macam literasi, *toh* kami memutuskan 'tuk mendalami Habermas.

Habermas yang kaya akan dialektika dalam ruang-ruangnya itu menempatkan kami pada posisi sekumpulan manusia yang hendak mengikuti, juga mempertanyakan gagasannya. Tanpa bermaksud mengekor, kami berusaha mencari apa yang kiranya luput dari Habermas dan zamannya. Dengan membentuk ruang kami sendiri, yang tak jauh dari Karpet Merah, kami menggagas rasionalitas dalam dialektika. Sedikit mencicipi dan mempraktikkan apa yang juga diajarkan oleh Kritik Ideologi.

Namun, tetap saja, ruang-ruang yang kami buat ini hanyalah kecil dan masih berupa eksperimen. Hingga kalau boleh berapologi, kami hanyalah anak manusia. Yang berusaha mengimplementasikan apa yang sudah (atau mungkin sama sekali belum) dibaca. Tumpukkan kalimat demi kalimat dengan disain (yang diusahakan *catchy*) ini adalah bentuk muntahan kami atas jejalan literasi selama satu kepengurusan. Ya, meskipun jauh dari kata sempurna, tetapi bolehkan kami sedikit berlega hati? Karena setidaknya, di balik sajian karya tak sempurna ini, ada rasa tulus serta harapan Menuju Pencerahan Masyarakat yang kami ingin agar Anda mengerti.

Untuk isi, turunkan sedikit harapan Anda. Kami hanyalah generasi kacangan yang mencoba bertahan terhadap gempuran generasi kekinian yang apatis dan pragmatis. Hingga penurunan kualitas SDM yang tak dapat dihindari pun tetap kami paksa untuk berpikir. Karena alasan yang sama pula, di edisi ini kami menghilangkan satu rubrik asyik. Yaitu Cangkruk. Sedangkan untuk rubrik-rubrik lainnya, rasanya tak ada yang berubah. Tetap kami pertahankan, meskipun dengan cacat di sana-sini.

Publica Sphaera, yang menjadi Edisi XVI ini, memanglah Majalah Tegalboto. Namun, lagi-lagi ternyata kami sadar bahwa majalah ini tak akan terbit tanpa adanya bantuan yang luar biasa meringankan dari orang lain. Dari jajaran disain, Terima kasih untuk Fuk Dedi yang tak lelah menyumbangkan ilustrasi kreatifnya pada kami. “*Tu kanfuk*, namamu disebut pertama!” Bapak Romdhi, dosen muda yang selalu tampak muda, atas foto *cover*nya. Mas Widi Widahyono yang nun jauh disana, terima kasih ILM-nya. Momo Agung, si bebal yang jago menggambar. Juga kawan-kawan magang lainnya yang rela kami perbudak.

Dari lini tulis-menulis, terima kasih kami haturkan pada Mas Hery Prasetyo yang tak bosan-bosan menelurkan karyanya di majalah-majalah kami. “Sampaikan pada Mas Lukman kalau kami berterima kasih atas diskusinya sore itu ya, Mas”. Kepala menunduk, berucap *maturnuwun* pada Mas Petrik Matanasi dan para serdadunya. Serta pada alumni Tegalboto yang tak pernah melupakan adik-adiknya, Mas Oryza, “Tulisanmu mantap, Mas. Salam ya buat kawanmu Si Anggota Dewan yang terhormat itu”. Dan *last but not least*, narasumber kami yang budiman, yang tanpa kalian kami tak tahu mau dibawa kemana majalah ini. LSDP SD Impres dan Pak Warok atas waktu, kopi, juga kreteknya. Pak Sunarlan dan M. Musthafa atas kesabarannya. Para pejuang Pasar Turi, “Teruslah berjuang!”Berbeda dan Merdeka 100% atas inspirasinya. Serta para *supporter* kami yang lain, yang luput kami sebutkan disini. Kepada kalian, Tegalboto mengangkat topi.

Akhir kata (semoga tak berarti yang terakhir), kami persembahkan Publica Sphaera ke ruang baca Anda. Dengan kebanggaan yang tidak seharusnya, kami sarankan Anda membaca majalah ini dengan ditemani kopi dan kretek. Usirlah kantuk Anda. Karena kami akan senantiasa menemani Anda untuk terus berdialektika, dalam ruang-ruang tak nyata sekalipun. Tabik![]

UNIT KEGIATAN PERS KAMPUS MAHASISWA (UKPKM) TEGALBOTO UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan 35 Kavling Selatan Kompleks Gedung PKM Universitas Jember 68121
Jember - Jawa Timur - Indonesia
0331-7186391
tegalboto@gmail.com
www.tegalboto.org

Pelindung Drs. Moh. Hasan, M. Sc. Ph. D (REKTOR UNIVERSITAS JEMBER) Pembina Drs. MOCH. ILHAM ZOEBAZARI, M.Si Pemimpin Umum DIDIK SAPUTRA Pemimpin Redaksi DEVI DWIKI WULANDARI Redaktur Pelaksana SEPTIANA CAHYA UTAMI*, GULFINO GUEVARRATO* Redaktur Artistik, Foto, dan Multimedia IZZATUL KAMILIA Koordinator Litbang ARYS ADITYA Litbang Keredaksionalan MAHFUD HASAN Litbang Keorganisasian DARA SUMARENI Litbang Kepustakaan GALUH YUNI KHAIRUN NISA Sekretaris dan Bendahara UMI AGUSTIN

*semi atau non aktif jabatan

TENGOK HALAMAN

DARI REDAKSI..... 1
TENGOK HALAMAN..... 2
COVER STORY..... 3
SURAT PEMBACA.....4
TEROPONG.....6
RISALAH..... 10
VIS VIVA..... 15
ARTIKEL TEMA..... 38
SHUTTER..... 47
BUDAYA..... 62
JEJAK..... 68
ENSIKLOPEDIA..... 73
QUOTATIONS..... 78
PUSTAKA WACANA..... 81
GLOSARIUM..... 87
SOLILUQUAY..... 89

TENGOK

RISALAH

"Demokrasi Deliberatif: Pilihan Pelaksanan Demokrasi"..... 6
Demokrasi itu pemilu. Demokrasi itu bebas mengkritik. Demokrasi itu Indonesia. Lalu, sudah tepatkah? Atau sekedar ditepatkan? Tulisan ini adalah sebuah alternatif atas demokrasi di Indonesia yang berlaku hanya secara prosedural. Tidak benar-benar menawarkan alternatif baru memang, tapi tulisan ini mencoba menjunjung dialektika ruang publik untuk menuju demokrasi dalam konsensus rasional.

ARTIKEL TEMA

"Ceracau dalam Jejaring Publik"..... 38
Manusia berusaha menampilkan jati dirinya dalam lekukan hasrat yang dibalut apik oleh pencitraan. Di satu sisi, pencitraan itu semata-mata dimaksudkan untuk eksistensi diri. Dan dalam Facebook, kompleksitas hasrat, manusia, dan eksistensi ini nyatanya dapat diselipi oleh 'obrolan-obrolan' emansipatoris yang tak lepas dari kepentingan. Tujuannya, apalagi kalau bukan konsensus untuk revolusi. Namun, sampai dimanakah Facebook dapat bekerja sebagai ruang untuk mereka yang giat berdialektika?

HALAMAN

VIS VIVA
"Letupan Kecil (Reforma) Agraria"..... 15
Ini bukan tentang letupan jiwa rakyat yang memimpikan kekuasaan. Bukan pula bentuk pembangkangan terhadap para pengambil kebijakan. Ini hanya soal antusiasme rakyat dalam memperjuangkan hak mereka. Melalui kelompok-kelompok kecil mereka bersatu. Memanfaatkan ruang demi ruang mereka mengadu. Ya, ini soal sekumpulan pejuang dari Ketajek!

BUDAYA

"Laporan Singkat Tentang Gerakan Kesenian di Simpang Masyarakat: Berbeda dan Merdeka 100%"..... 62
Mereka berbeda. Mereka bebas. Mereka bersuara. Mereka menamai dirinya Berbeda dan Merdeka 100%. Hampir sama seperti mural, tapi lebih terbuka. Tidak menempatkan diri seperti kreativitas seni lainnya, mereka membongkar konsep seni dalam ruang pameran. Memaksimalkan ruang-ruang publik yang ada dimana, mereka mengukuhkan diri akan ruang kreativitasnya sendiri.

COVER STORY

Di mana ruang publik politis itu? Jika berbagai tempat para masyarakat sipil beraktivitas dapat dimaknai sebagai ruang publik, seharusnya kemunculan ruang itu dapat berada di mana saja. Asalkan ada segelintir masyarakat sipil yang berkumpul, dan mereka mengungkapkan tema-rema rasional secara relevan. Maka niscaya ruang publik akan terbentuk sebagai ruang publik yang 'politis' itu.

Hanya saja Jurgen Habermas, filsuf Jerman dari kumpulannya yang menolak generasi pertama Mazhab Frankfurt itu pernah berujar. Bahwa dengan pemahaman komunikatifnya ia menganggap *Lebenswelt* (dunia kehidupan) sudah seharusnya diisi oleh komunikasi sebagai ciri dasar kehidupan manusia. Ada ruang demokratis yang menjamin para warganegara mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Membangun ruang dialektis dengan gagasan politisnya. Hingga mencapai pemahaman intersubyektif yang berujung pada sebuah kesepakatan bersama. Dan ruang publik adalah sarana terciptanya serangkaian prosesi tersebut.

Hingga tercetuslah sebuah ide dengan memvisualisasikan seorang lelaki dan wanita yang sedang bermain catur untuk menghiasi *Cover* Majalah edisi Tegalboto ke XVI ini. Si lelaki dengan pakaian ekskulif dan si wanita dengan pakaian lusuh yang duduk bersama bermain catur. Sebuah manifestasi tentang sebuah kesetaraan. Karena di dalam ruang publik, semua orang memang harus duduk setara. Identitas kaya dan miskin melebur menjadi satu dan duduk bersama membangun sebuah argumentasi rasional. Keberadaan catur merepresentasikan sebuah simbol (ruang) politis yang mereka emban ke dalam ruang publik tersebut.

Akhirnya, tanpa harus meyakini ataupun sekedar mengamini, setidak-tidaknya kami akui bahwa konsep ruang publik politis masyarakat sipil ini merupakan cita-cita absurd namun optimis. Menjadi absurd ketika ruang publik ini berada di tengah gempuran pasar (kapitalis) yang coba memainkan hasrat dan menumpulkan otak manusia, serta berada di bawah pantauan Negara dengan demokrasi proseduralnya. Namun optimis membawa kemajuan sebuah bangsa ketika masyarakat sadar dan mau mengkritik pemerintah melalui ruang-ruang aspiratif, sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Itu saja.[]

Cover:
Foto dan Desain
Romdhi Fatkhur Rozi
Model:
Intan Puspitasari
Xandra Hardianto
Accesories & Wardrobe
Fatati Nur Diana
Make Up
Fatati Nur Diana
Lokasi
Studio 11

Lay Out
Izzatul Kamilia, Septiana Cahya Utami

Foto dan Gambar
Widi Widahyono, Dedi W. Nugraha,
Dara Sumareni, Agung Wahyu P., Umi Agustin

SURAT PEMBACA

Philipus Parera
Kepala Biro Tempo DIY & Jateng

Saya mengenal majalah ini saat teman-teman Redaksi Tegalboto berkunjung ke Kantor Biro Tempo DIY dan Jateng di Yogyakarta beberapa bulan lalu. Kami diahadiahi dua eksemplar Majalah Tegalboto Edisi XV November 2010 yang sampulnya lumayan sangar. Fatati Nur Diana (si model.red) berdandan ala pasien sakit jiwa sambil menenteng gunting rumput berdarah.

Tegalboto banyak bergulat dengan ide, dan dalam setiap topik seolah hendak menegaskan bahwa bagi mahasiswa jurnalisme itu tidak cukup hanya dengan fakta dan data, tapi juga opini. Malah, barangkali, opini justru dianggap yang utama. Maka masuk akal manakala pada halaman 32 (di edisi Abnormalitas.red), misalnya, ada tulisan berjudul "Mall dan Transparansi Objektivitas", lalu "Cinta dan Kegilaan" dengan penjelasan dalam kurung "(Sebuah Pengakuan seorang Freudian)". Dan masih banyak lagi.

Menurut peneliti asal Kanada Marshall McLuhan, tanpa perlu melihat konten, media pada dirinya adalah sebuah pesan. Dan Tegalboto, menurut saya, merupakan ekstensi dari kegelisahan intelektual untuk mempertemukan realitas, ide, gagasan kritis, teori. Lepas dari kenyataan bahwa hampir semua majalah mahasiswa membawa pesan yang sama, saya memuji keberanian teman-teman di Tegalboto untuk bereksperimen dengan simbol-simbol visual pada *design,* hal yang juga sangat penting dalam komunikasi.
Salam,

Saya pernah menulis di majalah ini pada November 2003. Sebuah esei yang serius dari permintaan yang serius di majalah yang diniatkan sebagai majalah yang sangat serius; baik isi maupun format tata letak. Ia tampaknya berhasrat meniru masjalah "Prisma" yang kehilangan pamor sejak Orde Baru tumbang. Sejak saat itu saya mengenal bahwa di ujung timur Jawa ada sebuah majalah kampus yang mengeksplorasi habis-habisan bacaan-bacaan yang pernah dibaca pengurusnya.

Tapi bukan soal itu yang mengukuhkan hubungan personal saya dengan majalah serius di kampus yang tampaknya tak serius amat. Terutama Indonesia Buku dimana saya bersenang-senang sejak awal mula ada.

Yang mengikat Indonesia Buku dan Majalah Mahasiswa Universitas jember "Tegalboto" ini adalah Jember. Di kota Jember inilah salah satu pendiri utama Indonesia Buku, Taufik Rahzen, mengukuhkan basis intelektualitasnya. Kota ini unik. Punya lahan perkebunan maha luas. Juga segelintir intelektual muda yang naik ke podium nasional. Selain Taufik Rahzen, ada Andreas Harsono dan Nirwan Dewanto; tiga nama untuk menyebut sepintas.

Lebih aneh lagi, kota ini menjadi kiblat *fashion* dunia lewat karnavalnya yang kini menjadi mondial. Sungguh tradisi metropolitan yang aneh dari sebuah kota kecil macam Jember.

Segelintir "keanehan-keanehan" itulah jurnalis *cum* filosofis Tegalboto memaksa diri habis-habisan untuk menjadi pemamah wacana kelas berat dalam setiap edisi majalah yang mereka terbitkan. Semoga itu bukan kutukan, melainkan sebuah niat baik agar generasinya yang tiap warsa berganti selalu membaca buku yang bukan kacangan dengan harga-harga sepicis.

Muhidin M. Dahlan,
Kerani Indonesia Buku, Yogyakarta.

Saya suka dengan pilihan-pilihan tema majalah Tegalboto, kemudian cara menggarap rubrikasi dan layoutnya. Tema-tema majalahnya juga menarik karena anda coba memasuki satu wilayah yang mencakup kajian-kajian budaya, *cultural studies*. Yang memang untuk kalangan mahasiswa biasanya bahasan tersebut kurang diperhatikan. Pada umumnya, majalah mahasiswa atau pembicaraan mahasiswa secara umum itu meliputi hal-hal politik nasional. Tapi di sini Tegalboto mencoba membuat identifikasi ke-khasan tegalboto.
Jadi ketika majalah mahasiswa lainnya "kehilangan sesuatu": kehilangan karakter, kehilangan tema-tema *discourse* dalam laporan-laporan jurnalistiknya. Tegalboto menemukan bentuknya di wilayah ini. Tegalboto bicara soal makanan, bicara soal gaya hidup anak-anak jaman sekarang yang tidak banyak diperhatikan oleh majalah-majalah mahasiswa lain. Saya kira ini satu keberanian karena mau tidak mau anda memasuki wilayah harus "banyak membaca".
Di sini anda harus belajar! Ini tentang memahami gaya hidup, memahami selera, memahami gejala kebudayaan, dan anda pada umumnya jarang ada yang memiliki latar belakang akademik seperti itu. Anda harus belajar membaca literatur yang terkait dengan kajian-kajian seperti itu, dan saya kira ini suatu hal yang baik. Kemudian anda bisa sampaikan kepada publik, terutama mahasiswa, bahwa ada sisi-sisi lain yang berada disekita lingkungan kita. Misalnya pilihan orang-orang mengkonsumsi gaya hidup, ini sesuatu yang dekat dengan diri kita tapi selama ini mungkin tidak pernah diperhatikan.
Tegalboto mengemas realitas tersebut dengan menjelaskan bahwa sesungguhnya di situ ada relasi-relasi ideologis. Ini yang tidak pernah disadari oleh publik dan masyarakat pada umumnya. Jadi pilihan atau selera ini bukan suatu pilihan yang netral, tapi merupakan hasil kontruksi-kontruksi. Proses kontruksi tadi itu yang coba anda tunjukkan kepada pembaca bahwa ada relasi-relasi kuasa, misalnya di balik kita hanya menyukai donat. Ternyata ada subyek subyek yang bermain di dalam, dan diantaranya adalah kapital-kapital.

Andang Subaharianto, Pembantu Rektor III, Universitas Jember

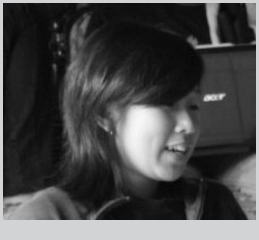

Prima Sulistya W. Pemimpin redaksi LPM Ekspresi tahun 2011, Universitas Negeri

Selalu muncul pertanyaan yang membuat pers mahasiswa rendah diri: siapa yang membaca majalah yang mereka hasilkan? Mungkin karena kerap dianggap tak berkualitas. Untuk menjawabnya, harus diperiksa terlebih dahulu mengapa persma hadir. Jawabnya, pertama, sebagai wadah untuk belajar jurnalistik secara praksis. Ini jelas sudah berjalan ketika produk terus hadir. Kedua, sebagai media alternatif yang membongkar apa-apa yang tak disingkap media arus utama. Untuk kedua hal itu, majalah mahasiswa Tegalboto sudah memenuhinya. Tema terakhir yang diangkat, abnormalitas, misalnya, bukanlah tema yang populer. Jadi jelas sekarang: yang membaca majalah persma adalah hanyalah yang peduli dengan proses belajar (menjadi jurnalis berkualitas) dan yang mau membaca sesuatu di luar arus utama. Maka, kualitas bukan hal yang pantas dipakai untuk mengukur majalah persma, melainkan konsistensi terbit dan semangat tak ikut arus utamanya yang berharga. Dan itu semua ada dalam majalah ini.

TEROPONG

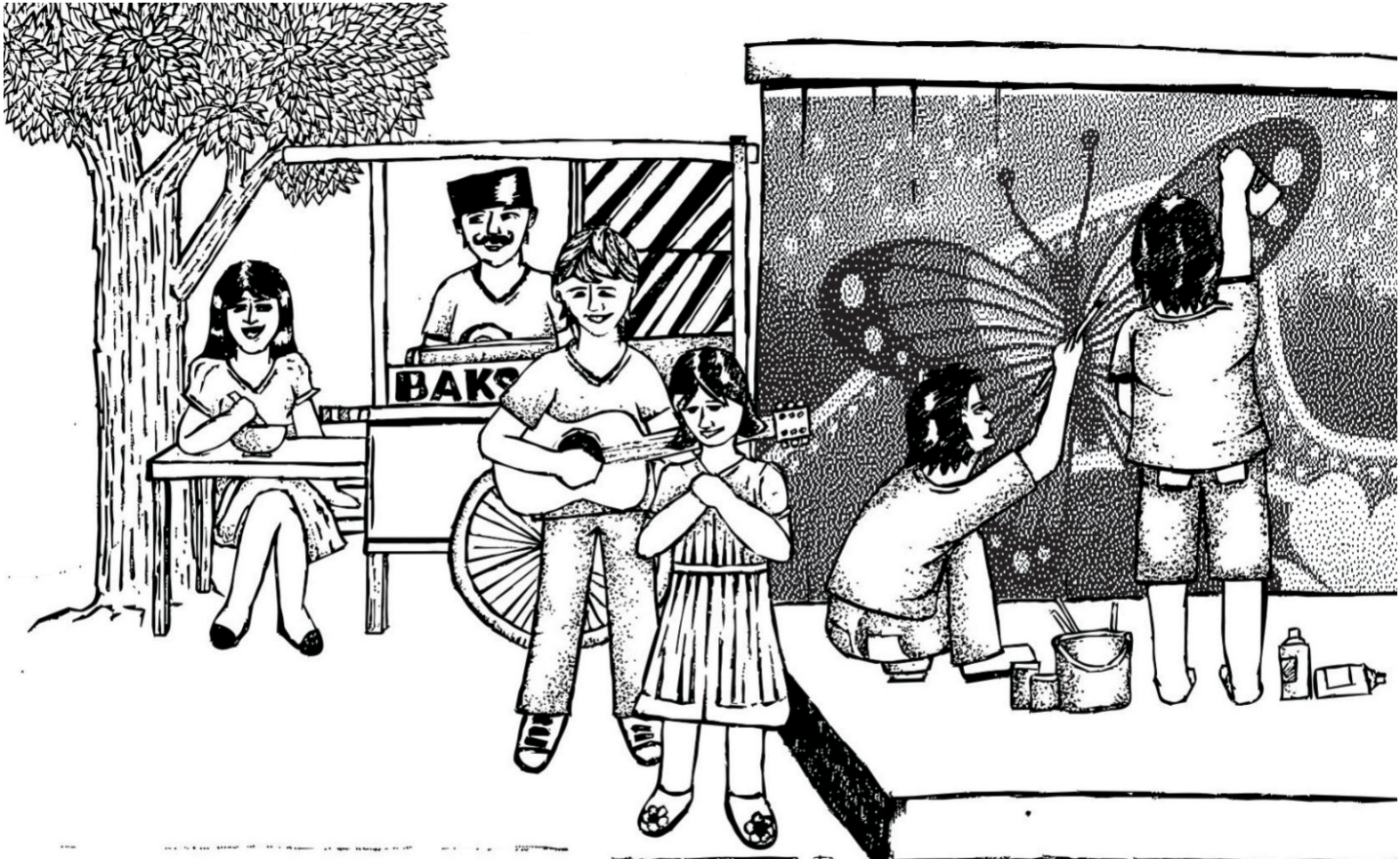

Monolog

-Devi Dwiki Wulandari-

DULU, ketika Eropa masih diselimuti masa kegelapan yang penuh dengan aturan-aturan pemikiran gereja, mungkin masyarakatnya banyak yang mengeluh tentang keberadaan suara mereka. Atau justru banyak juga yang tidak peduli dengan suara mereka sendiri. Dulu, ketika seluruh masyarakat Indonesia hanya memiliki satu Ayah yang seperti Tuhan yaitu Soeharto, tidak ada kebenaran yang lebih sahih selain kebenaran oleh Soeharto. Atau justru sebenarnya banyak yang tidak bisa atau mau menampakkan kebenaran diri mereka. Selama 32 tahun, itulah yang terjadi di negara ini. Dimana dialektika adalah sesuatu yang diharamkan di era pemerintahannya.

###

Semangat pencerahan yang melanda Eropa, yang mengedepankan rasionalitas manusia di atas segalanya dan menganggap bahwa berbagai mitos dan berbagai bentuk penindasan dapat diatasi hanya dengan akal manusia, nyatanya dapat dijadikan celah kritik oleh para punggawa Mahzab Frankfurt. Adorno, Horkheimer, serta Marcuse sepakat bahwa sebenarnya, kemampuan akal manusia ini pada akhirnya akan menghasilkan penindasan dalam bentuk baru. Dan disinilah kebuntuan dialami oleh Teori Kritis. Dimana ketika tiap bentuk antitesis akhirnya melahirkan sintesis kemapanan baru, yang juga berpotensi akan reduksi kepentingan dan penindasan.

Kebuntuan yang dialami Teori kritis inilah yang kemudian menjadi celah kritik pula bagi junior Mahzab Frankfurt, Habermas. Dengan menawarkan ide-ide yang lebih kompleks, Filsuf Jerman yang juga masih dipengaruhi oleh Marx ini bahkan mencoba menggunakan Psikoanalisis Freud untuk memecahkan kebuntuan yang dialami senior-seniornya. Dengan konsep rasio-intersubyektif yang dimilikinya, Habermas mencoba menawarkan suatu bentuk masyarakat ideal melalui beberapa klaim untuk mencapai suatu demokrasi yang penuh dialektika.

Habermas dalam hal ini mencoba menyusupkan kategori hasrat manusia dalam tiap bentuk ide yang ia tawarkan. Dimana dalam hasrat, kepentingan selalu menjadi produk tujuan manusia ketika-melakukan-sesuatu. Kepentingan sendiri telah Habermas golongkan dalam 3 hal, yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris. Kepentingan teknis terkait sumberdaya natural manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, praktis adalah kepentingan jiwa manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya, dan emansipatoris adalah kepentingan yang menempatkan manusia pada liang kekuasaan dalam tatanan sosial. Ketiga kepentingan ini adalah kepentingan-kepentingan yang tidak akan bisa dilepaskan dari manusia. Dan oleh karenanya, berbicara tentang kepentingan tidak mungkin akan mendapatkan suatu kebenaran dan kesepakatan yang hakiki jika hanya didasarkan pada satu konsep rasio subyektif. Disinilah kemudain Habermas mencoba mengenalkan kosep ruang publik.

Konsep ruang publik pada dasarnya memberikan suatu tawaran yang sangat 'damai' bagi manusia. Dalam konsep ini, Habermas berpendapat bahwa kebenaran akan suatu rasionalitas manusia hanya bisa dikoreksi dan hanya bisa mencapai kebenaran yang sesungguhnya jika ia telah dikritik oleh rasio lain yang di dalamnya terjadi proses dialektika yang berbuah suatu konsensus. Dan ruang, secara material maupun ide, bagi kelangsungan proses dialektika itulah yang disebut dengan ruang publik (*public sphere*)

Public sphere adalah media dimana tiap individu bebas menyuarakan aspirasinya. Dimana tiap individu bebas mengutarakan pendapatnya secara gamblang tanpa adanya intervensi. Posisi tiap individu dalam *public sphere* adalah sama. Tidak ada hirarki yang mengikat. Kesepahaman yang

dilakukan di dalam *public sphere* pun melalui bahasa yang sama. Dalam hal ini, bagi Habermas bahasa memang memegang peranan yang sangat penting. Sebab, ketika habermas memposisikan dialektika sebagai kunci terbentuknya ruang publik, itu berarti bahwa dialektika yang terjadi harus dapat dipahami oleh mereka yang berdialog. Dan bahasa yang dapat dimengerti semua orang lah yang menjadi gerbang terbentuknya kesepahaman dalam sebuah dialektika. Ketika bahasa yang memposisikan komunikasi dua arah dapat berjalan dengan mulus dan tiap kepentingan yang dibawa oleh masing-masing individu dapat didiskusikan secara terbuka, disitulahterletak proses-proses dialektika yang digadang-gadang Habermas sebagai kunci utama menuju masyarakat komunikatif *public sphere*.

Tentu saja jika dilihat dari syarat *public sphere* yang dikemukakan oleh Habermas, selain menuntut adanya kesetaraan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi,*public sphere*jugaharus bebas dari pemerintah maupun pasar. Sebab menurut Habermas, kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah maupun pasar bukanlah kepentingan yang bersifat emansipatoris dan dapat mencapai konsesusnya melalui dialektika murni. Melainkan kepentingan yang dibawa hanya sebatas pada nilai kekuasaan yang diinginkan. Sedangkan ketika public sphere dibentuk, ia haruslah berupa tempat individu-individu berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya mereka bebas dari atribut pengusaha maupun aparatur negara. Maka dari itu, nilai politis dan kepentingan yang ada dalam *public sphere* haruslah bersifat emansipatoris dan menghasilkan konsensus bagi kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan-kepentingan politis negara yang sanggup mengintervensi individu-individu di bawahnya sehingga mereka menjadi enggan untuk berbicara serta takut bersuara

Terdengar anti pemerintah memang, namun keberadaan *public sphere* ini sebenarnya bukan sama sekali tidak melibatkan negara. Dalam kaitan ini, otoritas negara merupakan eksekutor terhadap *public sphere*, tetapi bukan berarti bahwa ia merupakan bagian dari *public sphere* tersebut. Namun terkadang juga otoritas negara ini dianggap sebagai otoritas publik tetapi tugasnya adalah untuk memelihara kepentingan umum bagi seluruh warga negara, dimana posisi *public sphere* sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Dan jika syarat-syarat ini dapat dicapai, besar kesempatan yang terbuka bagi masyarakat untuk sampai pada posisi demokrasi deliberatif.

###

Di awal tulisan, telah dijelaskan dengan singkat bagaimana posisi Indonesia pada era Pemerintahan Soeharto. Kala itu, masyarakat memang cenderung sebagai masyarakat pasif dan patuh. Namun seiring berkembangnya dunia teknologi dan informasi, secara perlahan masyarakat pun mulai disadarkan pada posisi atas haknya. Masih lekat dalam ingatan ketika Mei 1998 Soeharto akhirnya dapat digulingkan. Terbukti bahwa penggulingan Soeharto tersebut tidak terjadi secara semerta-merta. Namun melalui proses dialektika yang mungkin cukup panjang. Mahasiswa dari berbagai daerah saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu reformasi.

Jika dikaitkan dengan *public sphere* Habermas, bisa dikatakan, mungkin saat itu di penjuru Indonesia telah “dibangun” ruang publik yang menghasilkan konsensus berupa reformasi. Hingga Soeharto pun jatuh, jajaran kabinet dibongkar pasang, dan demokrasilah Indonesia. Media massa yang tadinya dibungkam pun bebas bersuara dimana-mana. Dan sekarang, di era serba cepat

ini pertautan antara konsep *public sphere* Habermas di satu sisi semakin tertopang, namun di sisi lain semakin layu. Tertopang oleh cepatnya informasi yang dapat memicu reaksi masyarakat dimanapun berada hingga dialektika dapat tercipta dengan mudah. Dan layu diterjang kuatnya arus konsumtivisme generasi instan yang terbiasa dimanjakan oleh kepraktisan serta keapatisan.

Maka, diawali dari Monolog Majalah Tegalboto edisi XVI ini, kami mencoba menyediakan *public sphere* kecil untuk memulai sebuah dialektika. Dialektika yang diharapkan akan memancing reaksi individu lain untuk terlibat di dalamnya. Atau lebih bagus lagi ketika monolog-monolog kami dapat menjadi sebuah tawaran menuju pencerahan. Namun tetap saja, monolog yang dilakukan di ruang kecil ini hanya akan menjadi gumaman jika tidak segera diperbincangkan.Terlebih lagi ketika rasionalitas yang digadang didalamnya hanya didasarkan pada satu rasio subyektif. Karena itu, bagi kami, tidak akan pernah ada penutupan pemikiran terhadap tawaran akan subyektivitas rasio lain. Yang tentunya kami harapkan akan mejadi suatu dialektika murni nantinya. Jadi, sekedar memuaskan dahaga sosial seorang manusia, marilah kita berdialog. Atau paling tidak mari mulai melakukan monolog di dalam pikiran. Karena sejatinya, manusia ada karena ia berpikir. Begitu kira-kira kata Descartes.[]

Demokrasi Deliberatif:
Pilihan Pelaksanan Demokrasi

Gulfino Guevarrato

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan sistem demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959-1966 diterapkan demokrasi terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Sejak tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan demokrasi ala rezim yang berkuasa yang belum bisa dikatakan sebagai demokrasi. Sampai pada masa reformasi yang dianggap sebagai era titik terang dari demokrasi, setelah hampir 32 tahun demokrasi dibungkam oleh kepentingan penguasa Orba. Wujud nyata demokrasi pada era reformasi adalah pemilihan umum secara langsung. Tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga pemilihan presiden dan kepala daerah.

Era refomasi merupakan awal bagi pelaksanaan sistem demokrasi yang baik karena melibatkan rakyat dalam proses pelaksanaannya sebagai Pemilu. Sejak pasca-kemerdekaan, Indonesia masih mencari formula yang tepat untuk menjalankan demokrasi yang efektif, yang pada akhirnya diwujudkan di tahun 2004 dengan pemilihan umum langsung. Proses demokrasi yang semakin baik itu akhirnya dilanjutkan melalui Pemilu langsung di berbagai daerah di Indonesia. Sejak bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 provinsi serta 215 kabupaten dan kota.[1] Pilkada diadadakan untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan pemimpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri.

Dalam perkembangan pemilu sebagai implementasi demokrasi, telah banyak ditemukan pelanggaran di sistem pelaksanaannya. Hampir pada semua praktik pemilu terbiasa mendengar politik uang, pencurian surat suara, mencuri *start* kampanye, bahkan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah sering terjadi konflik-konflik horizontal antar sesama pendukung peserta Pilkada. Semua

permasalahan itu hanya menciderai nilai-nilai demokrasi yang sedang mulai dibangun.

Elit pemerintah atau penguasa terpaku pada persoalan politik dan kekuasaan. Demokrasi dipahami secara prosedural dan dalam implementasi kehidupan politik juga tidak jauh dari kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap rakyat. Masyarakat memaknai demokrasi hanya sebatas partisipasi prosedural. Jelas, pada akhirnya hanya memaknai demokrasi secara semu. Demokrasi semu (*psudeo-democracy*) karena pada hakekatnya yang menentukan kebijakan dalam negeri ini para elite. Sialnya rakyat hanya sebatas dijadikan kedok. Kondisi rakyat tidak terlalu banyak dijadikan pertimbangan.

Diskursus Praktis

Kehidupan bersama secara politis dewasa ini yang ditandai oleh kemajemukan orientasi nilai dan kepentingan tidak lagi dapat diartikulasikan melalui konsep-konsep metafisis tradisional.[2] Sebaliknya apa yang menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat pasca-tradisional, argumentasi tentang aturan-aturan politis bersama yang kontroversial memainkan peran yang semakin penting, dan pendasaran-akhir akal budi dan moral sesungguhnya hanya merupakan sebuah sumbangan yang mungkin bagi proses terbuka untuk mencapai konsensus.

Habermas mengarahkan perhatiannya kepada kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan sebuah praksis pencapaian konsensus dapat dilakukan secara bebas dan *fair,* Ia mengembangkan teori diskursus *(Diskurstheorie)*.[3] Teori diskursus bukanlah tujuan masyarakat, melainkan hanya cara atau *prosedur (Vefahren)* untuk mencapai tujuan itu. Karena itu teori ini sangat menekankan keharusan praksis komunikasi yang sudah terdapat di dalam masyarakat modern sendiri dalam berusaha meradikalkan praksis komunikasi tersebut.

Interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional. Sifat rasional tindakan ini tampak –dan hal ini bagi Habermas mengandung pelajaran- dalam kenyataan bahwa para aktor mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain.[4] Tindakan antarmanusia bersifat rasional, karena tindakan itu berorientasi pada konsensus artinya setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Dengan kata lain, tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus itu adalah tindakan komunikatif. Rasio kornunikatif membimbing tindakan komunikatif untuk mencapai tujuannya, yaitu mengerti atau konsensus. Tetapi interaksi sosial ini tidak hanya sebatas konsensus yang dicapai secara rasional tetapi juga bebas dari paksaan dan kekerasan.

Konsensus semacam itu, bagi Habermas, hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu prosedur (cara) masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif. Dalam tipe diskursus ini anggota masyarakat mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka.[5] Masyarakat komunikatif menyampaikan kritik tidak melalui revolusi dengan kekerasan, namun melalui argumentasi dan tindakan rasional. Singkatnya, masyarakat komunikatif adalah masyarakat yang dewasa, terbuka oleh kritik, mampu berpikir dan bertindak secara rasional, punya referensi, punya kemampuan berargumentasi, dan menyadari dirinya sebagai bagian dari negara yang juga berpengaruh terhadap kemajuan atau kemunduran negaranya (baik secara ekonomi maupun politik).

Demokrasi Deliberatif

Ajaran demokrasi klasik menekankan pada jargon “rakyat harus berdaulat”, tetapi ketika demokrasi teori klasik itu dirumuskan di kondisi masyarakat yang tidak sekompleks sekarang. Kanton Swiss yang menjadi acuan Rousseau dalam ajaran demokrasinya atau Polis Yunani tempat Ariestoteles tinggal bukanlah masyarakat-masyarakat dengan populasi besar seperti sekarang. Untuk mewujudkan teori klasik soal demokrasi itu, Habermas coba menghubungkannya dengan kondisi empiris masyarakat-masyarakat yang kompleks pada hari ini. Habermas menilai bahwa model demokrasi deliberatif mampu menjelaskan dinamika komunikasi politis dalam negara hukum demokrasi yang ada. Model demokrasi deliberatif ini menekankan pada pentingnya prosedur komunikasi untuk

proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dengan ruang publik yang dimobilitasi secara kultural.[6] Demokrasi deliberatif, dengan meminjam istilah Lyotard dalam kondisi postmodern, yang bisa menjadi jalan keluar kejengahan manusia modern dalam kapitalisme-renta adalah komunikasi yang mengemansipasikan manusia.

Komunikasi yang bukan tuan-budak, tapi setara-sejajar; bebas dari dominasi menjadi landasan demokrasi deliberatif. Kemudian ia mengkrongkitkan komunikasi kemanusiaan itu dalam konsep ruang publik *(public sphere*). Demokrasi deliberatif ditandai dengan adanya ruang untuk usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala sisi kemanusiaan dapat diserap sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik. Sehingga apa yang dicita-citakan Habermas, kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil tercipta. Kebijakan publik tidak lagi dimonopoli oleh kaum elitis, baik itu negara atau bahkan pemilik modal tetapi diskursus-diskursus "liar" yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Kata deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* atau deliberasi (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi, *Regierung der Regierten* (pemerintahan oleh yang diperintah).[7] Sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus, istilah 'demokrasi deliberatif' sudah tersirat dalam diskursus praktis. Teori demokrasi deliberatif itu sendiri tidak menekankan pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negaranya melainkan pada prosedur untuk menghasilkan putusan-putusan tersebut. Jadi yang lebih menjadi fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut tercipta melalui proses "mengkonsultasikannya" dengan publik tujuannya jelas agar bagaimana warga negaranya dapat mematuhi aturan-aturan itu tanpa paksaan dan keputusannya bersifat sahih.

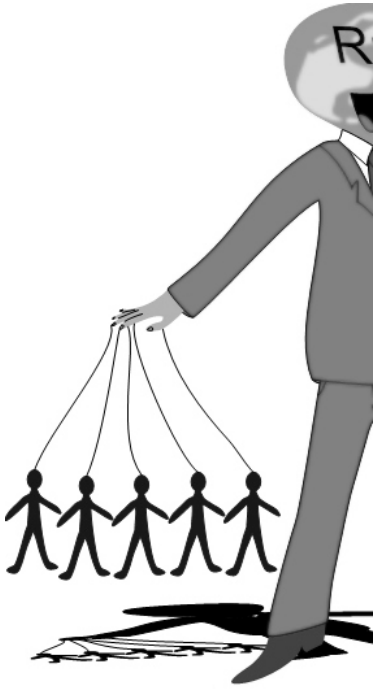

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk patuh terhadap sistem.

Peran Ruang publik

Habermas menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting dalam proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan mereka secara diskursif. Sifat otonom, tanpa intervensi dari pemerintah merupakan syarat dari ruang publik karena sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik, sehingga publik mampu mengorganisir dirinya untuk membentuk sebuah pendapat umum. Ruang publik tidak hanya sebagai

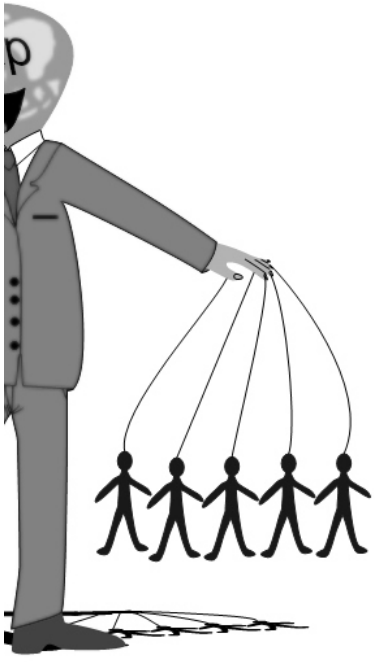

institusi atau organisasi yang legal, melainkan komunikasi antar warga itu sendiri.

Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, sebagai pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst.), publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dst.), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), dan legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Dengan demikian, maka ruang publik begitu banyak terdapat ditengah-tengah masyarakat warga. Ruang publik tidak dapat dibatasi. Dimana ada masyarakat yang berkomunikasi, berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitulah akan hadir ruang publik. Ruang publik berifat bebas dan tidak terbatas. Ia tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar ataupun kepentingan-kepentingan politik.

Konsep ruang publik memainkan peran penting dan khusus yang berfungsi secara politis. Ruang publik merupakan domain kehidupan sosial di mana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara terjamin. Individu-individu pribadi dapat berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku sebagai pengusaha atau professional yang sedang melakukan bisnis pribadinya dan juga tidak berperilaku sebagai pejabat dari birokrasi negara. Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mempublikasikan pandangannya tentang kepentingan umum. Dalam konteks ini dibutuhkan sebuah sarana komunikasi untuk mengirim informasi dan mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, surat kabar dan majalah, serta radio dan televisi, menjadi media yang efektif untuk ruang publik ini.[8]

Dalam kaitan ini otoritas negara merupakan eksekutor terhadap ruang publik politik tetapi bukan merupakan bagian dari ruang publik tersebut. Namun kadang juga otoritas negara ini dianggap sebagai otoritas publik tetapi tugasnya adalah untuk memelihara kepentingan umum bagi seluruh warga Negara. Ruang publik sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Ruang publik menyediakan sebuah arena untuk rekonsiliasi kepentingan privat dan negara dengan bertindak sebagai tempat di mana opini publik dihasilkan dan didistribusikan. Dalam konsep Habermas yang ideal, mandat ruang publik meliputi: wacana kritis-rasional, publik inklusif; pengabaian untuk tingkatan; dan tempat yang dilepaskan dari kontrol negara. Demokrasi deliberatif membutuhkan sejumlah persyaratan seperti penguasaan dan keterampilan menggunakan berbagai teknik partisipasi. Metode yang digunakan harus benar-benar dapat dipahami dan dijangkau oleh *grass-root*, dengan prinsip-prinsip pada kreativitas, produktivitas dan pemberdayaan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang menuju pada arah positif ini tidak lepas dari celah-celah yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapatnya Al Hanief salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, “Indonesia berdemokrasi baru sekitar satu dekade lalu, tapi sebagian besar masyarakat sudah menikmati proses demokrasi itu meskipun di sisi lain juga banyak kelemahan. Jadi memang inilah anomali dalam proses demokrasi ketika banyak celah-celah dalam pelaksanaan demokrasi. Tidak ada dalam sejarah satu negara yang berhasil membangun demokrasi dengan jalan pintas.” Jika merujuk pada demokrasi deliberatif maka demokrasi

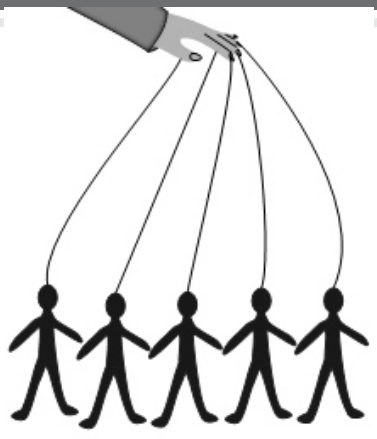

deliberatif dapat menjadi 'penambal' celah-celah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena Indonesia sudah mempunyai pondasi kuat jika berbicara demokrasi yaitu demokrasi pancasila yang berdasarkan kepribadian bangsa ini, tetapi demokrasi Pancasila masih dimaknai sebatas dalam tataran ide bukan bagaimana menjadikannya lebih praksis.

Latar locus pemikiran Habermas ini adalah kapitalisme-renta Eropa Timur atau Amerika. Namun tidak berarti dasar pemikirannya tidak berlaku untuk konteks ke-Indonesia-an. Apalagi (katanya) Indonesia menganut ideologi pancasila sebagai landasan bangsa. Demokrasi pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, dengan demikian memiliki kesamaan dengan demokrasi deliberatifnya Habermas. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan pada keseimbangan konflik dan konsensus sehingga mampu menciptakan identitas bersama sebagai suatu bangsa.

Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara (bukan hegemoni elit). Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang hari ini berlaku di Indonesia yang malah menjadi demokrasi prosedural semata. Sehingga dalam pelaksanaan demokrasi deliberatif ini tidak saja menciptakan demokrasi yang baik, dimana keterlibatan rakyat tidak hanya sekedar prosedural seperti yang dijelaskan diatas tetapi juga bagaimana keterlibatan masyarakat mampu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan bersama yang akan meciptakan kesepehaman bersama.

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan multi-kepentingan yang muncul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan oleh sekelompok elit saja. Sudah saatnya Indonesia harus mampu mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada warga negara untuk beraspirasi melalui organ-organ publik di ruang publik. Ruang publik yang bersifat bebas, terbuka, mudah diakses oleh semua orang, transparan dan otonom. Tak ada pihak lain (negara/pemodal) yang mengintervensi ruang ini. Diskusi-diskusi publik harus segera mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik yang hadir adalah benar-benar hasil demokrasi deliberatif.

Dengan demikian menjadi keharusan untuk melakukan proses demokrasi yang penuh dengan pertimbangan dan konsultasi. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan secara penuh, dan apabila ini ditinggalkan, maka legimitasi tidak akan mendapatkan bentuknya dengan baik, sehingga kemudian lahirlah kebijakan-kebijakan politik yang jauh dari proses kesadaran masyarakat. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, kebijakan yang katanya untuk rakyat, kemudian hanya menjadi sumber kekuatan bagi kelompok politik untuk mempertahankan kekuasaannya saja. Demokrasi Pancasila pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan demokrasi deliberatif.[]

Catatan akhir:

[1]Makalah pendidikan kewarganegaraan permasalahan yang timbul dari pilkada 2005 oleh Lanang Prasaja hal 3
[2]Budi Hardiman, *Teori Diskursus dan Demokrasi*, (makalah), STF Driyarkara: Diskursus.com, 2008, Hlm. 1.
[3]Ibid hal 2
[4]Ibid hal 10
[5]F. Budi Hardiman, *Etika Politik Habermas*, (Makalah), Jakarta: Salihara, 2010, Hlm. 5.
[6]F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal126
[7]F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kansius, 2007, Hlm. 126
[8]Media Dan Ruang Publik Dalam Pandangan Jürgen Habermas Oleh Oleh Nurdin Laugu

KISAH TROTOAR

-Oryza Ardyansyah-

SEBUAH mobil Xenia menyambar orang-orang di atas trotoar di Jakarta. Darah menetes, banyak yang mati. Dan kita semua berteriak, ngeri. Tapi tahukah kita, bahwa trotoar memang tak pernah menjadi tempat yang aman bagi para pejalan kaki. Tidak hari-hari ini. Trotoar dipenuhi ranjau-ranjau: lubang saluran air yang menganga. Bongkahan gragal dari trotoar yang retak. Juga para pedagang khaki lima.

Kamis siang itu, saya berjalan berdampingan dengan seorang anggota DPRD Jember yang terhormat. Ia memilih tak naik mobil, menyusuri Jalan Jawa: sebuah jalan di daerah kampus yang padat. Jalan kaki memang lebih sehat. Apalagi jika tempat tujuan kami tak lebih dari sekian ratus meter dari gedung parlemen.

Namun yang sehat belum tentu bikin selamat. "Memang sulit bagi kita berjalan di trotoar. Bisa-bisa kita kena tabrak mobil," anggota Dewan, teman saya itu, berseloroh.

Ia benar. Kami tak mungkin berjalan di atas trotoar. Seseorang entah sedang memperbaiki apa menutupi jalan kami. Tak jauh dari sana, ada pedagang makanan membuka lapaknya berupa tenda.

Selama bertahun-tahun, terutama selepas tumbangnya Soeharto, trotoar menjadi tempat tumbuhnya apa yang disebut oleh kelompok musik Swami sebagai 'bunga liar'. Para pedagang kecil-kecilan mendirikan lapak di sana, memancang harapan di jalanan. Krisis ekonomi datang, dan pemerintah membiarkan ledakan populasi 'bunga liar' itu di jalanan.

"Mereka adalah sektor ekonomi riil yang tangguh," kata seorang pengamat ekonomi. "Mereka rakyat kecil yang berhak mencari nafkah, di saat banyak pemutusan hubungan kerja," kata politisi yang tengah memikat pemilih.

Dan, PKL pun dibiarkan tumbuh besar tanpa kontrol. Kemudian kita tahu, pedagang kaki lima bukan lagi pedagang dengan lapak yang hanya berukuran lima kaki. Mereka memperbesar lapak, menguasai trotoar, mengecor dan menutup bagian atas saluran air, menempatkan bangku-bangku kayu untuk para pembeli agar bisa makan enak di atasnya.

Dan, entah bagaimana, posisi lapak di atas trotoar ternyata juga dipetakan. Ada ongkos sekian ratus ribu atau bahkan lebih dari sejuta rupiah, jika seorang pedagang hendak menempati lokasi tertentu. Kepada siapa membayar? Saya ragu, uang itu masuk ke kas negara.

PKL adalah raja trotoar, sampai datanglah masa, di mana pemerintah menganggap para PKL sudah tak sedap dipandang mata. Mereka tak sesuai dengan tata tertib kota. Tak indah.

"Pejalan kaki di Jember ini sulit berjalan dengan aman. Trotoar habis. Kami minta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya untuk melakukan penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja," kata Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi, Senin (27/2/2012).

Komisi D DPRD Jember pernah minta agar trotoar di pusat kota Jember, yang biasa disebut segitiga emas, difungsikan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah perlu memperhatikan warga untuk mengakses trotoar, terutama mereka yang cacat. "Mungkin Jember perlu belajar dari Surabaya, soal trotoar ini," kata Ayub.

Namun jangankan menertibkan PKL di pusat kota Jember, menertibkan PKL di kawasan kampus saja

pemerintah daerah kesulitan setengah mati. Satuan Polisi Pamong Praja sempat merazia pedagang kaki lima di kawasan sekitar gedung DPRD Jember, di Jalan Kalimantan 86, Rabu (2/11/2011).

Mereka dianggap mengganggu ruas jalan. Para PKL memang menempati trotoar dan badan jalan. Situasi lalu lintas yang padat ditambah banyaknya PKL ini membuat kawasan itu terlihat semrawut, terutama saat di gedung Dewan ada rapat paripurna yang dihadiri ratusan orang.

Razia ini tak berjalan mulus. Petugas sempat bersitegang dengan para pedagang yang menolak dipindah dari kawasan tersebut. "Saya tidak mau pindah. Kalau pindah-pindah repot," kata Bu Neti, yang sehari-hari menjadi tulang punggung keluarga setelah sang suami tak ada.

Ahmad, PKL yang lain, juga menolak dipindah. "Solusinya bagaimana? Jangan seenaknya digusur," kata pria yang mengaku membiayai kuliah dengan berjualan makanan ini.

Setiap penertiban selalu memunculkan resistensi. Itu yang selama ini terjadi di Jember, dan juga di tempat lain. Para pedagang berteriak. Berunjukrasa. Protes. Sejumlah aktivis mahasiswa, yang sehari-hari menjadi pelanggan warung makan mereka, membawa protes ke gedung parlemen. Wakil rakyat mengangguk-angguk, sepakat. Mereka konstituen yang harus diselamatkan, atau setidaknya, calon pemilih. Maka paguyuban PKL disambangi para politisi partai, dan dibela mati-matian.

Dari kampus Universitas Jember, ada nama M. Fatahillah, seorang pegawai di bidang administrasi, yang melekatkan namanya dengan para PKL. Saat musim kampanye pemilihan kepala daerah lalu, baliho maupun spanduk dengan foto wajahnya bertebaran dengan kalimat yang menyebutkan ikatan batin dirinya dengan para PKL.

"Penataan ini butuh proses tak bisa instan. Kalau instan, kita khawatir omzet teman-teman PKL turun," kata Fatahillah. Ia agar eksekutif, legislatif, ahli hukum, dan PKL duduk bersama. "PKL ini punya naluri, bisa diatur. Saya minta PKL ini didukung, jangan ditakut-takuti," katanya.

Dan, kawan saya, wakil rakyat terhormat itu, pun mengeluh: sulit mengurus para pedagang di atas trotoar. Ditertibkan, mereka protes. Dibiarkan, tak ada tempat bagi para pejalan kaki. Maka, trotoar bukan lagi trotoar, melainkan tempat kita berdebat tentang hak warga dan ekonomi. Juga politik. Tak semua wakil rakyat satu suara soal penertiban PKL.

Pemerintah tak berdaya. Urusan keindahan tak sebanding dengan urusan stabilitas politik di parlemen. Penertiban dikompromikan, dan pada akhirnya, menjadi pembiaran. Bunga-bunga itu tumbuh lagi. Tak bisa dimatikan. "Bungaku, bunga liar," demikian Sawung Jabo, kompatriot Iwan Fals di Swami, bernyanyi.

Pemkab Jember memilih 'bermain' aman, dengan hanya melakukan perbaikan rutin terhadap trotoar, dan bukan mengembalikannya kepada fungsi sebagai tempat pejalan kaki. Kepala Seksi Tata Kota, Pedesaan, dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Rahman Anda, mengatakan, tak ada pembangunan trotoar baru. Namun pihaknya melakukan pemeliharaan rutin, terutama menutup lubang

di trotoar.

Pemerintah Kabupaten Jember lebish suka membenahi sejumlah ruang terbuka hijau (RTH), yang jelas minim dari konflik yang bikin tak populer. Sebut saja, program Pemkab di alun-alun adalah membangun taman bermain anak-anak (playground) dan membangun air mancur di di taman bundaran DPRD Jember, yang merupakan titik persimpangan empat jalan besar di kawasan kampus.

Menurut Rahman Anda, di Jember ada 43 ruang terbuka hijau. Rinciannya: 8 RTH lapangan olahraga, 11 RTH taman kota, 4 RTH jalur hijau, 4 RTH hutan kota, 8 RTH pemakaman umum, dan 8 RTH daerah perkotaan kecamatan. "RTH di Jember mencapai 219.114 hektare atau 30 persen dari luas wilayah," katanya.

Hak ekonomi, menafkahi diri sendiri, akhirnya terselamatkan. Tak ada yang mengutik-utik para PKL itu berdagang dan menguasai trotoar semaunya. Tapi siapa yang akan menyelamatkan hak para pejalan kaki itu? Para pejalan kaki yang kita tak selalu tahu nama mereka, tak ada paguyuban yang menaungi mereka. Mereka yang hanya bisa menggerutu atau menyumpah serapah kesal, karena nyaris tersambar sepeda motor yang ngebut saat kesulitan berjalan di atas trotoar.

Pada akhirnya, kita tahu, siapa yang menjadi korban di jalanan: para pejalan kaki yang hanya bisa diam. Dan saya pun ragu, adakah petuah 'diam itu emas' dinyatakan oleh orang bijak yang rajin berjalan di atas trotoar. []

Demonstrasi Nika di 532 SM. Hari kerusuhan yang dikenal sebagai hari mematikan. Setengah dari kota Nika dibakar menjadi abu dan jumlah korban pada waktu itu sangat mengejutkan. Hal ini diawali timbulnya demonstrasi dari orang-orang yang bekerja dengan Justinianus tidak setuju dengan peraturan pajak baru yang diterapkannya. Dan kerusuhan terus terjadi. Justinianus memiliki dua penjaga yang pergi ke Hippodrome dan mengunci pintu untuk menjaga orang di dalam. Lalu kedua orang itu membunuh semua orang yang di dalam. Pada akhir semua itu, jumlah 30.000 orang tewas dan mayoritas kota itu ditinggalkan dalam keadaan bencana.

Sidebar

Stratifikasi Bahasa dan Komunikasi Ruang Publik

-Izzatul Kamilia-

GORYS Keraf memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebagai alat komunikasi, hadirnya bahasa tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang memakainya. Bahasa muncul atau dihadirkan karena adanya kepentingan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Misalnya bahasa Indonesia dihadirkan dengan maksud sebagai alat komunikasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku yang memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan yang digunakan oleh suku lainnya, atau yang biasa disebut dengan bahasa ibu.

Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa juga merekam sistem budaya yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat pemiliknya. Karena kelahiran bahasa juga tidak bisa lepas dari pengaruh sistem sosial yang ada pada lingkungan tersebut. Yang kemudian bahasa dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana penutur mempersepsikan keberadaan dirinya, baik dalam hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam sekitar, juga hubungannya dengan pencipta.

Pada beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia, terdapat beberapa bahasa yang dalam kosa katanya memiliki stratifikasi atau tingkatan. Hal tersebut karena bahasa merupakan seperangkat pola tingkah laku yang telah ditransmisikan secara kultural dan dipakai oleh sekelompok individu, yakni sebagai bagian dari kebudayaan.[1] Bahasa daerah di Indonesia yang memiliki tingkatan bahasa antara lain adalah bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Tingkatan bahasa yang ada dalam bahasa-bahasa daerah tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial yang juga ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jika sejenak menengok pada sejarahnya, menurut beberapa ahli, Indonesia mendapat pengaruh dari India sejak Abad 1 Masehi. Pengaruh India berarti pula pengaruh agama Hindu yang merupakkan kepercayaan yang dianut oleh orang-orang India pada saat itu. Dalam agama Hindu dikenal sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat menurut kasta. Dan hal itu pulalah yang terjadi di Jawa yang

merupkan daerah yang mendapat pengaruh dari India. Keadaan atau sistem sosial yang demikian membawa pengaruh terhadap lahirnya bahasa di lingkungan tersebut, sehingga kemudian munculah bahasa dengan kosa kata yang memiliki arti sama namun dalam penggunannya berbeda.

Selanjutnya stratifikasi bahasa tidak dapat dilepaskan dari etika atau moral serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Etika dalam hal ini memiliki makna sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.[2] Hal tersebut dapat dilihat dalam bahasa Jawa yang mengatur bahasa menjadi bertingkat-tingkat, dan menyebut tingkatan bahasa tersebut sebagai *unggah-ungguh* yang menunjukkan arti tata sopan santun. Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut maka ia dianggap tidak baik karena tidak mematuhi etika yang ada.

Dalam hal ini berarti selain sebagai alat komunikasi, bahasa yang bertingkat juga memiliki fungsi lain yakni sebagai norma dalam pergaulan masyarakat. Artinya dalam melakukan komunikasi juga ada norma yang mengatur. Bahasa yang bertingkat ini -baik Jawa, Madura, ataupun Sunda- mengharuskan penggunanya untuk menaati norma dan nilai yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat tersebut. Karena bahasa yang bertingkat membentuk makna yang mencerminkan budaya, norma sosial, dan adat istiadat yang mengikat masyarakatnya dalam bertindak, berperilaku, dan bergaul. Misalnya untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi maka harus menggunakan bahasa Jawa *Krama*, atau *Enggi-bunten* dalam bahasa Madura, atau Sunda *Lemes* menurut masyarakat Sunda.

Dalam bahasa-bahasa yang bertingkat pemilihan kata ketika berbicara tergantung kepada siapa lawan bicaranya.Selain ada aturan bahasa yang digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya. Ada pula aturan berbahasa bagaimana memilih kata ketika berbicara dengan yang lebih muda atau yang lebih rendah status sosialnya. Lain lagi aturannya ketika orang dari status sosial yang sama berbicara. Jika sama-sama berasal dari status sosial yang tinggi akan menggunakan bahasa yang sama-sama halus. Namun jika dua orang yang berbicara itu sama-sama dari status sosial yang rendah, maka biasanya menggunakan bahasa yang dianggap kasar. Misalnya dalam pengggunaan kata "kamu" dalam bahasa Madura, jika akan diucapkan pada orang yang lebih dihormati dan lebih tinggi status sosialnya seperti guru misalnya, biasanya menggunakan "*ajunan",* dan untuk orang yang lebih tua menggunakan*"panjenengan".* Sedangkan untuk orang yang lebih rendah status sosialnya atau lebih muda usianya menggunakan kata "*dika".* Dan untuk orang yang sejajar status sosialnya namun masih terkesan sopan biasanya menggunakan kata*"sampeyan",* dan kata "*be'na"* untuk penyebutan kamu yang dianggap kasar.

Bahasa bertingkat yang berkembang di beberapa suku, didalamnya merangkum nilai-nilai kultur masyarakat yang luhur, yang kemudian akan mempengaruhi dan mengakar pada masyarakat yang menggunakannya. K. Bertens berpendapat bahwa nilai memiliki tiga ciri.[3] Pertama, nilai

berkaitan dengan subjek. Jika tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa jika tidak menggunakan bahasa yang sopan atau tidak mengikuti aturan dalam penggunaan bahasa yang bertingkat dianggap tidak sopan.

Kedua, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu. Jika dikaitkan dengan stratifikasi bahasa, selain karena pengaruh India yang juga berarti pengaruh agama Hindu, muncul dan berkembangnya stratifikasi bahasa dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia mungkin karena keinginan orang untuk menunjukkan sikap hormatnya terhadap orang yang menurutnya pantas dihormati. Atau bisa jadi karena keinginan untuk memperoleh penghormatan dari orang lain yang ditunjukkan dengan menggunakan bahasa yang halus. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya.

***

Habermas merumuskan ruang publik sebagai bagian dari kehidupan sosial.Tempat dimana beberapa orang berkumpul untuk menyampaikan opininya dan juga dapat saling berargumentasi mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan publik. Sehingga kemudian diharapkan dapat membentuk opini publik.

Dalam ruang publik, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasannya agar mencapai suatu konsensus serta memperlakukan lawan bicaranya sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak memperlakukan lawan bicara sebagai alat yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan di luar itu semua. Dalam hal ini semua orang memiliki kedudukan yang sama. Semua berhak menggunakan ruang tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep ruang publik itu sendiri yang membuka peluang bagi siapapun untuk berinteraksi.

Intinya ruang publik harus bebas tekanan dan egaliter. Sehingga tercipta komunikasi yang wajar. Dalam demokrasi, ruang publik tidak harus ada dan terjadi di ruang-ruang formal, tapi juga bisa di ruang informal. Bisa di mana saja orang bertemu dan berkumpul mendiskusikan suatu permasalahan mengenai kehidupan publik serta bebas dari intervensi dari pihak-pihak penguasa yakni pemerintah dan juga pasar.

Seperti yang diutarakan Sunarlan, dosen Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, ia mengatakan bahwa, “Posisi negara dengan publik harus *equal*, harus sejajar. Karena jika negara kuat sementara masyarakatnya lemah, maka pemerintahan menjadi otoritarian.”Artinya posisi ruang publik ada di tengah-tengah diantara masyarakat dan pemerintah, yang menjembatani komunikasi antara keduanya.

Komunikasi adalah kunci utama untuk membentuk opini publik, dan bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan opini memiliki peranan penting dalam hal kelancaran komunikasi yang terjadi di dalam ruang publik. Stratifikasi bahasa pada beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia yang didalamnya mengandung nilai dan norma pada masyarakat yang bersangkutan, sedikit banyak akan mempengaruhi komunikasi yang terjadi dalam ruang publik tersebut.

Komunikasi yang menggunakan bahasa bertingkat di era modern ini kedengarannya merupakan hal sepele yang sudah tidak penting lagi, tapi sebenarnya tidak. Dalam kehidupan sosial orang Madura misalnya, kesalahan dalam menerapkan bentuk tingkatan bahasa ketika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak saja merupakan kesalahan linguistik, tetapi juga dianggap sebagai kesalahan sosial. Bahkan, secara kultural kesalahan menerapkan tingkatan berbahasa tersebut, misalnya *mapas*(ngoko dalam istilah bahasa Jawa) terhadap orang yang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya akan dikecam sebagai perilaku *janggal* (tidak sopan). Sebaliknya, *abhasah* (krama dalam istilah bahasa Jawa) merupakan penggambaran dari perilaku seseorang yang mencerminkan etika sopan santun.

Latief Wiyata mengungkapkan bahwa umumnya para pelaku carok berasal dari kalangan masyarakat Madura yang dalam kesehariannya tidak *abhasah*. Hal tersebut berkaitan dengan ketika orang Madura terlibat konflik, dalam penyelesaiannya mereka selalu gagal mencapai rekonsiliasi, karena dalam komunikasi untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak *abhasah* atau tidak menggunakan bahasa halus yang mencerminkan etika kesopanan. Sehingga kemudian *mapas* berpengaruh terhadap hasil akhir dalam penyelesain konflik, karena bahasa yang kasar itu akan berpengaruh terhadap emosi orang yang bersangkutan.[4]

Lalu akankah komunikasi yang menggunakan bahasa yang bertingkat (yang tidak mencermikan egaliter), yang tentunya penuh dengan aturan yang harus diikuti akan berpengaruh terhadap komunikasi dalam ruang publik? Yang notabene nantinya juga akan berpengaruh terhadap konsensus yang dihasilkan. Dalam hal ini secara umum stratifikasi bahasa akan mempengaruhi terhadap komunikasi yang terjadi. Jika orang yang melakukan komunikasi tidak menguasai bahasa daerah yang ada maka gagasan yang dimaksudkan tidak dapat tersampaikan. Apalagi jika dilihat saat ini banyak orang yang sudah mulai tidak acuh pada bahasa daerahnya, sehingga ketika melakukan komunikasi yang mengharuskan ia menggunakan bahasa yang bertingkat dengan benar, ia akan mengalami kesulitan.

Komunikasi yang menggunakan bahasa bertingkat dapat membuat komunikasi menjadi terhambat jika komunikannya tidak menguasai bahasa tersebut secara utuh dan benar. Jika hal itu disebut sebagai suatu kegagalan, berarti gagal dalam menyampaikan gagasannya, tapi berhasil mengikuti norma. Begitu juga sebaliknya jika aturan-aturan dalam stratifikasi bahasa tersebut diabaikan maka berarti berhasil dalam menyampaikan gagasannya, tapi gagal dalam mematuhi norma yang ada.Menurut M. Musthafa, penulis yang juga alumnus *Applied Ethics*, penggunaan bahasa yang bertingkat dengan norma yang tersimpan didalamnya merupakan bagian dari ruang publik. Karakter dari ruang publik. “Jadi kita harus melihat ini sebagai aturan dari ruang publik. Setiap ruang publik punya aturan main sendiri-sendiri kan,” tegasnya. Hal tersebut kurang lebih senada dengan yang diucapkan oleh Sunarlan,“Ruang publik itu tidak bebas, melainkan ada aturan-aturan didalamnya yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat didalamnya,” tukasnya.

Walaupun tidak menyatakan secara langsung tentang aturan komunikasi dalam penggunaan bahasa yang bertingkat, namun Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* merumuskan beberapa faktor menyangkut tindakan berbahasa. Salah satunya adalah tindakan normatif. Tindakan normatif adalah tindakan yang diarahkan pada tingkah laku kelompok-kelompok sosial, bukan pada tingkah laku perseorangan. Konsep pokok dari tindakan normatif ini adalah pemenuhan terhadap norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Karena menurut Habermas, setiap kelompok sosial pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap nilai-nilai yang berlaku secara umum, yang kemudian mengukur tindakan anggota kelompoknya berdasarkan norma yang telah ada secara turun-temurun dan disepakati bersama.[5]

Habermas memunculkan ruang publik sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi, dimana dalam sistem demokrasi semua orang memiliki hak-hak yang sama dan kedudukan yang sama pula. Sistem demokrasi sedikit berlawanan dengan keadaan sosial pada masyarakat yang dalam komunikasinya menggunakan bahasa yang bertingkat. Karena dalam penggunaan bahasa yang bertingkat ini, berarti pula ada perlakuan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Penggunaan bahasa harus memperhatikan kedudukan orang yang diajak berkomunikasi, yang artinya tidak ada persamaan kedudukan.

Habermas juga mengatakan bahwa ruang publik akan mencapai fungsinya ketika telah tercipta situasi ideal, yang kemudian dalam situasi tersebut setiap orang yang ada dapat menyampaikan argumentasinya secara rasional. Lalu, apakah komunikasi masyarakat yang dalam komunikasi kesehariannya menggunakan bahasa bertingkat berarti menghambat komunikasi di ruang publik, yang kemudian berarti pula tidak dapat mencapai suatu konsensus yang diharapkan. Dan selanjutnya tidak tercapai pulalah sistem demokrasi yang diinginkan. Tapi kemudian hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan, karena dalam penggunaan bahasa yang tidak bertingkatpun ternyata juga akan mempengaruhi terhadap terciptanya kondisi ideal. Hal tersebut terjadi karena pada bahasa yang dipandang sebagai bahasa yang egaliter sekalipun, seperti bahasa Indonesia, terdapat kosa kata-kosa kata yang manipulatif dan menindas. Dalam hal ini M.

Musthafa mencontohkan tentang pemilihan bahasa yang digunakan di beberapa media cetak, “Dalam berbagai media sering ditulis 'terjadi penertiban terhadap pedagang kaki lima,' tetapi di lapangan yang terjadi ternyata 'penertiban' tersebut menggambarkan aksi mengejar-ngejar dan juga mengobrak-abrik.” Yang kemudian ketika menggunakan kata-kata yang manipulatif berarti juga berpengaruh terhadap terciptnya situsi ideal dalam proses komunikasi.[]

Catatan akhir:

[1]Syukur Ibrahim. *Sosiolinguistik*. (Surabaya: Usaha Nasional) hlm:26
[2] K. Bertens. *Etika*. (Jakarta: Gramedia) hlm:7
[3]Ibid hlm: 151-152
[4]Latief Wiyata. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta :LKiS) hlm: 50-52
[5]Kaelan. *Filsafat Bahasa Masalah dan perkembangannya*. (Yogyakarta:)

Intifadah pertama yang paling mematikan sepanjang sejarah dunia dimulai pada tanggal 8 Desember 1987, ketika sebuah tank tentara Israel bertabrakan dengan kendaraan warga Palestina di Erez Crossing yang tinggal di jalur Gaza di kamp pengungsi Jabalia yang menewaskan empat orang dan melukai tujuh lainnya.
Namun Palestina percaya bahwa ini bukan kecelakaan murni, karena beberapa hari sebelumnya seorang pria Yahudi ditikam sampai mati di lokasi terdekat. Dengan insiden ini beserta catatan panjang permusuhan antara Palestina dan Israel, kerusuhan mulai meletus di berbagai lokasi.

Sidebar

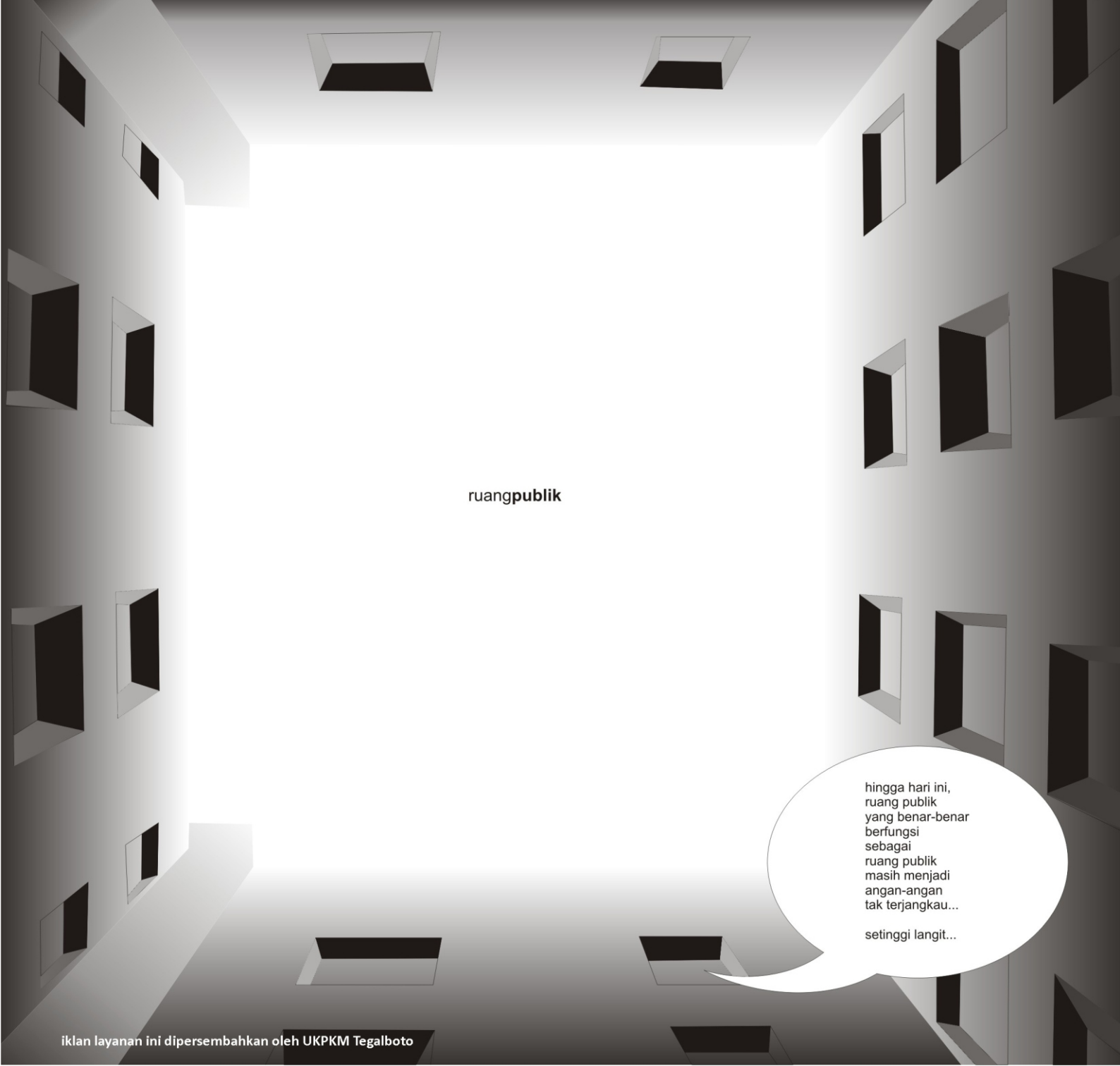
ruangpublik
hingga hari ini,
ruang publik
yang benar-benar
berfungsi
sebagai
ruang publik
masih menjadi
angan-angan
tak terjangkau...
setinggi langit...
iklan layanan ini dipersembahkan oleh UKPKM Tegalboto

BIARKAN HAK KAMI TETAP HIDUP

-Galuh Yuni Khairun Nisa-

Pasar secara fisik merupakan tempat umum di mana semua orang dapat masuk secara bebas tanpa harus membeli sesuatu. Pasar secara umum dikenal sebagai pusat perdagangan di mana para pengunjung berhak memilih dan membeli barang, bahkan memungkinkan terjadinya proses tawar-menawar di situ. Pasar dibedakan menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional dikelola oleh berbagai instansi mulai pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD. Pasar modern hampir sama dengan pasar tradisional. Pembedanya terletak pada transaksi yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan antara pemilik modal dengan pembeli.

Pasar identik sebagai tempat yang ramai, lengkap dengan promosi berbagai macam produk didalamnya. Di pasar, seluruh kebutuhan hidup bisa kita dapatkan. Jika tidak mencari kebutuhan sehari-hari, pasar juga dapat menjadi lokasi pembicaraan untuk di'obrolkan' secara bebas. Dari sekedar membicarakan masalah keluarga, tetangga, teman, atau bahkan membicarakan kebijakan pemerintah. Sisi menarik yang mungkin bisa diambil adalah bagaimana masyarakat dapat membentuk sebuah dialog yang mampu mengkritisi kebijakan pemerintah?

Mengutip pendapat Habermas, semua wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan kita membentuk opini publik disebut dengan ruang publik. Warga yang masuk dalam ruang publik memperbincangkan tentang kepentingan umum. Bukan membahas kepentingan pribadi atau gosip dan kepentingan kelompok. Mereka berkumpul menjadi satu padu untuk membicarakan dan menyatakan opini secara bebas.

Pasar Sebagai Ruang Publik

Pasar adalah sebuah tempat yang cukup nyaman bagi masyarakat sipil untuk mencurahkan opini secara bebas di luar tekanan negara. Para pedagang dan pembeli dapat berbaur dalam perbincangan tersebut. Hal-hal yang dibicarakan bisa mencangkup harkat dan martabat hidup orang banyak, terutama lingkungan pasar sendiri.

Seperti halnya Pasar Turi yang dianggap ramai sebelum terjadi tragedi kebakaran. Berbagai kebutuhan masyarakat tersedia di tempat tersebut. Namun keadaan berubah secara drastis sejak pasar turi terbakar. “Si jago merah” yang telah menghabiskan bangunan membuat pasar menjadi sepi. Kini Pasar Turi menjadi sepi akan pengunjung yang membuat para pedagang depresi dan sedikit putus asa. Mereka bingung mencari tempat untuk berdagang yang mampu menarik minat pembeli lagi.

“Pasar turi yang terbakar pada 27 Agustus 2007, menurut pihak kepolisian yang menyelidiki mengatakan bahwa pasar turi

sengaja dibakar. Ya siapa lagi yang membakar, mereka yang punya kepentingan dari orang-orang penting. Ya itulah mbak!" Kata Hanafi selaku anggota kerohanian Tim Pemulihan Paska Kebakaran (TPPK).

Terlihat kerut pada wajahnya, petanda ia sedang mengingat peristiwa tersebut. Hanafi menambahkan, "Setelah kebakaran pedagang bingung mau jualan dimana! Kami bingung mencari tempat di pinggir jalan, menggunakan terpal. Pedagang dibiarkan selama satu tahun."

Sedang menurut Mat Osin Rowafi selaku penasehat Tim TPPK, "Pedagang yang mampu keluar dari Pasar Turi dan menempati area pasar yang lain, kayak DTC, Wonokromo, dan swalayan lain. Mereka hanya membayar uang kontribusi dan keamanan selama dua tahun. Itu kelonggaran juga dari pemerintah. Bagi pedagang yang tidak mampu dan ingin tetap konsisten di Pasar Turi, mereka hanya berjualan di emperan jalan."

"Padahal tanah itu milik negara. Kami punya hak, *kok* nggak dianggap? Penuntutan itu kami lakukan dua tahun setelah kebakaran. Baru itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) diselesaikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Hal ini kemudian diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu oleh pihak ke tiga dan siap digunakan terlebih dahulu oleh pedagang Pasar Turi.[1] Padahal sebelum itu, TPS diperjualbelikan untuk mengadu domba dalam berbagai kepentingan."

"Kita keberatan, disuruh bayar lima juta. Dari mana kami dapat uang, sedangkan kami saja nggak jualan dan berpenghasilan. Terus kami kesusahan mbak. Gimana caranya biar pemerintah itu tahu. Uang muka itu sangat memberatkan. Sedangkan pemerintah menjanjikan talangan bagi pedagang yang tidak mampu. Pemerintah dapat membantu sebanyak 50 orang, tapi belum ada keterangan mana yang dianggap mampu. Kami keberatan dengan uang muka lima juta rupiah untuk pembayaran *stand*," ujar Hanafi.

Dengan berbagai problematika yang terjadi, para pedagang sadar dan merasa dibohongi oleh pemerintah. Mereka kemudian saling berbincang dan memikirkan bagaimana agar pemerintah mengerti keadaan para pedagang Pasar Turi. Hal ini berdampak pada timbulnya ketupan-letupan amarah para pedagang. Dan pergulatan itupun terjadi.

"Mas Arief membentuk Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK), itu mbak. Kalau TPPK ini mbak, terbentuk karena gabungan HPPT (Himpunan Pedagang Pasar Turi) dan HPP (Himpunan Para pedagang). TPPK itu terbentuk tiga hari setelah kebakaran. Cuma belum ada demo waktu itu, mbak." Imbuh mbak Ita, salah satu anggota TPPK.

Mat Osin kembali menjelaskan, "Anggota yang masuk di TPPK ini, ya memang

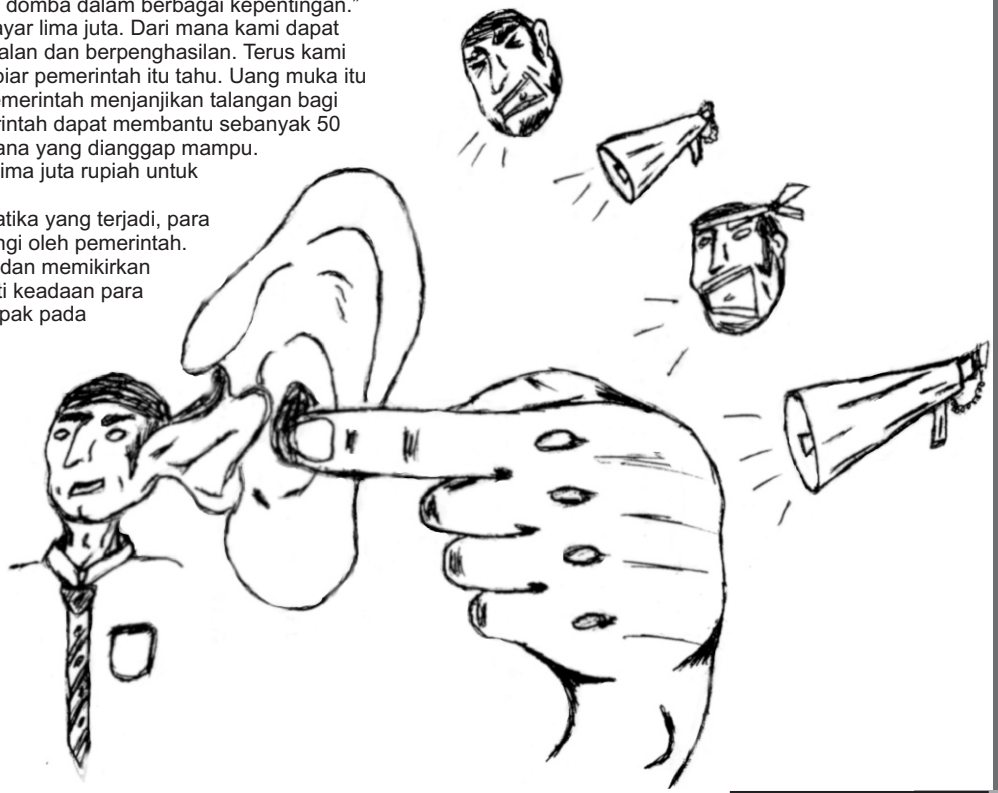

mempunyai berbagai keahlian seperti hukum, tata letak, perbaikan ruang, dan masih banyak lagi. Anggota ini di bagi menurut keahliannya. Jumlah tim ini sekitar 32 orang, tapi yang aktif secara prinsip itu 15 orang. Ya, gitu mbak soalnya sudah punya kepentingan keluarga sendiri. Jadi selalu sibuk."

Mbak Ita melanjutkan pembicaraan, "Kalau yang gabung di tim ini mbak, harus para pedagang Pasar Turi. Kalau nggak pedagang nggak boleh masuk tim ini."

"TPPK akan membantu para pedagang yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan karena hak-hak para pedagang yang dirugikan. Inspirasi itu terjadi karena aspirasi pedagang pasar. Yang mimpin demo itu ya, mas Arief sama Chalim. Soalnya kami para pedagang bingung mau ngadu kemana. Kalau kita *nggak* demo, kapan pemerintah itu tahu kondisi kita. Aspirasi itu muncul sebab Pasar Turi yang tidak dibangun selama satu setengah tahun setelah kebakar. Itu kehendak pedagang," tegas Ita kembali.

Mat osin kembali berujar, "Dianggap pemerintah tidak memperhatikan pedagang. Sebab seolah-olah pemerintah tidak memperhatikan kita, seharusnya anggota DPR itu mewakili rakyat. Tapi wakil rakyat kalau tidak dipukul, tidak akan bunyi. Terjadi di semua tempat ya mbak?" Sambil tertawa mengkritik pemerintah.

"Kami juga sudah demo di depan DPRD dan wali kota, tapi tidak digubris. Wali kota hanya janji terus. Tidak ada yang tanggungjawab. Sampai kami unjuk rasa di kebun binatang, kami menyamakan hewan. Gimana, hewan *aja* diperhatikan, tapi mengapa para pedagang sendiri tidak dihiraukan. Padahal kami juga ingin hidup." Kata Hanafi salah seorang anggota rohani lainnya.

"Kita sudah menunggu empat tahun delapan bulan, tidak pasti. Padahal janjinya tiga bulan setelah kebakaran diperbaiki," ungkap Mat Osin yang terlihat kesal.

Pemerintah berjanji, tiga bulan setelah kebakaran lokasi pasar akan diperbaiki. Hal inilah yang membuat pedagang pasar kecewa dengan sikap pemerintah. Untungnya ada uang pinjaman yang memberi kesempatan pada para pedagang untuk merintis kembali usahanya. "Pengembang lelang membantu memberikan pinjaman uang satu juta dengan syarat menunjukkan kartu akses. Ya itu yang membantu kita. Padahal anggaran pemerintah itu 18,8 milyar dan pemerintah provinsi lima milyar. Belum selesai masih terbengkalai," ungkap Mat Osin.

Berbagai orasi ditunjukkan pedagang kepada pemerintah. Karena pemerintah kota Surabaya dianggap tidak mau mengadakan dialog secara terbuka kepada pedagang. "Jangan salahkan kita, kalau menuntut hak kita," tambah Mat Osin.

Suara kami lebih keras

Pasar identik dengan sebuah sistem perdagangan. Ada kegiatan memproduksi dan menjual barang, sehingga pasar selalu dekat dengan keramaian. Namun sekarang keadaan menjadi terbalik, pasar yang dahulu ramai kini menjadi sepi dan tidak begitu banyak pembeli. Terutama di Pasar Turi, kondisi ini berawal setelah peristiwa kebakaran itu. "Pasar Turi dulu tidak hanya ramai tapi luar biasa, orang lewat lorong-lorong pasar saja susah, tapi sekarang lorong bisa dibuat jalan sepeda motor," ungkap Mat Osin.

Protes yang dilakukan oleh para pedagang pun menemukan titik terang. Meskipun belum terwujud bangunan yang layak, setidaknya sudah ada perjanjian antara pemerintah dengan para pedagang. Perjanjian hitam di atas putih yang membuat pedagang sedikit bernafas lega.

Mengulas pendapat Marx mengenai kehidupan riil struktur ekonomi masyarakat, ia menekankan bahwa struktur ekonomi masyarakat terdiri dari produksi dan hubungan sosial. Semua institusi sosial berdiri di atas dasar ini. Penyesuaian

manusia terhadap dunia selalu dikaitkan dengan hubungan ekonomi. Konsep perjuangan kelas dimulai dari pemikiran bahwa setiap individu dapat mengubah lingkungan materialnya melalui kegiatan produktif.[2]

Bahwa manusia memang hidup dalam sebuah realita yang meliputi masalah ekonomi dan sosial. Keduanya tentu saling berdampingan dan melengkapi. Pada kenyataannya, Kita tidak akan bisa hidup seimbang jika kedua hal tersebut tidak saling berdampingan. Walaupun salah satu bisa menjadi yang terunggul, tentu akan terjadi ketimpangan ekonomi maupun sosial. Maka, manusia akan selalu berpikir agar mencapai kehidupan yang selaras. Untuk menunjukkan suatu tujuan, manusia akan memproduksi sesuai keinginan dan harapannya. Dan secara tidak langsung, hal ini selalu berdampak pada keadaan lingkungan sekitar.

Bagi pedagang Pasar Turi ekonomi menjadi kebutuhan yang sangat penting, apalagi mereka hidup di wilayah kota Surabaya. Tentu saja persaingan hidup satu sama lain membuat mereka gigih memperjuangkan hak sebagai pedagang. Dalam kaitan ini terjadi "pergulatan" pedagang dan pemerintah. Sengketa memperjuangkan hak yang cukup panjang membuat pedagang tidak pantang menyerah begitu saja. Sampai akhirnya mencapai titik temu, di mana pemerintah dapat bertindak agar keadaan menjadi lebih baik.

Puncaknya, kesepakatan antara para pedagang dan pemerintah terjadi pada hari Rabu, 20 November 2010. Pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah kota Surabaya dengan TPPK Pasar Turi membahas tentang pembangunan pasar Turi. Kesepakatan pun tercapai tanpa harus merugikan kedua belah pihak antara pemerintah kota dan pedagang pasar Turi sendiri.

###

Sebagian orang menganggap pasar secara fisik hanya berfungsi sebagai tempat berjualan dan tempat untuk orang mencari kebutuhan, tanpa menelisik lebih dalam apa arti dan makna pasar yang sebenarnya. Tidak semua orang tahu bahwa pasar juga termasuk Ruang Publik. Ruang Publik yang dikenal sebagai ruang komunikasi para warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui aspirasi masyarakat dapat mengubah kebijakan negara. Hal ini juga bisa disebut sebagai Ruang Publik Politis, sebuah opini dan aspirasi diskursif yang terdiri dari warga negara. Bukan dari mereka yang mempunyai kepentingan institusi dan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan mengusung kepentingan minoritas.

Habermas memahami Ruang Publik sebagai kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkan bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan rakyat, mereka akan melawan sumber-sumber lain seperti uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara). Jadi Ruang Publik menurut Habermas adalah ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar (globalisasi). Ruang Publik disebut otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif dan ekonomi kapitalistik. Mereka dapat hidup secara mandiri. Hak dasar individu yang diperjuangkan untuk mengungkap kepentingan yang menyangkut isu-isu politik, pembangunan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ruang Publik

harus terbebas dari negara, pasar, dan hegemoni lain.

Bagaimana dengan kondisi nyata sekarang? Bisa diungkapkan bahwa pasar secara fisik adalah tempat berjualan masyarakat guna memenuhi kebutuhan agar tetap *survive*. Tapi karena keadaan, para pedagang menuntut hak kepada pemerintah. Padahal Habermas mengungkapkan bahwa "pasar" dan negara dapat bersatu demi kepentingan kuasa dan ekonomi. Berpikir bahwa ekonomi tidak akan bisa mempengaruhi perubahan sosial. Dalam wawasannya, bisa dikatakan ekonomi merupakan salah satu pendorong ke arah kapitalisme. Tidak dipungkiri oleh Habermas, suatu dialektika dapat terwujud melalui komunikasi sosial itu sendiri. Peran ekonomi hanya sebagai proses teknis dalam masyarakat. Sedangkan yang dikaitkan dalam masalah ini diskusi publik atau yang biasa disebut Ruang Publik merupakan bentuk opini warga. Warga yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, bisnis, dan pejabat pemerintah.

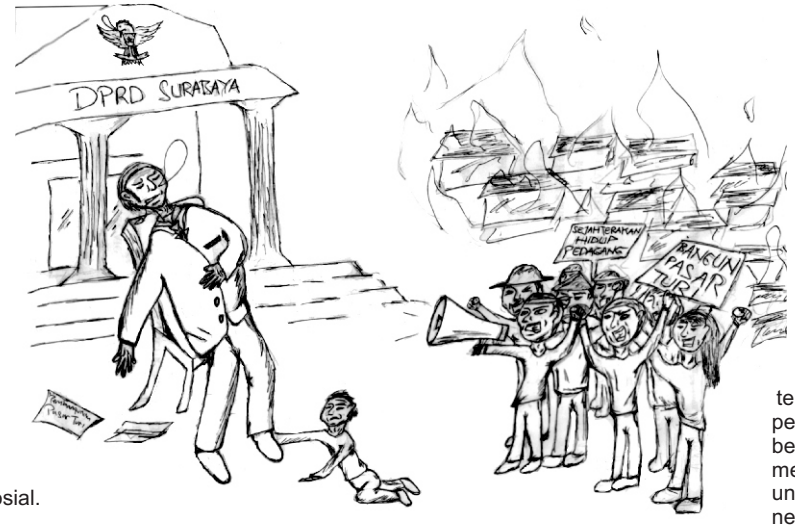

Bagi Habermas, negara tidak hanya sekedar mengamankan kondisi produksi. Negara juga terlibat dalam proses reproduksi, sebab negara menjadi pelaksana hukum ekonomi sendiri. Habermas mempunyai kunci kekuatan untuk menentang bahwa pasar bekerjasama dengan negara. Pertama, negara dapat memproduksi dan memelihara kegiatan pasar. Kedua, penyesuaian sistem hukum dan pasar. Ketiga, bertindak menggantikan pasar dengan cara menanam modal. Keempat, menggantirugi yang diakibatkan ketidakfungsian dalam penimbunan, sehingga menimbulkan reaksi politis dari swasta. Dari sinilah negara mengadakan usaha campur tangan antara negara dan pasar, sehingga yang mengendalikan bukan pasar melainkan negara. Oleh karena itu, krisis rasionalitas terjadi kalau negara tidak bisa medamaikan dan memenuhi tuntutan sistem ekonomi. Habermas dalam pandangan Ruang Publiknya tidak akan setuju jika krisis rasionalitas disamakan dengan krisis ekonomi. Meskipun keduanya sama-sama merupakan krisis sistem, sebab proses administrasi berbeda dengan proses pasar.

Pertentangan dari pendapat Habermas itu muncul pada zaman sekarang, bisa dikatakan sama dengan kapitalisme lanjut. Seperti yang diterangkan Habermas tentang kapitalisme lanjut mengenai sistem administrasif yang tidak mampu mendamaikan dan memenuhi perintah sistem ekonomi. Peran pasar yang selalu berdampingan dengan pemerintah kini telah berubah menjadi pasar yang menentang pemerintah, karena pasar merasa tidak diperhatikan oleh negara.

Hal ini berbeda dengan konsep Habermas tentang Ruang Publik yang tidak akan terjadi pada "pasar". Sebaliknya, sekarang pasar telah berubah menjadi tempat Ruang Publik bagi pedagang. Negara bukan lagi pengendali utama, namun pasar yang menjadi pengendali utama.

Dalam pasar sendiri, Ruang Publik justru terbentuk untuk menuntut pemerintah. Pasar yang berwujud "pasar material" membentuk para pedagang untuk bersikap kritis terhadap negara. Mereka para pedagang adalah rakyat biasa, bukan tangan kanan pemerintah yang selalu saling melindungi. Demo merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemeritah yang dibangun melalui aspirasi seluruh pedagang Pasar Turi. Seperti yang dikatakan Habermas tentang kepentingan teknis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pedagang menuntut haknya dengan cara melakukan demo agar mereka mendapatkan haknya. Para pedagang menuntut kepada pemerintah agar hak-hak mereka dalam berjualan diperjuangkan kembali oleh pemerintah. Para pedagang yang menunjukkan sifat emansipatoris dengan menuntut pemerintah agar mendengarkan dan melakukan apa yang telah mereka suarakan.

Pedagang awalnya tidak tahu mengapa pasar bisa

terbakar. Mereka baru mengetahui setelah kepolisian berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menjelaskan bahwa pasar turi itu sengaja dibakar. Kejadian ini seakan memposisikan para pedagang sebagai "kambing hitam". Sebab pedagang merasa curiga terhadap orang-orang yang memiliki modal.

Para pedagang yang menuntut haknya sebagai warga merasa telah dirugikan dan tetap menyalahkan pemerintah yang selalu diam. Pemerintah baru mau bergerak jika sudah dikritik oleh warga. Kini siapa yang paling di salahkan? Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk selalu memperbaiki keadaan negara, agar masyarakat tidak selalu menyalahkan pemerintah ataupun sebaliknya. Penerimaan aspirasi rakyat dirasa sangat penting, agar dapat melayani kebutuhan rakyat sesuai dengan hak mereka. Tentu tidak perlu dipertanyakan kembali, tugas pemerintah adalah menanggung nasib rakyat yang sangat berat. Sehingga dibutuhkan adanya proses dialektika antara pemerintah dengan rakyat.[]

Catatan Akhir:

[1]Laporan dari rapat kesepakatan pembangunan Pasar Turi.
[2]Save. M. Dagun. Sosio Ekonomi: Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Sidebar

1 Mei yang juga diistilahkan dengan May Day pada tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di AS mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka. Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnnya dihukum mati. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara, juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal. Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi bahwa "Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis."

REBUT TANAH
KITA

Letupan Kecil (Reforma) Agraria

TIDAK dipungkiri lagi bahwa cengkraman pasar pada sebuah negara di era modernisasi ini semakin gencar dilakukan. '*Invisible Hand*' dalam wujud negara superior dengan instrumen pasarnya telah menggempur negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dulu saat pra kemerdekaan, ketika imperialisme-kolonialisme menyerap seluruh potensi negara dalam bentuk fisik. Yang konon diasosiasikan sebagai proses penjajahan 'barat' terhadap 'timur'. Kemudian membentuk mental inferior yang oleh pemikir-pemikir *post colonial* dianggap sebagai pengkerdilan 'barat' terhadap 'timur' melalui penjajahan. Mental rendah diri yang mengendap pada diri orang-orang timur dikarenakan penjajahan yang begitu lama.

Sekarang penjajahan tidak lagi dimaknai secara fisik, seperti pengambilan lahan, tanam paksa, dan sebagainya. Penjajahan saat ini lebih bersifat abstrak. Bukan lagi dihadapi melalui jalur kekerasan ataupun perlawanan dengan senjata, melainkan pertarungan ideologis yang turut mempengaruhi kesadaran massal. Ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, dan ideologi lain, pada dasarnya semua paham itu memiliki tujuan sama, yaitu mencapai kehidupan yang lebih baik untuk seluruh orang.

Semangat *Landreform*

Menilik kembali bangsa ini di era kemerdekaan pasca 1945, diikuti berkuasanya rejim orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno dengan paham komunisme yang notabene menolak sistem ekonomi neoliberal. Periode tersebut membawa harapan baru untuk kehidupan bangsa dan tanah air. Tak luput bahwa gagasan restrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria turut menjadi salah satu pemikiran para pendiri bangsa, dan menjadi agenda utama negara-negara yang baru bebas dari penjajahan.

Manifestasi tersebut tampak dari penyiapan penyusunan Undang-Undang Pembaharuan Agraria (UUPA). Inti dari penyusunan dasar-dasar Hukum Agraria/Hukum Tanah Baru itu adalah untuk menggantikan Hukum Agraria warisan pemerintah kolonial 1870. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1960, RUU baru hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia *Ad Hoc* DPR, dan

Universitas Gadjah Mada diajukan ke DPR-GR.[1]

RUU itu akhirnya disetujui DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), atau dikenal dengan istilah Undang-undang Pembaharuan Agraria (UUPA). UUPA ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan undang-undang *landreform*). Sejak saat itu tanggal 24 September 1960 (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai "Hari Tani".[2]

Pada perkembangannya, rencana redistribusi baru dapat dilaksanakan pada tahun 1962 dengan tahap pertama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahap kedua yang direncanakan adalah *landreform* di kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Untuk selanjutnya rencana ini gagal dilaksanakan karena terjadi huru-hara politik di tingkat nasional pada tahun 1965 (peristiwa G/30S). Terjadi pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan *landreform* itu berhenti.[3]

Mulai menginjak fase rezim Orde Baru (Orba), tepatnya ketika Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 1966. Perubahan atmosfer politik setelah prahara 1965 itu semakin memperburuk keadaan, ketika label-label politik dan interpretasi sosial atas segala hal yang berhubungan dengan sektor agraria selalu identik dengan keterlibatan kekuatan politik kiri sampai pertengahan tahun 1960-an. Ideologisasi pembangunan yang dikembangkan pada masa Orba hampir tidak memberi tempat pada berbagai konsep individu maupun kelompok intelektual yang menjadikan sektor agraria sebagai pikiran dan aksi kritisnya.

Pada awal Pemerintah Orba pula, yaitu akhir 1960-an berbagai pengusiran petani penggarap mulai marak terjadi. Pada era itu, *landreform* menjadi program yang tabu. Padahal *landreform* yang menjadi semangat utama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, memuat tentang tata cara pendaftaran tanah-tanah untuk digunakan masyarakat secara adat atau tanah-tanah yang dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Rezim Orba yang pro kapitalis, dan menggunakan kebijakan ekonomi pasar neoliberal telah mengubah drastis kebijakan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang telah lalu.

Kini Indonesia masih menjadi sebuah negara yang mengacu atau dipengaruhi oleh keberadaan pasar. Singkatnya, kebijakan ekonomi kita saat ini masih mengekor pada barat yang didominasi oleh sistem ekonomi neoliberal. Transisi ideologi Komunisme (pasca 1945-1965) menjadi ideologi kapitalisme (1966-1998/sekarang) telah memporak-porandakan tatanan struktur masyarakat, khususnya masyarakat pertanian. Sampai sekarang pun hampir seluruh wilayah pertanian di penjuru tanah air dikuasai oleh pemodal-pemodal swasta, baik asing maupun dalam negeri. Serta penguasaan yang dilakukan oleh negara dalam bentuk kepemilikan Badan Usaha Milih Negara (BUMN).

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kenyataannya keberadaan tanah yang subur malah berdampak pada banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di beberapa tempat, seperti Jenggawah, Curahnongko, Mandigu, Ketajek, Sukorejo, Nogosari, Karangbatu, dan lain-lain. Salah satu kasus sengketa tanah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sengketa tanah di daerah Ketajek yang terhampar di ketinggian ± 1000 meter (dpl) lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro, berada tepat di atas Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti.

Keberadaan Kelompok Tani

Bagi masyarakat pertanian, tanah atau lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanah seakan menjadi harga mati bagi masyarakat pertanian karena begitu vitalnya. Tidak mengherankan jika sering terjadi konflik lahan di berbagai daerah negeri ini. Penguasaan lahan secara serempak sejak era Orba terhadap seluruh daerah pertanian telah mencerabut salah satu sumber kehidupan masyarakat.

Di Ketajek sendiri, seperti kebanyakan kondisi daerah-daerah lainnya. Seiring masuknya pengaruh kapitalisme, tanah milik masyarakat lokal mulai banyak dikuasai oleh pemilik modal atas tekanan struktural. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Begitu halnya dengan kehidupan masyarakat Ketajek, sejak tahun 1973 telah terjadi pencaplokan atau okupasi lahan rakyat oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Alih fungsi lahan pun terjadi dari masyarakat ke perusahaan negara sehingga selalu menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat perkebunan dengan PDP.

Selain terjadi konflik di wilayah perkebunan, masyarakat Ketajek yang tinggal di bagian atas perbatasan hutan lindung juga menyisakan konflik antara petani hutan dan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI). Petani hutan yang selama ini mengelola hutan secara turun-temurun dari nenek moyang selalu diserobot dan tidak diakui haknya oleh pemerintah. Konflik timbul karena masyarakat merasa tidak

diikutsertakan dalam proses pengelolaan hutan yang ditangani oleh PERHUTANI. Semestinya lingkungan hutan bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan petani, bukan malah diusir dari lahan pengelolaan hutan milik mereka.

Sehingga para pihak yang berkonflik dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Pakis dan Suci, Kecamatan Panti, yaitu antara masyarakat sekitar kawasan perkebunan dengan institusi pemerintah kabupaten Jember/PDP kebun Ketajek. Serta masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dengan pihak PERHUTANI. Menyadari keadaan tersebut, warga berinisiatif membentuk Organisasi Tani Lokal (OTL) Kelompok Pejuang Tanah Ketajek (KOMPAK) yang bertekad mengembalikan hak-hak tanah kepada rakyat di tengah penguasaan lahan oleh PDP. Serta menjaga kelestarian hutan dengan membentuk Kelompok Tani (KT) Rengganis di tengah ancaman eksploitasi hutan oleh PERHUTANI.

Dibentuknya OTL Kompak sebagai lembaga representasi masyarakat Ketajek berawal pada tahun 2000, pasca terjadinya penembakan oleh anggota BRIMOB pada seorang anggota masyarakat pada tahun 1999. Tujuan mereka adalah memperjuangkan nasib rakyat dengan berusaha mengembalikan hak atas tanah-tanah Ketajek yang menjadi lahan garapan masyarakat dulu, dan menata ulang kembali sumber daya agraria agar kemiskinan, terutama di Desa Pakis dan sekitarnya, bisa berkurang. Seperti dikemukakan oleh Muarif, masyarakat Ketajek, pengurus KT Rengganis, "KOMPAK mulai terbentuk tahun 2000 berawal ketika dulu terjadi penembakan di sini (Ketajek.red). Tujuan awal KOMPAK terbentuk yaitu menginginkan tanah rakyat kembali."

Sedangkan untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah rusak dan menyebabkan bencana banjir, masyarakat berinisiatif membentuk kelompok dalam satu wadah organisasi masyarakat petani hutan. Maka dibentuklah KT Rengganis pada tahun 2004. Awal dibentuknya kelompok ini adalah untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak dalam satu wadah organisasi petani hutan. Adapun visi dan misi yang diusung oleh Rengganis yaitu mewujudkan kelestarian hutan dan membentuk rimba sebagai hutan yang berdampak sosial. Caranya dengan menggarap *tetelan* (lahan bukaan hutan.red), masyarakat sekitar hutan lereng Selatan Hyang Argopuro berharap dapat mengurangi kemiskinan yang membelit masyarakat.

"Tujuan Rengganis, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Kemudian meningkatkan ekonomi, membentuk pasar sendiri untuk menaikkan harga Kopi. Bagaimana Kopi sebagai sumber pendapatan utama petani bisa memiliki pasar sendiri," tandas Munawaroh yang sehari-harinya tinggal di tengah hutan. Karena jika menengok pada realita yang ada sampai saat ini, pengelolaan dan penguasaan hutan oleh PERHUTANI memang tidak memberikan manfaat apapun terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Sampai pada tahun 2006, setelah terjadi musibah banjir bandang, masyarakat sekitar dan PERHUTANI seakan baru sadar akan parahnya kerusakan hutan saat itu. Akhirnya, KT Rengganis bekerja sama dengan PERHUTANI dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Menurut pengurus KT Rengganis, keputusan membentuk LMDH adalah langkah taktis strategis menanggulangi kemiskinan serta menjaga kelestarian hutan. KT Rengganis tidak hanya ikut pola pikir PERHUTANI lewat sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), melainkan juga memiliki konsep pengelolaan hutan sendiri yaitu hutan sebagai rimba sosial.

Seperti dikatakan Hartono, pengurus Rengganis, "Sebelum ada lembaga (LMDH.red) itu kayu *kan gak* aman. Seperti tahun 1997 itu *kan* kayu habis dibabat dan dijual oleh petani. Setelah itu makanya PERHUTANI membentuk lembaga (LMDH) supaya bisa bekerja sama dengan rakyat (KT Rengganis.red), kemudian petani itu tidak ilegal ketika menanam di hutan." Menurut Hartono, dengan terbentuknya LMDH dan adanya MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara PERHUTANI dan pihak masyarakat KT Rengganis, masyarakat dapat mengelola dan menanam di lahan hutan kembali. Sedangkan pemerintah dan PERHUTANI menjadi sangat diuntungkan, karena tidak terdapat lagi pencurian kayu karena petani hutan juga terlibat dalam menjaga hutan. Ini bisa menjadi bukti, bahwa sistem hutan sosial yang diprakarsai oleh Rengganis dapat menjawab permasalahan antara masyarakat dengan PERHUTANI.

Habitus; Menstrukturkan dan Distrukturkan

Salah satu pemikir sosial, yaitu Pierre Bourdieu pernah menyumbangkan kontribusi dalam sosiologi dengan menghubungkan ide-ide teoritis melalui empiris penelitian yang syarat utamanya adalah habitus, modal, dan arena. Habitus diposisikan sebagai setiap individu yang menempati tempat dalam ruang sosial (ruang sosial; Bourdieu menyebutnya sebagai arena). Jadi, jika habitus berada di dalam pikiran seseorang, arena berada di luar pikiran seseorang dalam wujudnya sebagai kelompok-kelompok sosial.

Dalam hal ini, Bourdieu menganggap habitus sebagai "struktur mental atau kognitif" yang melaluinya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Secara dialektis, habitus adalah "produk dari internalisasi

struktur" dunia sosial (Bourdieu, 1989: 18).[4] Orang-orang tersebut merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas, seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial.

Bourdieu juga mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Hasil suatu habitus adalah sistem yang tahan waktu dan dapat diwariskan. Struktur yang membentuk orang-orang di tempat ia berada menjadi prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup yang dapat disesuaikan dengan tujuan-tujuan. Tanpa mengandaikan tujuan secara sadar dan penguasaan secara obyektif diatur dan teratur tanpa harus menjadi kepatuhan akan aturan-aturan.

Pada masyarakat Ketajek, sruktur yang membentuk habitus masyarakat ditentukan oleh ketidakmampuan masyarakat mengelola lahan di daerahnya sendiri sejak rezim Orba berkuasa. Sejak tahun 1973, masyarakat dihadapkan pada kondisi lahan yang dikuasai oleh PDP, hal tersebut memaksa masyarakat untuk bertindak berdasarkan habitus kolektif yang dikondisikan dalam keadaan tertekan. Alhasil masyarakat telah melakukan internalisasi dari struktur yang merepresifnya. Sehingga membentuk bangunan struktur mental masyarakat yang melakukan perjuangan massif melawan pemerintah dengan PDP sebagai representasi sebuah negara.

Dari hasil kronologi 'perjuangan tanah Ketajek' yang disusun oleh OTL KOMPAK, menunjukkan perjuangan telah dilakukan masyarakat sejak tahun 1973, dengan tokoh penggeraknya saat itu Ahmad Bazeed. Perjuangan itu terus berlangsung secara turun-temurun dengan pergantian beberapa tokoh masyarakat. Hanya saja perjuangan yang dilakukan sejak tahun 1973 sampai dengan 1999 bukanlah pergerakan atau praktik yang didasarkan atas nama lembaga melainkan perwakilan masyarakat Ketajek.

Baru pada tahun 2000, perjuangan secara terlembaga masyarakat Ketajek melalui OTL Kompak semakin membulatkan tekad masyarakat untuk terus berjuang mendapatkan tanah Ketajek kembali, dengan tokoh penggerak atau ketuanya Asmo atau Munawaroh. Perjuangan melalui lembaga ini menjadi lebih terstruktur, baik secara administratif maupun koordinatif. Sekaligus membuktikan bahwa habitus yang terbentuk dalam situasi tertekan sejak rezim Orba berkuasa terus diwariskan pada perjuangan-perjuangan selanjutnya.

Kemudian di tahun 2004 terbentuklah organisasi tani lainnya yaitu KT Rengganis yang bertujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat agar dapat mengelola lahan kembali di daerah hutan, wilayah kekuasaan PERHUTANI. Butuh waktu dua tahun, sampai dengan tahun 2006 barulah KT Rengganis berhasil menjalin kerja sama dengan PERHUTANI. Masyarakat boleh mengelola lahan sebagai petani penggarap di hutan, sekaligus ikut menjaga kelestarian hutan. Selain itu terjalin juga sistem bagi hasil antara kedua belah pihak dari hasil garapan yang dilakukan oleh petani.

Lebih jauh Bourdieu menjelaskan bahwa habitus bervariasi, tergantung pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut. Tidak semua orang memiliki habitus yang sama, namun mereka yang menempati posisi sama di dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama (pada tahap ini Bourdieu mau memperkenalkan kembali praktik agen, kemampuan penemuan dan improvisasinya [Bourdieu, 1990: 13]).[5] Di sini habitus bisa jadi merupakan fenomena kolektif. Habitus memungkinkan orang memahami dunia sosial, namun keberadaan habitus juga menjadi pembeda ketika dunia sosial dan strukturnya tidak selalu menancapkan dirinya secara seragam pada tiap-tiap aktor.

Contohnya saja pasca kondisi perubahan taraf ekonomi yang dialami oleh masyarakat Ketajek dari yang tadinya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, sekarang menjadi dapat bercocok tanam di lahan PERHUTANI. Fakta sosial turut mengubah habitus sebagian besar masyarakat Ketajek. Orientasi perjuangan akan tanah Ketajek yang sebelumnya terjadi secara massif, tiba-tiba bergeser setelah masyarakat mulai mendapatkan peralihan untuk mencukupi kebutuhannya dengan menggarap lahan di hutan. Dampaknya, usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menempuh perjuangan tanah Ketajek sudah mulai kendur. Di samping pula kendala struktural, yang selama ini menjadi hambatan utama perjuangan karena pemerintah kabupaten masih menutup akses untuk melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat.

Kondisi empiris di lapangan, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Ketajek hanya dilakukan oleh segelintir orang. Salah satu orang yang masih bertahan dan bersikeras memperjuangkan redistribusi lahan kepada masyarakat adalah Asmo, atau biasa dipanggil Munawaroh selaku ketua OTL KOMPAK saat ini. Baginya perjuangan tidak akan berakhir sampai masyarakat mendapatkan lagi haknya untuk memperoleh tanah yang sah secara hukum. Sampai sekarang, Munawaroh masih aktif menghimpun masyarakat melakukan musyawarah. Dan menjadi sarana penyambung aspirasi masyarakat untuk melakukan lobby-lobby ke tataran pemerintah. Ini membuktikan bahwa tidak selamanya habitus orang-orang pada daerah yang sama menciptakan habitus yang seragam.

Konsep Bourdieu tentang habitus adalah habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus adalah struktur yang menstrukturkan dunia sosial. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Munawaroh untuk menguatkan organisasi OTL Kompak demi memperjuangkan pengembalian lahan pada

masyarakat. Di sisi lain, habitus adalah struktur yang distrukturkan oleh dunia sosial. Di sini masyarakat yang sudah merasa puas dapat mengelola lahan kembali, seakan telah dikondisikan mendapatkan alternatif mata pencaharian baru, sehingga lupa dengan perjuangan utama pengembalian tanah Ketajek.

Perjuangan Habitus di(Dalam) Arena

Bourdieu melihat bangunan struktur yang berada di luar masing-masing individu beserta habitus sebagai suatu "arena" yang lebih dipandang secara relasional ketimbang secara struktural. Arena merupakan jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 97).[6] Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Yang menduduki posisi bisa jadi merupakan agen atau institusi, dan mereka dihambat oleh struktur arena.

Arena menurut Bourdieu merupakan arena pertempuran: "arena juga merupakan arena perjuangan" (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 101).[7] Arena diartikan sebagai sesuatu yang dinamis, dimana arena merupakan kekuatan otonom, tempat berlangsung perjuangan posisi-posisi. Perjuangan ini dipandang mentransformasikan atau mempertahankan ranah kekuatan. Namun arena adalah sejenis pasar kompetitif yang didalamnya terdapat berbagai macam habitus dengan setiap volume modal sosial yang dimiliki seseorang. Hal ini bergantung pada ukuran jaringan keterikatan seseorang agar dapat melakukan mobilisasi secara efektif dan berdasarkan volume dari modal (ekonomi, kultural, simbolis) yang digunakan dan dimanfaatkan. Modal mesti ada di dalam sebuah arena, agar arena dapat memiliki arti.

Menelaah kembali kondisi masyarakat Ketajek, arena digambarkan sebagai ruang sosial yang ada dalam ruang lingkup agraris masyarakat tani. Yang dimaknai sebagai arena yaitu pihak KT Rengganis dan PERHUTANI, serta OTL Kompak dan PDP. Sejak awal masyarakat telah terkontruksi oleh kehidupan sosial melalui tekanan-tekanan struktural yang dibangun oleh lembaga negara. Ini membentuk kerangka berpikir masyarakat untuk melakukan kontruksi dunia sosial melalui serangkaian perjuangan yang termanifestasi dalam kelompok tani. Struktur objektif hubungan antarposisi yang terjalin antara KT Rengganis dan OTL Kompak di dalam arena pun terbentuk berlawanan dengan pemegang kebijakan.

Selanjutnya struktur objektif ditentukan pula oleh sifat habitus agen (aktor/individu) yang menduduki berbagai jenis posisi di dalam arena tersebut. Posisi dari berbagai agen di arena tersebut ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif modal yang mereka kuasai (Anheier, Gerhards, dan Romo, 1995).[8] Modal merupakan hubungan sosial, artinya suatu energi sosial yang ada dan diharapkan mampu menjembatani relasi antar individu maupun kelompok. Sehingga dalam perannya nanti modal dapat membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan untuk memproduksi (menyerap konstruksi) dan mereproduksi (menghasilkan konstruksi) ketidaksetaraan.

Seperti dikatakan Munawaroh, selaku ketua OTL KOMPAK, "Perjuangan yang ditempuh KOMPAK, pertama, selama ini juga kita melakukan penataan ekonominya. Yang kedua, saling melakukan pertemuan-pertemuan untuk melakukan suatu perlawanan, contohnya dengan melakukan lobby-lobby kalau *mentok* baru melakukan demo ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten)." Alhasil yang dapat dilakukan OTL KOMPAK adalah tetap menjaga semangat kebersamaan dan kekompakan antar warga demi mewujudkan tuntutan bersama.

Selain melakukan kegiatan, seperti penataan ekonomi masyarakat, sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengorganisir gerakan massa.

Bourdieu juga menjelaskan, modal sosial sebagai sebuah konsep kebersamaan yang lahir dari adanya kepekaan seorang pemimpin, kemudian ditindaklanjuti dengan menggagas pemikirannya untuk membangun kesadaran masyarakat yang saling memiliki keterkaitan sosial. Sehingga terwujudlah rasa peduli dan tanggung jawab yang memunculkan jaringan sosial. Dengan demikian, Munawaroh sebagai tokoh masyarakat, telah menjadi 'modal kultural' yang mampu membentuk fenomena kolektif agar masyarakat mau berjuang bersama memperjuangkan hak-hak atas lahan.

Arena dan Ruang Publik

Pada masyarakat Ketajek, arena PDP dan PERHUTANI yang membatasi ruang gerak habitus kolektif kelompok tani, direspon oleh kesadaran yang diawali oleh satu tokoh dengan sebuah perjuangan berdasarkan struktur mental masing-masing individu. Terjadilah proses penyadaran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat kepada individu-individu lainnya sampai tercipta sebuah lembaga. Pada wilayah ini, tercipta arena antara lembaga sipil (kelompok tani) dan lembaga kepentingan negara (PDP dan Perhutani) sehingga terjadi tarik-menarik kepentingan antara kedua belah pihak.

Tentu saja lembaga sipil dari habitus masyarakat Ketajek tidak akan terbentuk di arena yang otonom, tanpa adanya sebuah ruang yang mampu mengakomodasi habitus tersebut. Pada titik inilah, Jurgen Habermas menawarkan suatu solusi dalam proses diskursus komunikasi yaitu ruang publik. Ruang publik menjadi sarana antar individu dalam menjalin komunikasi bebas tekanan (penguasa). Untuk kemudian menciptakan muara konsensus yang digunakan sebagai kumpulan suara atau aspirasi perjuangan masyarakat ke pemerintah.

Jika di arena keberadaan relasi-relasi antarposisi objektif terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Dan relasi tersebut bukan interaksi atau ikatan intersubjektif antar individu. Maka di dalam ruang publik ini tercipta hubungan intersubyektif antar individu, dialektis, dan politis guna membentuk diskursus rasional. Kelompok tani secara tidak langsung telah membuka ruang intersubyektif sehingga memunculkan kesadaran bersama secara emansipatoris. Lalu dialektika komunikatif antar semua individu di dalam kelompok tani yang mengedepankan rasionalitas. Serta unsur politis di dalam yang memuat kepentingan guna membuka jembatan dialog ke pemerintah.

Melihat konteks ke-Indonesiaan, dan khususnya di Ketajek, dapat dimaknai bahwa negara pada dasarnya berperan sebagai objek yang melaksanakan kepentingan sosial-politis. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan masyarakat sipil adalah sekumpulan warga negara yang berangkat dari kepentingan sosial-ekonomi, sekedar memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja dan mencapai taraf ekonomi yang baik. Tetapi pada praktiknya, negara malah seringkali turut menyumbang ketidakadilan bagi masyarakat.

Di titik ini Habermas berbicara tentang peran ideologi dalam kehidupan masyarakat. Mendefinisikan ideologi sebagai penindasan terhadap kepentingan umum. Kritik ideologi merupakan kritik terhadap cara kerja dominasi dan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Negara yang telah dikuasai oleh para pemilik modal, kepentingan kapitalis, niscaya akan menindas masyarakat sipil lainnya yang tak memiliki kekuatan dalam penguasaan modal. Apalagi melihat sistem kapitalis yang dijalankan negara Indonesia. Sistem kapitalis semu yang masih banyak dihiasi oleh praktik penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di samping kekuatan negara dan kekuatan kapital, sebenarnya terbentuk kekuasaan komunikatif melalui jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat sipil. Bagi Habermas, dialog atau komunikasi ini juga diisi oleh peran cendekiawan (intelektual) yang dimainkan melalui media, pers, LSM, organisasi massa dan lembaga-lembaga lain untuk berkontribusi dalam

sistem politik. Sehingga memaksa negara dan perangkat kekuasaannya responsif terhadap diskursus-diskursus masyarakat sipil. Di ketajek, kelompok tani dengan beberapa elemen cendekiawan (mahasiswa dan LSM) yang mau berkontribusi membantu perjuangan OTL KOMPAK sesungguhnya telah membuka keran komunikasi publik tersebut.

Oleh karenanya, sebelum ruang publik dapat menembus etika diskursus terhadap pemegang kebijakan, harus ada dulu sistem yang mampu mengakomodasi jalannya diskursus antara masyarakat sipil dengan *stake holder*. Di sini Habermas menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Adalah demokrasi deliberatif yang menjadi tawaran Habermas untuk menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus rasional. Lalu bagaimana dengan jalannya proses demokrasi di Indonesia?

Ternyata tonggak demokrasi Indonesia masih berjalan searah, bukan dua arah. Akses masyarakat sipil melalui ruang-ruang publik untuk memberikan sumbangsih pemikiran masih terbentur dengan minimnya keterbukaan pemerintah. Aspirasi ruang publik yang tercipta macet sampai pada konsensus dari hasil dialektika, sedangkan unsur-unsur politis di dalamnya yang memuat kepentingan umum belum dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik atau keputusan politik pemerintah. Hal ini pula yang menghambat perjuangan masyarakat Ketajek dan OTL KOMPAK untuk mengembalikan kembali tanah masyarakat.

Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan diri, hak-hak, dan kepentingan-kepentingannya. Publik mampu mendesak agar perjuangan pemenuhan hak-hak dan kepentingannya didengar dan diterapkan oleh pemerintah. Sehingga dibutuhkan ruang publik sebagai tempat mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka membentuk sebuah opini. Dengan demikian rakyat pun harus terus memperjuangkan terjadinya ruang publik, kalau perlu merebutnya.

Ruang publik politis sendiri masih terbagi menjadi dua menurut Habermas, yaitu 'ruang publik autentik' dan 'ruang publik tak autentik'. Ruang publik autentik terdiri atas proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi nonformal yang mengorganisasikan dirinya sendiri. Komunikasi terjalin secara horizontal, dan para aktor berasal dari masyarakat sipil. Sedangkan ruang publik tak autentik adalah kekuatan pengaruh atau keputusan para pemilih, dan perilaku konsumen lewat media massa. Para aktor hanya memakai ruang publik yang sudah ada dengan bantuan sumber-sumber dari luar mereka, yakni uang dan kuasa.

Begitu pun dengan kondisi masyarakat Ketajek sekarang. Perjuangan masyarakat tidak menentu seiring banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang masuk ke dalam organ masyarakat. Menurut Munawaroh, pengorganisasian masyarakat saat ini makin sulit karena ada intervensi politik yang membuat anggota OTL KOMPAK pada jajaran masyarakat menjadi terpecah. Kelompok masyarakat yang awalnya dulu terbentuk hanya OTL KOMPAK, sekarang lahir beberapa kelompok masyarakat lain yang diprediksi akan menjadi batu sandungan karena berdiri atas dasar kepentingan politik yaitu bentukan dari pemerintah. Ini pula faktor utama yang menyebabkan anggota OTL KOMPAK semakin menyusut.

Seperti pemaparan Hartono tentang kondisi politik di masyarakat saat ini, “Kelemahan dari lembaga (Rengganis) mungkin karena sulitnya melakukan sosialisasi dari orang ke orang, atau setidaknya duduk bareng dengan petani. Sehingga lembaga dan masyarakat kadang *gak* nyambung (komunikasinya). Itu jadi gampang disusupi pihak luar (organisasi bentukan pemerintah) ke dalam lembaga. Jadi yang punya perjanjian itu LMDH-PERHUTANI-Rengganis, tapi ada kelompok lain yang *merecoki* perjuangan lembaga.”

Letupan-letupan kecil perkumpulan masyarakat di segala penjuru tanah air ini sebenarnya telah terbentuk. Masing-masing membuat ruang-ruang publik sendiri demi menyuarakan tujuan kepentingan mereka bersama. Hanya yang menjadi masalah sekarang, bagaimana pihak pemerintah sendiri dengan sikap *legowo* mampu menampung aspirasi masyarakat melalui dialog rasional dan komunikatif. Lalu menjalankan regulasi berdasarkan masukan-masukan yang sebelumnya telah disaring dalam ruang publik tersebut. Bagaimanapun negara bukan satu-satunya pusat kedaulatan, melainkan salah satu pusat masyarakat yang sangat kompleks. Negara menjadi salah satu komponen sistem sosial yang berada sejajar dengan satu instrumen sistem lain, yaitu ekonomi kapitalis. Begitu juga masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dengan pluralisme kepercayaan, gaya hidup, nilai-nilai lokal khas yang tidak bisa direduksi pada negara sebagai pembuat kebijakan sendiri. Sudah selayaknya pengelolaan sumber daya alam sebagai produksi menjadi kewajiban semua pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak bisa menghiraukan partisipasi masyarakat sebagai entitas lokal untuk berkecimpung dalam proses demokrasi. Karena demokrasi pada dasarnya adalah tentang persamaan hak dan kewajiban, bukan persamaan kepentingan akan pemilik modal atau pemegang kebijakan.[]

Catatan Akhir

[1]Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor* (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011 [Cetakan Kedua]), hal. 106
[2]Ibid., hal. 107
[3]Ibid., hal. 107
[4]"Social Space and Symbolic Power." Sociological Theory 7: 14-25, dalam *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
[5]"In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Cambidge, Eng: Polity Press, dalam *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
[6]"The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop)." Chicago: University of Chicago Press: 61-215, dalam *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
[7]Ibid., hal. 101
[8]"Forms of Capital and Social Structurein Cultural Fields: Examining Bourdieu's Social Topography." American: Journal of Sociology 100: 859-903, dalam *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Sidebar

4 Mei tahun 1945, Partai Nasionalis-Sosialis Jerman atau NAZI, secara resmi dibubarkan. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada tahun 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tak lama setelah Hitler bergabung dengan partai tersebut, pada Oktober 1920 partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Dalam waktu singkat, pada tahun 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Dalam jangka waktu tiga tahun, Hitler mampu menarik anggota sebanyak enam juta orang dengan mengemukakan isu-isu hiper-inflasi yang diderita Jerman dan nasib kelas buruh. Setelah kekalahan Jerman dalam PD II, Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

CERACAU DALAM JEJARING PUBLIK

-Devi Dwiki Wulandari-

MANUSIA dalam pendefinisian yang paling dasar adalah dapat dilihat melalui apa-yang-dilakukannya. Dimana tiap pendefinisian itu alih-alih hanya akan bermuara pada satu hal yaitu apa-yang-menyebabkannya. Manusia pun sejak awal pembentukkannya di bumi ternyata sudah mapan dalam menjalankan insting yang dimilikinya. Pada spesies paling primitif sekalipun, manusia kala itu telah paham bagaimana cara membedakan dirinya dari hewan maupun tumbuhan. Tiap hal yang manusia primitif lakukan memang selalu cukup beradab di jamannya. Sebut saja ketika mereka harus membuang air besar, mereka memutuskan untuk membuangnya di sungai, danau, atau kebun, dimana dengan kata lain mereka telah memahami tentang penambatan toilet dalam penguraian siklus alamiah yang dilakukan oleh alam. Pun ketika manusia primitif ini membuat keturunan, dengan metode seksual pada masa itu, mereka berhasil menggandakan diri mereka ke dalam bayi-bayi kecil hasil pergulatan si laki-laki dengan si perempuan. Maka, ini menegaskan bahwa di jaman peradaban terendah sekalipun, manusia sudah memiliki apa yang Sigmund Freud sebut dengan hasrat.

Hasrat manusia adalah sesuatu yang alamiah. Ia sudah ada dan melekat pada diri manusia bersamaan dengan kelahiran manusia. Bahkan Freud mengatakan bahwa bayi yang berumur 0-2[1] tahun sebenarnya sudah memiliki hasrat seksualnya. Sesuatu yang oleh Freud disebut sebagai hasrat seksual infantil. Dalam tahap ini, si bayi adalah sosok yang polos. Tentu saja, sebab ia menganggap tubuhnya dan tubuh ibunya adalah sama. Maka tak heran ketika si bayi terus-menerus memenuhi kebutuhan biologisnya untuk preservasi dirinya. Dengan menggigit payudara Ibu ketika menyusu itulah si bayi mengekspresikan suatu kenikmatan seksual akan hasrat yang dimilikinya. Bukan untuk kurang ajar kepada Ibu, tapi karena di masa ini si bayi memang baru memiliki hasrat saja. Yang juga oleh Freud disebut ID[2].

ID adalah sesuatu yang menjadi hasrat paling dasar seorang manusia. Dalam ID, manusia hanya merayakan apa yang diinginkannya. Tidak peduli dengan apa kata orang, apa kata hukum, atau apa kata pikirannya sendiri. ID menempatkan manusia selayaknya hewan yang tanpa akal pikiran. Dan ketika manusia terus berkembang begitu juga pemikirannya, di situlah sebenarnya manusia dapat dikatakan benar-benar manusia. Sebab seiring berkembangnya manusia, ego dalam dirinya pun mulai terbentuk. Belajar mengenali lingkungan dan berbagai macam konsensus yang dilegalkan oleh masyarakat, manusia mulai diperkenalkan atas apa yang benar dan apa

yang salah. Di sinilah ID dari manusia mulai mengalami penekanan oleh hal-hal yang di luar dirinya. Hal-hal di luar dirinya inilah yang kemudian Freud sebut dengan Superego.

Superego muncul sebagai tali pembatas yang menawarkan sesuatu yang tak jarang sangat berseberangan dengan ID. Sebagai contoh ketika munculnya rasa kecintaan yang besar dari seorang kakak terhadap adik kandungnya. ID hanya akan berbicara tentang hasrat seksual penuh yang dimiliki si kakak. ID tidak peduli akan fakta bahwa yang ia jadikan objek seksual adalah adik kandungnya sendiri. Namun, di luar lingkaran kakak-adik ini, masih ada masyarakat. Yang mana membuat konsensus yang telah ditetapkan dalam norma masyarakat. Dan dalam norma itu, hubungan biologis adik-kakak kandung adalah *incest*. Larangan incest –yang merupakan superego- inilah yang menekan ID si kakak.

Lalu pertanyaannya, ketika ID yang melahirkan hasrat telah ditaklukkan oleh superego, apakah lantas hasrat manusia itu akan hilang begitu saja? Disinilah ego akhirnya muncul. Bekerja dengan cara membenturkan hasrat seksual dari dalam diri dengan nilai dan norma dari luarlah, ego berhasil menciptakan ruangnya sendiri atas apa yang harus dilakukan si manusia. Ego yang mmemutuskan bahwa 'Tidak boleh. Kami adalah adik-kakak'. Di titik ini, ego memang harus mengorbankan hasrat seksual dirinya dan mampu menyerap sari-sari medan sosial yang ada di luar dirinya. Inilah yang kemudian berlaku di dunia sosial. Ketika memasuki ranah sosial, hasrat seksual yang telah direpresi[3] oleh ego pun berpaling pada ego-ideal dan membentuk sebuah arahan akan keberadaan hasrat baru yaitu identitas. Ya, 'ketiga diva' inilah yang menjadi tulang punggung pembentukan identitas manusia. Dimana identitas tersebut merupakan substitusi dari objek instingtual yang disembunyikan rapat-rapat oleh ego. Dan yang kini tidak disadari adalah identitas telah menjadi sebuah hasrat yang jauh lebih intim dari hasrat seksual yang menempatkan manusia dalam penciptaan simbolisasi pemungutanatribut untuk sebuah pengakuan.

Pemungutan-pemungutan objek identifikasi tersebut sebagian besar, atau bahkan seluruhnya, adalah menjadi bagian dari konstruksi ego. Egolah yang memilih sifat-sifat yang harus dilekatkan pada identitas si manusia. Sama halnya ketika kini Syahrini[4] terkenal dengan sikap santun dan gaya bicara 'manis-manis manja'nya. Ego dalam diri Syahrini lah yang mengkonstruksi itu. Sebab identifikasi karakter yang dimiliki Syahrini itu bukanlah identitas yang melekat pada dirinya sejak ia lahir. Di sini terlihat bahwa Syahrini sebagai subjek telah masuk ke dalam kerangka kerja mencari identitas. Identitas itu diserap oleh Ego yang rapuh tanpa atau dengan proses filterisasi. Identitas eksternal inilah yang dipahami sebagai penumpukan hasrat orang lain (*the other*). Dalam kasus ini, Deleuze-Guattari mengasumsikan bahwa pada saat menyerap identitas eksternal itulah, Ego yang rapuh mengontaminasikan dirinya dengan dunia citraan yang abstrak, melalui mekanisme kesadaran imajinatif. Ego yang 'sadar diri' atau beridentitas, setelah berada sebagai diri yang rapuh, adalah Ego yang ilusif (imajinatif) dan adoptif.[5]

ID, superego, ego, identitas, lalu pencitraan. Dimanakah semua runtutan itu akan berakhir? Tentu saja eksistensi. Identitas keakuan yang kelak akan menghasilkan pencitraan seseorang sebenarnya adalah korban baru dalam proses pencarian definisi diri. Sebab hasrat untuk memiliki identitas telah mendorong Ego untuk meyakini dirinya sebagai objek. Keyakinan ini mengantarkan Ego melihat dirinya sebagai objek dari hasrat orang lain yang telah menjadi hasrat bersama. Dan lewat identifikasi dengan hasrat orang lain, ia

sebenarnya menghasrati hasrat yang dihasrati orang lain. Disinilah terjadi kebohongan identitas.

Taruhlah, seorang remaja. Remaja yang konon merupakan makhluk paling susah diatur karena pubertas yang dialami, sudah pasti juga akan melewati masa ini. Masa dimana ia baru mengenal pergaulan. Merasakan hasrat akan cinta maupun seksualitas kepada lawan jenis. Hasrat yang membuatnya senantiasa ingin selalu diperhatikan bahkan menjadi pusat perhatian. Maka untuk mencapai identitas dirinya itu, ia akan menjadi seseorang yang diinginkan orang yang ia sukai. Ketika lawan jenisnya yang sebut saja laki-laki itu ternyata sangat menyukai perempuan kulit putih dan sholeha, si perempuan pasti akan berusaha sekuat tenaga agar dirinya tampak bersinar. Ia juga akan mengenakan jilbab seorang muslim agar tampak sholeha. Kemudian jika si lelaki menyukai perempuan lembut, ia juga pasti akan berusaha berbicara ala Putri Solo. Ini adalah salah satu pelabelan identitas diri sendiri atas atribut orang lain.

Tapi apakah fenomena ini hanya terjadi di kalangan remaja? Atau hanya terjadi dalam kasus percintaan laki-laki dan perempuan? Jelas tidak. Warga metropolitan yang tinggal di perumahan nyatanya juga mengalami hal serupa. Bukan perumahan kelas atas yang identik anti-sosial itu, tapi perumahan kelas menengah. Saat masih di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ibu kerap kali melarang saya untuk bermain dengan salah seorang teman yang juga tinggal satu perumahan dengan kami. Sebut saja Tono. Kala itu, ia adalah anak SMP yang sudah akrab dengan dunia minuman keras. Saya menganggapnya sebagai seorang anak laki-laki yang baik. Sebab, ya, dia memang seorang anak yang setia kawan. Tapi tentu tidak dengan anggapan orang tua saya, terutama Ibu. Kedekatan Tono dengan minuman keras sudah menjadi harga mati citra kebusukannya di mata Ibu. Tiap kali kami ada tugas kelompok, Ibu selalu heboh melarang saya untuk berangkat bersamanya. Yang ia takutkan adalah apa-kata-tetangga. Memang bukan perihal ketakutan nantinya saya yang akan ikut menyukai minuman keras, tetapi ketakutan akan opini tetangga kami. Ibu takut saya juga akan dicap jelek oleh tetangga seperti halnya yang dialami Tono. Ketakutan pelabelan identitas negatif terhadap saya ini pula yang telah mengaburkan mata ibu akan fakta yang ia tahu perihal penyebab Tono menjadi akrab dengan minuman keras, yang tak lain adalah karena perceraian orang tuanya. Benar, citra saya dan keluarga adalah hal yang sangat penting bagi Ibu.

Baik kisah Tono maupun remaja di atas adalah contoh nyata yang manusia sosial alami sehari-hari. Dimana identitas terkadang menjadi sesuatu yang maha krusial bagi manusia karena ia yang menentukan citra diri manusia tersebut. Dan pencitraan positif dari seseorang adalah penentu utama *eksis* dan tidak *eksis*nya orang tersebut di wilayah sosial. Tidak hanya di kehidupan nyata hal ini berlaku, tapi juga di dunia maya. Dunia yang kini sangat dicintai manusia melebihi dunianya sendiri.

###

Siapa yang kini tak kenal *Interconnected Network*? Atau sebut saja internet. Dulu ketika ia belum ada, iklan di televisi hanyalah berupa iklan biasa yang promosi produknya masih berdasarkan persaingan harga. Sekarang sedikit lebih berbeda. Iklan di televisi, yang paling mencolok yaitu iklan provider pulsa, masih tetap menggunakan persaingan harga sebagai kunci iklan mereka. Namun yang menarik, ada satu tambahan baru, yaitu 'gratis-gratisan internet'. Promosi internet gratis selama 30 hari *unlimited* oleh kartu As, hingga 'dapatkan 6 jejaring sosial sekali klik' oleh XL memang punya daya tarik tersendiri bagi pengguna telepon seluler. Atau katakanlah, siapa yang tak kenal Mawar dan Marwan[6] saat ini? Kisah cinta mereka disukseskan oleh keberadaan jejaring sosial. Bahkan Ayu Ting-ting[7] saja sampai ikut membantu. Iklan ini secara implisitberhasil menggambarkan kehebatan internet yang berperan besar menyatukan dua insan anak Adam yang dimabuk asmara. Belum lagi iklan IM3. Dengan *tagline* 'IM3 anti galau', ia menyodorkan fasilitas menarik untuk akses internet *unlimited* kepada penggunanya. Ya, internet sebagai anti galau, tak kalah dengan psikolog. Ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya memang hanya iklan, trik *marketing* yang digunakan penjual agar dagangannya laku. Tapi, apa yang digambarkan di iklan-iklan tersebut sesungguhnya juga merupakan realitas.

Kembali ke internet. Awalnya, kemunculan internet hanyalah sebagai sebuah penghubung komputer dalam sebuah jaringan dan dipakai dalam bidang pertahanan militer saja.[8] Namun seiring dengan makin canggihnya teknologi,

internet pun berhasil mengalihkan fungsinya dengan bermacam-macam wujud. Sebagai media alternatif selain media cetak dan elektronik, ia juga berfungsi sebagai pengganti Pak Pos dalam mengantar surat. Tidak lagi menunggu lama, surat yang tadinya diantar menggunakan merpati, pesawat, kapal, bus, atau kendaraan bermotor lainnya, kini dalam waktu bersamaan dengan dikirimnya sudah dapat dibaca oleh si penerima. Itu namanya *electronic mail* (*e-mail*). Canggih? Belum seberapa. Ada lagi yang namanya *video call*. Kalau dulu pesan yang dapat dikirim antar wilayah hanya berupa tulisan, atau berupa suara (telepon), saat ini wajah pun bisa dikirim. Maksudnya, si pemanggil dan yang dipanggil bisa berbincang layaknya dialog tatap muka hanya dengan internet. Tapi tentu saja bukan benar-benar bertemu, melainkan melalui monitor dimana mereka dapat saling melihat wajah lawan bicaranya, lengkap dengan suara dan gerakan yang dilakukan. Dan yang paling menarik lagi – tapi bukan yang tercanggih – adalah jejaring sosial. Sebuah aplikasi, yang masih menggunakan jaringan internet, berbentuk forum komunikasi yang mau menerima siapapun – entah jelek, kaya, miskin, cacat– menjadi anggotanya. Tidak ada syarat apapun untuk bergabung ke dalamnya. Jejaring sosial ini juga tersedia dalam berbagai jenis. Ada Friendster yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi *Game Social Network* akibat kalah saing dengan Facebook. Ada Facebook, Flixter, Skype, My Space, Hi-5, hingga Twitter. Maka, diantara sekian banyak jejaring sosial yang bertebaran di internet tersebut, yang akan saya kupas disini adalah Facebook yang hingga saat ini masih memegang rekor pengguna terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 600 juta Facebookers (sebutan bagi pengguna Facebook).

"*What's on your mind?"*menjadi kalimat yang mungkin paling sering dikunjungi duluan jika seseorang sedang *online*, sebutan bagi mereka yang sedang menjelajah internet. Facebook tak ayal sebuah situs ajaib lainnya yang kini memiliki berbagai manfaat di tengah masyarakat; mulai dari berkomunikasi bersama, menemukan teman lama yang tak ada kabarnya, hingga sebagai ajang promosi bisnis. Di awal kemunculannya, Mark Zuckerberg sebenarnya menciptakan Facebook hanya untuk forum komunikasi ia dan teman-temannya di Universitas Harvard. Namun kemenarikan dan keluwesan Facebook dalam berkomunikasi berhasil membuat banyak orang ingin ikut bergabung di dalamnya, yang kemudian hal ini dilihat sebagai sumber uang oleh Si Pencipta.

Update status, unggah foto, unggah video, *update* lokasi, menjadi serangkaian aktivitas 'wajib' yang haram bila tidak dilakukan oleh para Facebookers. Ia telah mengajari para penggunanya untuk menjadi sosok yang tidak boleh ketinggalan-informasi atau tidak-boleh-lupa-menginformasikan. Mau makan, *update* status. Patah hati, *update* status. Bahkan hingga hal yang dulunya oleh mayoritas masyarakat masih dianggap privasi seperti pertengkaran ranjang dengan suami pun terkadang dapat menjadi bahan *update*Facebookers. Lalu apa

tujuan dari *update* status ini? Tentu saja agar berbagai orang yang 'berteman dan terhubung di Facebook' dengan si peng-*update* status mengetahui apa-yang sedang-dirasakan si penutur.

Sedangkan untuk fasilitas mengunggah foto atau video, yang juga bisa dilihat oleh para pengguna Facebook lain, umumnya dimanfaatkan oleh mereka yang ingin bergaya di dunia maya. Terlihat jelas bahwa foto maupun video yang diunggah adalah virtualisasi dari hal-hal yang dianggap keren oleh si pengunggah. Contoh ketika si pengunggah sedang makan di tempat yang masih asing di telinga teman-temannya, seperti Restoran Korea, ia pasti akan memotret dirinya dan masakan Korea tersebut (bahkan terkadang sebelum mencicipinya) untuk diunggah di Facebook. Entah rasa masakan itu enak atau tidak, yang penting adalah gaya. Dan ketika foto tersebut mendapat reaksi berupa *Like* atau *Comment* dari Facebookers lain, maka lengkap sudahlah kepuasan yang didapat olehnya untuk tampil keren di Facebook. Ya, kepuasan inilah yang sebenarnya dikejar oleh para Facebookers yang hobi *update* ini.

Banyak orang di luar sana, termasuk saya, yang menggunakan Facebook hanya untuk main-main. Toh, apa salahnya kita main-main? 'Main-main' pada dasarnya sama saja dengan 'bermain', meskipun kepada kedua kata itu orang yang sangat serius barangkali akan bersikukuh untuk menisbatkan definisi yang berbeda. Namun, orang yang sangat serius akan menghantam bukan saja perilaku 'main-main', tetapi juga aktivitas 'bermain'. Kalau pelukis saja diperbolehkan bermain-main dengan objek visual, kenapa kita tidak diperbolehkan bermain dengan objek verbal? Apalagi sebenarnya 'bermain' itu salah satu bentuk paling konkret seorang manusia menyalurkan hasrat dan bakatnya. Ya kan?

Maka, 'bermain' yang ada di Facebook ini sebenarnya juga sama. Seringkali saya diprotes oleh teman ketika meng-*update* status akun saya dengan bahasa 'menye-menye' yang tak jarang terkesan pamer. Dan saya pun selalu menimpalinya dengan jawaban, “Hei, dilarang komen. Facebook adalah tempatku bersenang-senang.” Mengapa begitu? Sebab Facebook bagi saya adalah tempat untuk mengomel. Mengomel ketika segala hal berjalan di luar rencana saya. Facebook juga merupakan tempat saya mencari perhatian ketika kesepian. Pada tengah malam misalnya, ketika tidak bisa tidur, saya akan dengan sengaja *update* status untuk mencari tahu siapa saja teman yang masih bisa diajak mengobrol di Facebook. Ketika ada yang mengomentari status saya, rasa kesepian tengah malam pun segera terusir dengan saling *komen* status Facebook. Dan satu hal yang kini sangat saya sadari adalah keberadaan Facebook membuat saya makin haus eksistensi, dimana saya menganggap orang perlu mengetahui keberadaan saya, dan apa saja yang saya lakukan melalui status Facebook.

Tapi, disadari atau tidak, omelan-omelan yang biasanya Facebookers seperti saya tumpahkan di status ini rupanya bisa juga menghasilkan hal yang lebih besar. Dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun, status memungkinkan terjadinya diskusi dari hasil tanggapan atau respon dari status yang dibuat. Penempatan pernyataan dalam status Facebook telah mengkonstruksi ruang komunikasi (virtual) diantara penggunanya. Komunikasi virtual ini dapat dinyatakan sama dengan komunikasi konvensional – *face to face* – ataupun melalui media komunikasi seperti telepon seluler. Saling komentar, setuju, atau menyanggah itulah kemudian sebuah diskursus dapat terjadi di Facebook. Hingga ketika isu yang diangkat terkategorikan sebagai isu emansipatoris, komentar-komentar yang tadinya dibuat hanya berdasarkan eksistensi – ikut komen biar rame – dengan semakin memanasnya diskusi yang ada, emosi yang terjadi juga dapat mendorong si pengomen untuk ikut bersimpati. Ikut memikirkan isu yang sedang dibahas tersebut. Eksistensi yang berangsur-angsur menjadi simpati inilah yang sebenarnya juga dapat mengukuhkan Facebook menjadi salah satu ruang komunikasi ideal. Hasrat manusia, dengan berbagai isu sosial maupun politik, bisa diarahkan dengan mudah menjadi sebuah kepedulian.

###

Melihat fenomena Facebook, hingga saat ini telah memicu berbagai macam perdebatan mengenai apakah ia memang layak disebut Ruang Publik. Namun, yang terkadang dilupakan oleh mereka yang berdebat adalah, Ruang Publik yang ditawarkan oleh Habermas itu sebenarnya memiliki berbagai macam kriterianya sendiri. Tidak lagi berbicara perihal Ruang Publik dalam tataran 'material', Habermas juga mengusung ruang publik dalam tataran 'ide'.

Dalam status Facebook misalnya, adu argumentasi yang terbentuk memberikan porsi tersendiri bagi kemungkinan keberadaan ruang-ruang diskusi virtual itu. Penyampaian tanggapannya yang dilontarkan dalam atmosfer bebas, mamaktubkan pengertian bebas dalam gagasan akan kesetaraan/kesederajatan dari para pihak yang berkomunikasi. Kesetaraan pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus inilah yang dalam *institutional criteria*, Habermas tempatkan sebagai syarat pertama pembentukan ruang publik.

Kesetaraan dalam Facebook adalah salah satu bagian paling penting dalam membangun masyarakat egaliter. Tidak adanya tekanan ataupun intervensi terhadap seseorang yang akan menyampaikan opininya memang merupakan instrumen dalam terjalinnya komunikasi yang aktif dan apa adanya. Situasi demikian dapat mendorong keterlibatan publik ke dalam perdebatan yang dilakukan dengan sangat terbuka. Pembentukan opini menjadi beragam, dan akan semakin memperkaya khasana pemikiran dari opini atau pernyataan yang dilontarkan. Ini senada dengan yang Habermas kemukakan tentang perumusan unsur normatif dari ruang publik, yakni sebagai bagian dari kehidupan sosial dimana setiap warga negara dapat saling berargumentasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama sehingga opini publik dapat terbentuk.

Syarat ke dua yang diberikan Habermas yaitu terkait tema diskusi, dimana ia harus berkaitan dengan kepedulian bersama (*domain of common concern*). Di Facebook, biasanya status yang sedang disoroti terlihat begitu atraktif sehingga menarik perhatian para Facebookers untuk, mau tak mau, menjadi peduli bahkan terlibat dalam diskusi yang ada. Sifat atraktif yang awalnya bersifat personal itu, ketika telah dilontarkan ke publik, akan mereduksi dengan sendirinya watak personal masing-masing pengomentar. Hasrat-hasrat individu yang ada pun akhirnya terkekang oleh diskusi yang melibatkan banyak rasio dari berbagai kepala. Hingga, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan kepentingan pribadi yang dimilikinya, si pengomentar pun akhirnya terbawa oleh kepentingan bersama yang diusung itu. Hal ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan psikoanalisis Freud yang menempatkan Superego, dalam hal ini isu dan kepentingan bersama, sebagai penentu utama yang memutuskan Ego mereduksi hasrat instingtifnya yang terlalu condong pada kepentingan pribadi.

Pereduksian hasrat akan kepentingan personal semata ini mendorong adanya eksklusifitas ke arah inklusifitas. Ketika hal-hal yang bersifat personal saja mampu menjadi sorotan publik, maka isu-isu publik tentunya lebih menjadi perhatian publik. Syarat ketiga, inklusifitas, Habermas ini ternyata juga dapat disanggupi oleh Facebook. Sorotan terhadap isu-isu publik yang akhirnya menciptakan perhatian publik ini sudah bisa menjadi modal penting akan terbentuknya diskusi dengan partisipan yang lebih luas. Semua pengguna bisa terlibat juga membuka diri untuk memberi tanggapan dan terlibat dalam diskusi. Tapi apakah dari diskusi tersebut kemudian membuktikan telah terbentuknya konsensus rasional yang mengarah pada tindakan politik? Entahlah. Tapi lihat saja kasus Prita Mulyasari.

Secara hukum – dalam versi kenegaraan – Prita bersalah. Ia telah mencemarkan nama baik sebuah instansi, entah yang ia katakan itu benar terjadi atau tidak. Tetap saja, omelan di dunia maya yang melibatkan secara langsung sebuah nama, dapat dijadikan alasan jitu pencemaran nama baik. Namun secara hukum versi masyarakat, Prita tidak bersalah. “Koin untuk Prita” telah berhasil menyentuh hati banyak orang. Disinilah publik bersuara. Semangat keadilan yang terasa meletup-letup dan tampak maha agung itu nyatanya telah berhasil mengantarkan Prita ke pintu keluar gerbang prosedural proses peradilan para perumus dan penegak hukum yang kemudian meledak dan melahirkan tatanan hukum baru ala masyarakat. Hingga kini, layaknya jamur di musim hujan, gerakan-gerakan serupa dukung-sana dukung-sini juga menjadi sesuatu yang lumrah di berbagai forum jejaring sosial. Pembentukan gerakan-gerakan ini cukup mensinyalir bahwa ia bisa menawarkan sebuah gagasan baru agar tidak hanya berkutat pada ide tindakan politik, namun dapat memberikan dampak yang serupa dengan tindakan politik.

###

Dari semua paparan saya yang bertele-tele tentang hasrat hingga ruang publik di atas, satu hal yang rasanya perlu saya ungkapkan secara lugas adalah mengenai kepercayaan saya terhadap ruang publik di jejaring sosial. Meskipun diawali hanya sebagai ruang bermain-main dalam komunikasi, jejaring sosial hingga kini sudah menunjukkan taringnya tersendiri. ia

menyenangkan sebagai mainan, tapi memiliki dampak yang di luar dugaan sebagai mainan. Dan meskipun hingga kini di ruang-ruang publik di luar sana, perdebatan akan keberadaan jejaring sosial sebagai ruang publik masih berlangsung cukup panas, satu hal yang jelas dan saya rasa pasti adalah: internet dan jejaring sosial telah menjadi pilar-demokrasi baru dalam realitas politik dunia saat ini. Ia memiliki kekuatan dahsyat yang tidak boleh disepelekan. Keberadaannya telah terbukti mampu mereposisikan unsur-unsur kekuatan politik dalam sebuah negara demokratis. Ialah wadah bagi berjuta-juta orang, yang bahkan sebenarnya tidak saling mengenal, untuk merasa saling mengenal dan berdiskusi hingga membentuk konsensus. Sebuah proses yang politis, emansipatoris, bahkan mungkin provokatif, yang sulit ditemui jika ia tak ada. Tapi, biarbagaimanapun, ini hanyalah kepercayaan saya semata. Yang susah payah saya bangun dengan konsep rasionalitas saya yang belum tentu rasional bagi subjek lain. Maka, agar tidak terjadi kebuntuan, mari berdiskusi![]

Catatan Akhir:

[1]Pembagian berdasarkan umur ini tidak menjadi ukuran utama karena setiap pribadi memiliki perkembangan diri yang berbeda-beda. Lihat pembagian berdasarkan umur ini dalam Rita L. Atkinson dkk., Pengantar Psikologi, terjemahan Nurjannah taufiq, 1994, halaman 37, 52. (Disadur dari Skizoanalisis Deleuze Guattari oleh Agustinus Hartono, 2007, halaman 13)

[2]Ibid., hlmn 13-14

[3]**Represi** dipahami sebagai proses dimana hasrat seksual ditekan ke wilayah ketidaksadaran sehingga tidak muncul atau dilupakan sama sekali oleh Ego. Bagi Freud, represi merupakan struktur dasar psikoanalisis. Represi terjadi karena adanya konflik, terutama konflik karena tuntutan moral masyarakat dengan impuls instingtif hasrat seksual. Meskipun kadang-kkadang dikatakan bahwa terjadi represi terhadap nafsu atau insting seksual, yang terjadi sebenarnya adalah represi terhadap perwujudan hasrat seksual. Hasrat seksual direpresi karena dia bukan objek dari consciousness (Ibid., hlmn 37)

[4]Syahrini adalah artis Indonesia yang sedang berada di puncak karier keartisannya. Memiliki gaya bicara khas yaitu 'manis-manis manja'. Gaya bicaranya ini belakangan menjadi *trendsetter* di masyarakat

[5]Ibid., hlmn 18.

[6]Mawar dan Marwan adalah tokoh dalam iklan provider XL. Dalam iklan ini dikisahkan keduanya menyukseskan hubungan dengan dibantu banyak orang melalui jejaring sosial.

[7]Ayu Ting-ting merupakan seorang penyanyi dangdut yang melejit lewat tembang Alamat Palsu. Ketenarannya saat ini membuatnya didapuk menjadi cameo di iklan provider XL. Perannya adalah sebagai salah satu orang yang mendukung terjalinnya kembali kisah cinta Mawar dan Marwan

[8]Bersumber dari http://winarto.in/2012/02/memaknai-eksis-di-internet/

Sidebar

17 Mei tahun 1865, dengan ditandatanganinya perjanjian oleh wakil dari 20 negara yang berkumpul di Paris, berdirilah International Telegraph Union. Hari pendirian organisasi telegraf internasional ini hingga kini diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional. Pada tahun 1906, berdiri pula organisasi internasional lain di bidang telekomunikasi dengan nama International Radiotelegraph Union. Akhirnya pada tahun 1934, kedua organisasi itu dilebur menjadi satu dengan nama International Telecommunication Union yang kini menjadi salah satu badan resmi PBB.

[r]UANG PUBLIK
seperti halnya uang,
ruang adalah hal yang selalu diperebutkan.
dan satu-satunya yang berhak atas ruang
adalah publik itu sendiri.
MARI MEREBUT RUANG!!!
Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh UKPKM Tegalboto

SHUTTER

Foto adalah wujud visualisasi seni. Foto tak membutuhkan ruang untuk manusia berkreasi. Melalui foto, tiap insan dapat membaca dan menyentuh dunia. Jepretan demi jepretan pun menjadi tak terelakkan ketika objek masih terhampar hidup di depan mata si fotografer. Ia dapat merekam tangis dan tawa dalam sekali jepret. Menceritakan manusia dengan manusia dalam satu kerjapan mata lensa. Ia membawa kematian pada kehidupan. Dan menaifkan segala benda yang terpolitisasi.

TEMPAT BERMAIN

Diafragma : f/5.6
ISO : 100
Kamera : Nikon D200
Lensa : 18-55mm
Lokasi : Mangli, Jember
Keterangan : Dua bocah sedang bermain paku diatas rel kereta. Perbaikan pada hanya sedikit pada pengaturan contrast dan cropping.

Fotografer: Dara Sumareni

Fotografer: Dara Sumareni

SANTAI

Speed : 1/250s
Diafragma : f/5.6
ISO : 250
Kamera : Nikon D200
Lensa : 18-55mm
Lokasi : Alun-alun Ambulu, Jember
Keterangan : Perbaikan pada foto ini hanya sedikit pada pengaturan level.

Fotografer: Dara Sumareni

SAMPAH LAGI

Speed : 1/500s
Diafragma : f/3.5
ISO : 100
Kamera : Nikon D200
Lensa : 18-55mm
Lokasi : Pantai Papuma, Jember
Keterangan :Foto diambil pada siang hari pukul 12.11. Proses editing sebatas pengaturan contras.

ACUH!

Speed : 1/400s
Diafragma : f/4
ISO : 400
Kamera : Nikon D200
Lensa : 18-55mm
Lokasi : Surabaya
Keterangan : Perbaikan pada foto ini hanya sedikit pada brightness dan cropping disebelah kanan foto.

Fotografer: Dara Sumareni

VIRGINITY

Fotografer: Dara Sumareni

Speed : 1/250s
ISO : 200
Kamera : Nikon D200
Lensa : Fix Manual
Lokasi : Jember
Keterangan : Tidak ada olah digital dalam foto ini. Tampak dari belakang, Mita The Virgin sedang menyapa para Virginity (fans The Virgin).

Fotografer: Dara Sumareni

MINIMALIS

Judul : Minimalis
Speed : 1/800s
Diafragma : f/5.6
ISO : 250
Kamera : Nikon D200
Lensa : 18-55mm
Lokasi : Ambulu, Jember
Keterangan : Dengan hanya mengenakan *underwear*, Ia menjalankan profesinya sebagai penambang pasir sungai. Tidak ada olah digital pada foto ini.

Baju Ijo Dilararang Protes

-Petrik Matanasi*-

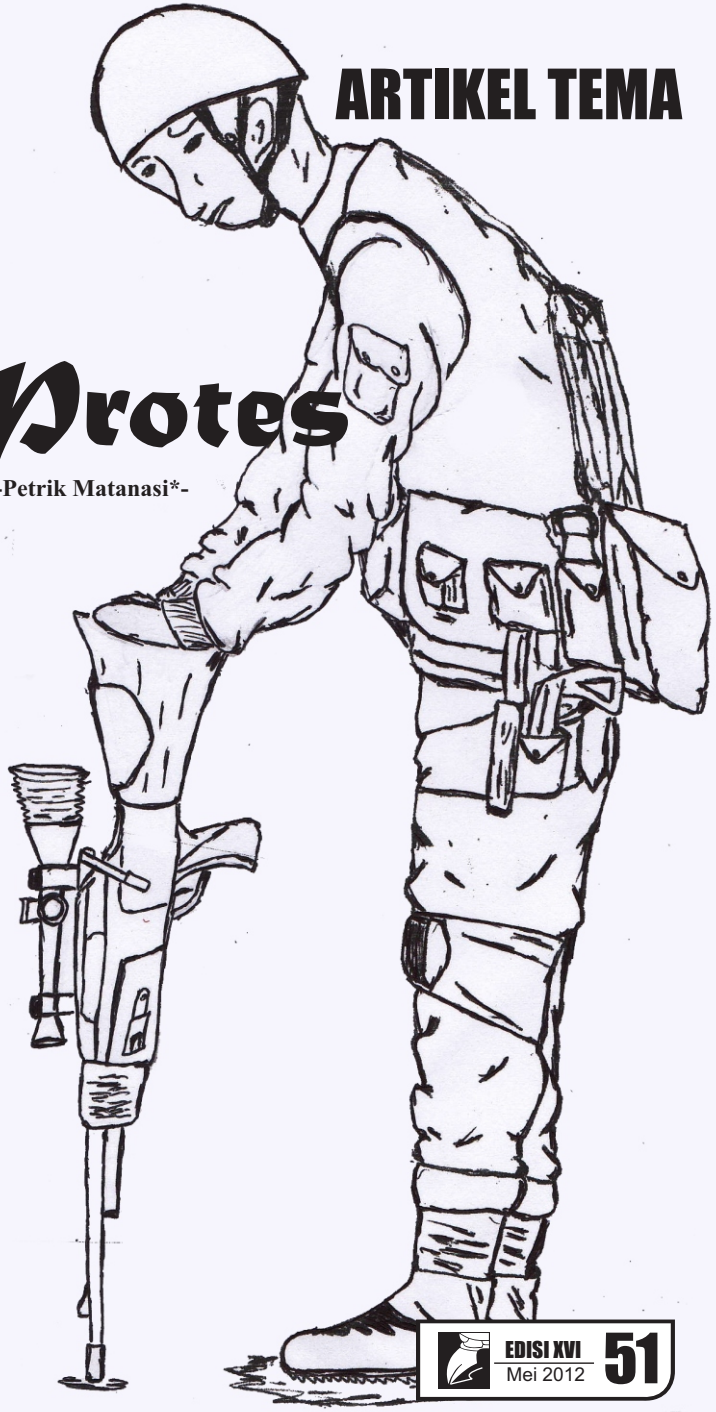

ORANG Indonesia, baru tahu profesi serdadu yang digaji ketika orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Sebelumnya, hanya ada pengawal atau punggawa raja yang siap berkelahi kapan saja. Jadi pengawal atau punggawa bukan demi uang bulanan yang kita sebut gaji, melainkan karena pengabdian. Mereka bukan profesional, namun hanya mengabdi.

Orang Indonesia, jadi serdadu profesional yang digaji tiap bulan mulai ramai sejak 1830. Ketika sekumpulan pembasmi pemberontak yang kitorang kenal sebagai KNIL.[1] Mulailah mereka jadi *Spandrig.*[2] Pelan-pelan mulai banyak yang jadi *Vandrig.*[3] Paling tinggi orang Indonesia cuma bisa jadi *Overste.*[4]

Di jaman Jepang jadi penguasa pendudukan di Indonesia kesempatan jadi serdadu makin besar. Lebih banyak orang Indonesia terserap jadi tentara. Setelahnya, di jaman revolusi, jadi serdadu jadi kebanggaan tersendiri. Meski gaji jadi tentara Republik kalah besar daripada gaji jadi serdadu KNIL.

Revolusi Indonesia yang kacau membuat banyak pemuda yang jadi perwira dalam revolusi Indonesia menjadi perwira kritis setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia. Revolusi melahirkan banyak perwira yang punya nyali besar dalam melawan siapa saja, termasuk pemimpin mereka. Ketidaktakutan pada pemimpin lebih dikarenakan karena adanya perasaan sama-sama berperang dan berjuang di jaman revolusi.

Stok pahlawan perang dari masa revolusi yang terlalu banyak rupanya membuat ketentaraan labil. Begitulah yang terjadi pada dekade 1950an. Dimana banyak perwira menengah berani mengkritik, bahkan menggulingkan posisi bawahannya. Sebuah hal

mustahil untuk terjadi di masa Suharto atau setelahnya.

Di masa lalu, rivalitas antar perwira menjadi hal biasa. Nampaknya, perwira militer di masa lalu lebih bisa melakukan banyak hal. Mereka tampak memiliki ruang. Jika mereka tak suka pada parlemen pun, mereka bisa saja mengadu pada Presiden. Sementara itu, pada siapa saja Sukarno sebanarnya bisa menjadi orang terbuka, termasuk mau mendengar para perwira.

Serdadu Kritis

Tak pernah terdengar, atau setidaknya sulit ditemui, adanya militer yang bersikap kritis pada atasan bahkan pada penguasa negerinya. Sikap kritis sendiri, bisa jadi bisa disamakan dengan pembangkangan.

Tak ada kamus jadi orang kritis di militer. Kata komandan atau panglima adalah sabda yang wajib ditunaikan. Komandan bilang *hancurkan,* maka serdadu akan hancurkan apa yang dimaksud si komandan. Hanya ada kata, “siap, Pak” saja yang boleh terucap dari serdadu.

Angkatan Darat (AD) pernah menekan Sukarno untuk membubarkan Parlemen dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika masa-masa perpecahan di Angkatan Darat. Parlemen yang terlalu ikut campur dalam urusan militer AD. Perwira AD di Jakarta pun berang dan beraksi, mereka melakukan demonstrasi menuntut parlemen dibubarkan.[5] Penggulingan secara demokratis dari perwira bawahan selalu gagal mengubah formasi AD.

Angkatan Laut pun juga bergolak. Dua kali, Sukarno memenuhi aspirasi.

Jelang tahun 1965, muncul sekelompok perwira yang ingin menggulingkan perwira tinggi mereka. Di Angkatan Laut (AL) sekelompok perwira pernah menyuarakan keluhannya soal kepemimpinan. Ali Sadikin dan Yos Sudarso juga pernah menggulingkan pemimpin AL. Mereka didengar Presiden Sukarno. Dan perubahan di tubuh AL pun terjadi. Mereka sukses, setelahnya karir mereka melesat cepat. Pergolakan di tubuh AL begitu panjang. Beberapa kali terjadi.[6]

Sekelompok perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pernah berkumpul dan menggulingkan Marsekal Suryadi Suryadarma dari kursi Kepala Staf Angkatan Udara. Masalah di tubuh AURI ini membuat Presiden Soekarno turun tangan untuk menyelesaikannya. Soekarno pernah menolak permohonan pengunduran Suryadi Suryadarma yang kurang disukai bawahannya.[7] Marsekal Suryadi Suryadarma benar-benar keluar setelah kematian Yos Sudarso dalam pertempuran laut Aru. Pengunduran diri Suryadarma bukan pelarian dari kenyataan, namun laku ksatria yang tak lazim bagi orang Indonesia.

Angkatan Darat lalu jadi angkatan yang keburu mapan pasca 1959. Berbeda dengan Angkatan Laut. Sulit bagi kelompok Untung untuk menggeser jenderal pemimpin Angkatan Darat yang mereka anggap kurang peduli pada bawahan mereka. Gerakan pembangkangan militer besar dalam sejarah Indonesia adalah G 30 S. Dimana Untung memimpin penggulingan beberapa petinggi Angkatan Darat, yang memang terkesan tidak loyal pada Sukarno.

Para perwira militer di masa orde lama umumnya pernah sekolah di sekolah Belanda macam HIS,[8] ELS,[9] MULO,[10] AMS[11] atau HBS.[12] Dimana mereka mendapatkan pendidikan terbaik yang begitu langka untuk didapatkan sebagian besar orang Indonesia lainnya. Mereka, biasanya adalah orang-orang yang banyak membaca. Paham demokrasi agak merasuki mereka.

Masa Hindia Belanda adalah masa dimana nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi diserap di sekolah Belanda, di tengah kolonialisme ratusan tahun oleh Hindia Belanda. Tak heran jika mereka menjadi orang kritis juga di masa depan. Diantara mereka kemudian menjadi perwira penting yang memimpin bagian tertentu di militer. Namun, sejarah lebih sering menganggap mereka sebagai perwira tak taat aturan ketimbang perwira kritis.

Masa Hindia Belanda yang memberikan banyak pelajaran nilai-nilai demokrasi, adalah alasan *pertama* mengapa di masa awal orde perwira Indonesia begitu kritis dibanding. Alasan *kedua* dan terbesar tak lain adalah revolusi Indonesia yang kacau, dimana banyak perwira muda berperan serta dengan memanggul senjata melawan

tentara Belanda. Karenanya, angkatan 45 nyaris sulit senioritas menjadi sesuatu yang berpengaruh di kalangan perwira untuk membentuk ketaatan ala militer pada atasan. Semua Angkatan 45, asal pernah lawan Belanda maka semua sama.

Alasan *ketiga* adalah perbedaan usia yang tidak terlalu jauh membuat perwira yang usianya lebih muda berani mengkritik bahkan menentang orang yang usianya diatasnya. Kasus rivalitas Angkatan Darat yang kesohor adalah antara Kolonel Zulkifli Lubis dengan Kolonel Abdul Haris Nasution. Dua orang Batak Islam yang sangat pintar. Mereka berdua sebenarnya masih ada hubungan saudara, sepupu jauh.

Lubis, lima tahun lebih muda dari Nasution. Seperti Nasution, Lubis juga pernah sekolah menengah Belanda. Bedanya, Nasution pernah jadi perwira KNIL sementara Lubis jadi PETA. Pengalaman militer Nasution sebagai komandan dan panglima teruji. Sementara Lubis adalah komandan Intelejen Indonesia pertama yang memiliki banyak jaringan. Mereka sama-sama kuat sebenarnya. Hanya saja, Nasution yang menjadi KSAS kedua dalam militer Indonesia punya posisi lebih tinggi dari Lubis. Tetap saja itu bukan halangan bagi Lubis untuk melawan Nasution.

Rivalitas antar perwira bisa melahirkan perpecahan, bahkan perang saudara. Perpecahan di AD juga melahirkan banyak pemberontakan. Yang terkenal adalah PRRI/Permesta di Sumatra.[13] Perpecahan antar perwira kritis di awal orde lama, biasanya nyaris tanpa dialog awal untuk menyelesaikan perpecahan itu. Beda pendapat dan kepentingan, akan melahirkan intrik dan perang. Tanpa ada dialog yang mengkritisi kebijakan maupun kepemimpinan militer. Militer memang tak kenal dialektika.

Sedari dulu, dalam militer Indonesia tak pernah ada ruang bagi perwira untuk menyuarakan aspirasi mereka. Meski tak ada mereka terus kritis akan kondisi kepemimpinan di Angkatan-angkatan mereka. Presiden Sukarno, kadang bersikap terbuka atas hal itu, meski Sukarno belum tentu akan menuruti tuntutan para perwira tadi.

Apa yang dilakukan Sukarno sebenarnya bukan untuk membangun ruang publik yang konstan bagi para perwira-perwira militer yang kritis. Hanya sebuah kebetulan saja Sukarno mendengarnya. Meski para perwira tadi tidak bisa menuntut banyak.

Ruang Publik Bisa Bikin Tentara Bubar

Ketika Nasution menjadi Menteri Pertahanan dan Ahmad Yani menjadi Panglima Angkatan Darat, Angkatan Darat mulai agak stabil. Banyak perwira generasi jadi Jenderal atau kolonel. Banyak perwira kritis macam Zulkifli Lubis, Muludin Simbolon, Alex Kawilarang tak aktif lagi di militer. Bila pun ada yang aktif, biasanya mereka akan ditempatkan atau *dibuang* ke posisi yang kurang strategis.

Dalam kestabilan itu, tentu Yani bisa memimpin AD tanpa ada penentang dari bawah. Penentang Yani, seperti Untung memang tak pernah secara langsung mengkritiknya, melainkan menculiknya pada malam jahanam G 30 S, pada 30 September 1965. Ini karena kestabilan di tubuh AD tentu membuat perwira yang kritis pada petinggi AD tak bisa melakukan dialog. Jarak antara prajurit berpangkat rendah dengan panglimanya pun semakin jauh. Seperti bumi dengan langit. Prajuritnya hidup dalam kemiskinan dan para jenderalnya hidup dalam kemewahan.

Tak adanya ruang dialog membuat, perwira macam Untung melakukan *final solution* terhadap petinggi AD macam Yani yang dianggap tidak loyal pada Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Pasukan Untung pun culik Yani dan kawan-kawan ke Lubang Buaya. Dimana Yani dan kawan-kawannya diingatkan, "Darah itu merah, Jenderal." Kalimat ini seperti sebuah kritik pada para jenderal yang jauh dari prajuritnya.

Kematian Yani dan kawan-kawan Jenderalnya, terlepas dari panasnya suhu politik 1965, juga dikarenakan tak adanya ruang publik di tubuh militer. Hingga para jenderal seperti *warlord* atau sok seperti manusia setengah dewa yang jauh dari prajuritnya. Jenderal jadi tak mengerti kesulitan yang dialami prajuritnya. Dalam hal sejarah kepemimpinan AD, bisa jadi Yani adalah contoh Panglima terburuk. Jangan bandingkan Yani dengan Jenderal M Yusuf yang dekat dan disayangi para prajuritnya.

Tak adanya ruang publik tampak fatal bagi Yani. Kematian Yani jelas tak perlu membuat Suharto belajar untuk mengadakan sebuah ruang publik di tubuh militer. Suharto menerapkan kestabilan dengan tangan besi dan nepotisme. Suharto akan berlaku keras namun halus pada pembangkang. Dengan langsung mengurung mereka. Demi kestabilan juga Suharto selalu memasang orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan strategis di militer, dan kemudian di sektor sipil juga.

Suharto, tak menginginkan adanya ruang publik dimana akan ada dialog demi menciptakan dialektika dalam sejarah militer

Indonesia. Nyaris tak ada panglima militer yang menginginkan dialektika. Sebelumnya, jika pun ada dialektika di masa Sukarno itu hanya ketidak-sengajaan saja. Karena Sukarno adalah orang yang berusaha bersikap terbuka dan demokratis. Tak ada demokrasi dalam militer. Komandolah penentu dalam militer. Kaitan militer dengan demokrasi, paling banter hanya jadi pengawal demokrasi, namun militer tak perlu demokrasi dan ruang publiknya, militer hanya butuh komando.

Demokrasi hanya milik orang sipil. Tak berlaku bagi orang-orang militer. Militer tak membutuhkannya. Itu sah, karena militer milik Negara. Semua sepakat militer alat Negara. Sah-sah saja jika militer tak perlu demokrasi. Perwira senior tentu akan bilang, kalau militer harus demokrasi bisa kacau tentara karena semua akan ikuti ego masing-masing. Mungkin akan seperti militer Indonesia jaman orde lama dulu.

Ketika Suharto naik menjadi Presiden, nyaris tak ada sikap kritis pada pimpinan tertinggi mereka. Catatan pembangkangan yang bagi kita terdengar demokratis tak pernah terdengar lagi.

Doktrin militer yang menuntut ketaatan di militer pun begitu kuat dan diterima semua serdadu dan perwira tanpa terkecuali. Karenanya, kestabilan di militer Indonesia terjaga dan terpelihara kuat. Ruang publik pun bukan jadi kebutuhan mereka.

Jika ruang publik adalah piring kecil yag disebut *lepek* dan komando adalah mangkuk. Maka militer identik dengan kacang ijo. Kacang Ijo akan tumpah jika taruh di *lepek.* Lebih baik jika itu kacang ijo diletakan di mangkok saja.

Jadi, dalam sejarahnya, *baju ijo* alias anggota militer hanya perlu dengar komando saja. Tak ada ruang bagi mereka buat protes soal apapun. Tidak boleh protes. Ikut dan balaslah perintah komandan dengan kata, “Siap, Pak.” Dijamin tidak akan ada masalah.[]

*Petrik Matanasi, adalah penulis. Beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain '*KNIL: Bom Waktu Tinggalan Belanda*', '*Westerling; Kudeta yang Gagal*', dll. Gemar berjalan-jalan dan sampai sekarang tinggal berpindah-pindah.

Catatan Akhir:

[1]KNIL: *Koninklijk Nederlandsch Indische Leger* (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Mayoritas serdadu KNIL adalah orang-orang Indonesia dengan mayoritas perwira Eropa. (*Gedenkschrift Koninklijk Nederlands Indisch Leger 1830-1950,* Dordrecht, 1990.)
[2]Spandrig: Prajurit bawahan KNIL.
[3]Vaandrig: calon perwira. Setelahnya mereka akan jadi Letnan.
[4]Overste: setara Letnan Kolonel. Mereka sudah lama jadi Mayor.
[5]*Tempo (Edisi Kemerdekaan: Pergulatan Demokrasi Liberal* (*1950-1959*) *Zaman Emas atau Hitam,* Edisi 13-19 Agustus 2007, hlm. 80-86; Coen Husein Pontoh, *Menentang Mitos Tentara Rakyat,* Yogyakarta, Resist, 2005, hlm. 118-119.
[6]*Dan Toch Mar. Apa Boleh Buat*, *Maju Terus,* Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 476.
[7]Marwati Djuned Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI,* Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 251-252.
[8]HIS (*Hollands Inlandsc School*): Sekolah Dasar Belanda untuk anak-anak pribumi.
[9]ELS (*Europe Lager School*): Sekolah Dasar untuk anak-anak Eropa, namun masih menerima anak pembesar.
[10]MULO (*Meer Uitgebrijd Lager Onderwijs*): Sekolah menengah pertama Belanda yang menerima lulusan HIS.
[11] AMS (*Algemene Midelsbare School*) : Sekolah Menengah Atas yang menerima lulusan MULO.
[12]HBS (*Hogare Burger School*) : Sekolah Menengah 5 tahun yang menerima lulusan ELS.
[13]Ulf Sundhaussen, *Politik Militerl ndonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI,* Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 184-190.

Organization of Africa Unity Berdiri 25 Mei 1963, 32 kepala negara-negara Afrika menandatangani pendirian Organization of Africa Unity di kota Addis Ababa, Ethiopia. Penggagas Organisasi Persatuan Afrika ini adalah Gamal Abdul Naser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Ahmad Sekouture dari Guinea. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika, menyelesaikan perselisihan di antara anggota, dan memperjuangkan kemerdekaan ngara-negara Afrika yang masih terjajah. Pada tahun 2002, dalam konferensi kepala-kepala negara Afrika di Afrika Selatan, organisasi itu berubah nama menjadi Africa Union yang bertujuan untuk memperluas kerjasama ekonomi di Afrika. Saat ini Africa Union dianggotai oleh 53 negara dan bermarkas di Ethiopia.

Sidebar

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh UKPKM Tegalboto

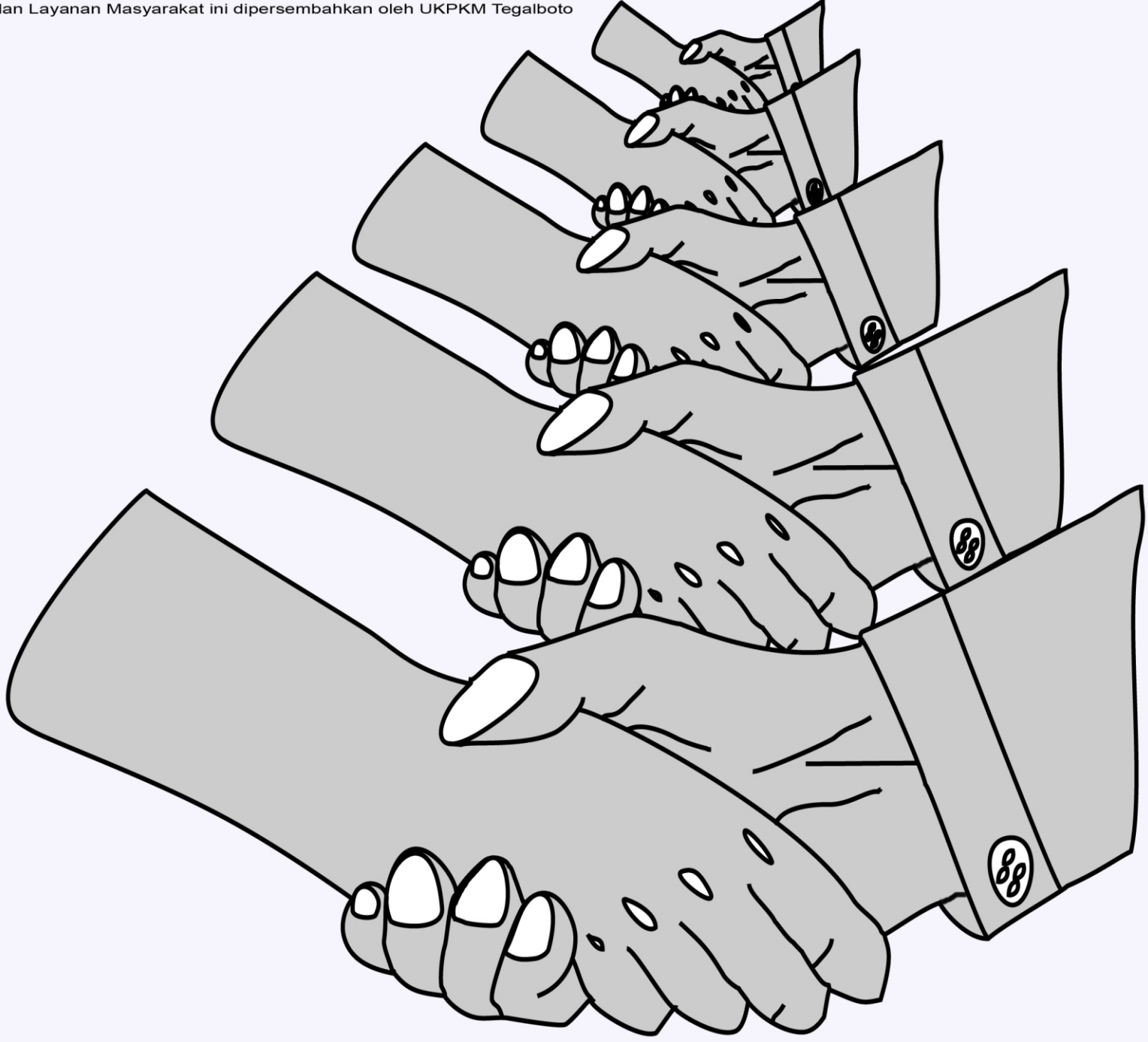

Konsensus terbentuk dari suatu hal yang Rasional

Ma$ih Adakah (R)uang Publik

-Hery Prasetyo-

TULISAN ini bermula dari pembacaan akan sebuah gagasan keruangan. Ruang apakah dia merujuk dan menandai adanya kontestasi? Adanya Diskursus dan struktur logika dalam meneguhkan gagasan dan tawaran? Adanya Subyek dibalik bahasa? Bagaimanakah subyek menempatkan dirinya didalam ruang kebahasaan? Bagaimanakah dengan Subyektifitas yang menandai subyek? Bagaimanakah perpindahan dari subyek kepada obyek? Bagaimanakah obyek dan bahasa bertemu dalam ruang kebahasaan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan terus menerus menghantui dan mengejar setiap teks yang terhampar di hadapan penulis. Lalu bagaimanakah memecahkan dan menunjukan titik-titik yang seakan hilang, meredup dalam pusaran teks.

Darimanakah beranjak dan kemanakah pijakan ini kan membawa?

Sebagai dan selalu menjadi pemula, tentunya posisi yang memungkinkan dalam ketidakmungkinan meraih keseluruhan, meraih dari jangkauan terkecil, menuju pada jangkauan terjauh, berlari dan menyeret tubuh dan imaji yang berkejaran dalam semesta tanpa pusat. Baik pusat sebagai awal ataupun sebagai akhir, tak perlulah kita memikirkan dan berhutang pada sebuah keterpusatan ataupun bersusah payah menghadirkannya sebagai pijakan solid, bukankah kehadiran pusat selalu dalam kerapuhan saat dirinya tak lagi menampakan soliditas bagi dirinya, bagi subyek, bagi siapapun dan apapun tuk memulainya.

Pijakan permulaan ini, dilayangkan pada Bahasa. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa pada Bahasa? Bagaimana Bahasa menunjukan dirinya sebagai awalan akan kehadiran kesemestaan ini?

Bahasa, seakan tampak sebagai yang solid dan hadir dalam keantaraan antara pikiran, benda dan tubuh. Tubuh dan pikiran hadir dalam Bahasa dalam menyentuh benda. Kemunculan benda dalam Bahasa, seakan merepresentaikan adanya benda dalam Bahasa. Bahasa sebagai sebuah sistem penyusunan benda-benda, dalam alur asosiatif sintakmatik dan paradigmatik, menbentang dalam ruang sinkronik dan diakronik. Bahasa dalam hal ini menjadikan dirinya sebagai representasi benda, yang tersusun sebagai bentukan solid dan objektif dalam hadapan penutur.

Bagi penutur, kehadiran Bahasa tak selalu menampilkan Bahasa dalam objektivitas, Bahasa tampil dalam bahasa-bahasa. Dalam keseharian bahasa-bahasa penutur, bermula dan hadir dalam konektivitas sensasi. Sensasi akan kehadiran benda di luar dirinya–diri penutur. Melekat dan menyatu pada benda dan diri, berakhir justu ketika penyatuan ini berada dalam persepsi. Melalui kemunculan persepsi, yang sosial hadir dan menampakan diri pada benda. Benda memunculkan relasinya pada penutur-penutur, benda hadir persepsi dan hadir dalam bahasa-bahasa.

Melalui keadaan dan formasi bahasa-bahasa, mengubah dalam Bahasa. Bahasa yang dalam formasi sosial menampakan kehadiran yang sosial dalam mengobjektivikasikan Bahasa. Benda-benda dan Bahasa hadir dalam supraindividual. Bagaimanakah kemudian beroperasinya Bahasa dalam relasi sosial?

Bahasa berhadapan dengan bahasa-bahasa dalam menunjukan suprimasi akan struktur pengetahuan yang logika yang menopang, menyususun dan berakhir pada objektivikasi Bahasa atas bahasa-bahasa. Kontekstasi tak lagi menunjukan formalitas dalam kebebas-nilaiaan.

Dalam tradisi pragmatisme, Bahasa ditampilkan dalam kedekatannya dalam mengatakan, membentuk dan mengarahkan benda-benda sebagai objek yang digerakan.

Sementara dalam bentangan historis, kemunculan Bahasa berbarengan dengan ruang borjuasi. Sebuah ruang yang didalamnya, muatan ekonomi dimediasi dalam kebendaan dan pembendaan komoditas. Komoditas yang digerakan dalam keruangan produksi.

Benda, Bahasa, Ruang dan Komoditas, beredaran sebagai element formasi sosial. Lalu dimanakah subyek? Subyek berada dalam keruangan yang dihadirkan Bahasa dalam representasi benda-benda dan komodifikasi benda-benda. Bahasa merepresentasikan relasi komoditas dan subyek. Bahasa dalam bentuk supraindividu, menghadirkan kebendaan, bahasa dalam Bahasa sebagai jejaring komoditas. Adanya subyek, adanya benda, adanya komoditas, berada dalam kehadiran Bahasa, dan sejauh Bahasa menghadirkannya.

Sejauh Bahasa menghadirkannya, bagaimanakah konsep ini beroperasi? Dalam ketertataan logika yang menopang komoditas, dan Bahasalah medium bagi penataan logika komoditas. Permasalahannya kemudian, bagaimanakah ketika Bahasa menempati ruang yang dihadirkan sebagai kategori kelas?

Kelas dan subyek yang terbentuk dalam posisi kelas, secara empirik menjadi perhatian dalam pengunaan Bahasa. Dimana posisi penutur tak pernah terlahir alami, tanpa adanya kelas dan posisi sosial bagi dirinya. Penuturan Bahasa, merujuk pada posisi kelas dan posisi subyek dalam relasi sosialnya. Dalam konteks ini, penutur sebagai subyek Bahasa ada dalam struktur sosial dan menggunakan struktur Bahasa dalam menampilkan dirinya sebagai kelas yang terrepsentasi dalam dirinya. Dan Bahasa berujung pada ruang yang terkategori dalam posisi sosial dan kelas.

Bentang Bahasa yang terrenggut dalam kategori kelas, memposisikan subyek tak lain sebagai bentukan dari kelas dengan ketertataan Bahasa. Ketertataan Bahasa merujuk pada bagaimana Bahasa membentuk dunia sebagai yang melingkupi subyek atau meruangkan subyek. Ruang subyek, berada dalam bentuk apriori bagi rasio. Rasio ada dalam keberadaanya dalam ruang, dan ruang membentuk rasio dalam menampakan benda dan menampakan Bahasa. Rasio selalu berada dalam ruang, rasio memasukkan benda ke dalam ruang untuk dikenali dan dioperasikan dalam ruang.

Rasio dalam berhadapan dengan benda berada dalam ruang, dan dari ruang rasio menempati bentuk murninya dalam menyususun struktur transendental bagi dirinya, susunan operatif rasio berada dalam bentuk praktis atas rasio. Bentuk praktis dalam menggerakan benda yang berada dalam keruangan.

Rasio, Bahasa, Benda dan Ruang, kesemuannya berada dalam persimpangan komodifikasi praktis; pertama yang berbasis pada keruangan yang didalamnya Bahasa tampil sebagai relasional antara rasio dan arah operatif benda, kedua berada dalam bentangan empirisistik akan Bahasa sebagai representasi posisi kelas dalam mengoperasikan benda. Permasalahaan ini dikonseptualisasikan sebagai Rasio Instrumental yang berbasis pada relasi komoditas. Dan untuk melampauinya, kehadiran rasio-rasio dalam membentuk ruang sosial, ditarik pada bentuk dasarnya, yaitu pada Rasio Komunikatif.

Rasio Komunikatif dibangun dengan mendasarkan pada Rasio yang tidak lagi dibayangkan bergerak pada

ruang subyek dan kebendaannya, melainkan berkehendak menempatkan Rasio Universal sebagai ruang supraindividual yang didalamnya berisi subyek-subyek dalam membentuk Bahasa Konsensual.

Bagaimana mengandaikan adanya Bahasa Konsensual ini? Bepijak pada ruang hidup keseharian, yang melekat pada subyek dan benda dalam bahasa-bahasanya. Ruang hidup ini tak mungkin didiami oleh subyek dalam ketunggalan subyektivitas. Selalu ada kehadiran subyektivitas subyek lain yang berada di dalam ruang hidup dan bahasa-bahasa lain. Intensitas antara bahasa dengan subyek dalam keruangan yang mengitarinya, ditarik pada relasi [(subyek-obyek-subyek')-ruang]. Permasalahannya relasi tersebut tampil dalam kesederhanaannya, dimana ruang hidup ditampilkan dalam intensitas antara dua subyek, bagaimanakah jika ruang hidup didalamnya berada dalam ketakterhinggaan subyek.

Intensitas subyek secara konseptual dibentuk dalam kutub; Negara, *Civil Society* dan *Market*. Posisi dan ruang baginya, seakan absurb ketika dihubungkan dengan ketakterhinggaan subyek. Dimana subyek dengan rasionya diposisikan akan berada dalam keterkatagoriannya. Dan bahasa-bahasa diubah menjadi Bahasa, seiring kategori yang diciptakan dalam sistem kategori sosial.

Bagaimana ketika seorang Presiden berucap "*saya menjadi sasaran dan target terorisme. Bukan hanya saya, tetapi juga keluarga saya juga menjadi target dari terorisme*", ucapan itu sembari diseratai gerak tubuh, mimik dan juga visualitas gambar Presiden, berada dalam fokus senapan. Dari ilustrasi ini, bagaimana kemudian mempertahankan kategori kutub, dan menempatkan ketakterhinggaan subyek di dalamnya? Bagaimana mempertahankan Bahasa dalam mendekatkannya dengan intensitas bagi subyek? Bagaimana menghadirkan dan mempertahankan adanya Rasio komunikatif?

Permasalahaan ini terlintas dalam pembacaan akan sebuah konsep Ruang Publik, yang didalamnya diandaikan adanya Bahasa, Subyek dan Rasio Komunikatif. Hingga teks ini dihadirkan, tampaknya elemen atas Ruang Publik, hendaknya tidak hanya dipercayai sebagai hal yang mendasari bergeraknya Bahasa, melainkan sebagai sebuah proses yang didalamnya tampak tak terjangkau hanya dalam sebuah kepercayaan.[]

Bacaan Selanjutnya

Austin, J, L. *How To Do This Thing With Word.* London, Oxford University Press. 1962.

Bourdieu, Pierre. *Languange and Symbolic Power*. Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 1995.

Habermas, Jürgen. *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis.* Yogyakarta, Kreasi Wacana. 2008.

Marx, Karl., Enggels, F. *Manifesto of The Communist Party.* Utrecht: Open Source Socialist Publishing, 2008.

***Penulis adalah staf pengajar Prodi Sosiologi, Universitas Jember. Dapat ditemui di heryprasetyo83@gmail.com**

Sidebar

Organisasi kaum buruh Indonesia yang pertama didirikan adalah *Staats Spoor Bond* (*SS-Bond*), pada tahun 1905 dan *Post Bond* yang juga didirikan pada tahun tersebut. Kenyataan selanjutnya menunjukkan bahwa yang lebih dahulu mengorganisir diri dalam serikat buruh tersebut adalah para pegawai perusahaan pemerintah. Dalam perkembangannya, pasang-surut pergerakan buruh sebagian ditentukan oleh gelombang politik kebangsaan dalam perjuangan pembebasan diri dari kungkungan kolonialisme asing.

DECLARATION OF JEMBER DISTRICT

Free of Worst Forms of Child Labour by 2015

-Dara Sumareni-

Alun-alun merupakan tempat umum yang menjadi tujuan utama warga untuk menghabiskan akhir pekan. Alun-alun menjadi jauh lebih ramai pada akhir pekan dibandingkan dengan pada hari-hari kerja. Dengan memanfaatkan momen keramaian pada akhir pekan, maka pada Minggu, 12 Juni 2011 di Alun-alun Jember, bertepatan dengan hari sedunia menentang pekerja anak, dimanfaatkan oleh Perkumpulan Rumah Perempuan, Forpida Kabupaten Jember, Komite Aksi Daerah Penghapusan BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak), dan ILO (International Labour Organization) untuk mengadakan acara 'Declaration of Jember District Free of Worst Forms of Child Labour by 2015'. Acara ini bertujuan untuk mendeklarasikan:

1. Komitmen bersama untuk melakukan upaya menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang bekerja di seluruh level pekerjaan,
2. Terus menerus mengkampanyekan gerakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan pada anak demi masa depan yang lebih baik untuk menciptakan generasi bangsa yang bermartabat,
3. Komitmen bersama untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam lingkungan kerja baik sektor formal maupun informal,
4. Komitmen bersama untuk mengarusutamakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak dalam program kerja masing-masing pihak sehingga cita-cita menuju Jember terbebas BPTA terwujud di tahun 2015.

Keempat poin deklarasi diatas dibacakan oleh: PJ Bupati Jember, Ketua DPRD Jember, Ketua Pengadilan Negeri Jember, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Kapolres Jember, Komandan Kodim (Dandim) Jember, Komite Aksi Daerah Penghapusan BPTA dan ILO. Selain acara pembacaan deklarasi, pada acara ini juga diadakan lomba mewarnai tingkat SD dan SMP, dan penggalangan dukungan dengan menandatangani kain putih.

1. Para deklarator, yang terdiri dari beberapa perwakilan dari instansi terkait.

2. Para deklarator yang sedang membacakan teks deklarasi.

3. Pada peringatan 'hari sedunia menentang pekerja anak', Pihak penyelenggara juga mengadakan lomba mewarnai kategori Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

4. Pada acara ini juga diadakan penggalangan dukungan 'Jember terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak' dengan menandatangani bentangan kain putih panjang.

5. Salah satu pejabat sedang menandatangani teks deklarasi yang telah dibacakan.

6. Sebagai simbol telah dibacakannya teks deklarasi, dilakukan pelepasan balon.

7. Panitia deklarasi dari Rumah Perempuan sedang membagikan balon yang akan dilepas sebagai simbol bahwa teks deklarasi telah dibacakan.

Laporan Singkat tentang Gerakan Kesenian di Simpang Masyarakat: Berbeda dan Merdeka 100%

-Arys Aditya-

SEBAGIAN dari kita mungkin tidak asing dengan *tagline* diatas. Ada yang pernah melihatnya dalam bentuk stiker, tertera di tembok-tembok kota, sablonan kaos, dsb. Tapi tidak kurang banyak juga yang bertanya, apa Berbeda dan Merdeka 100% (BDMSP) itu?

Tanggal 13 Februari dan tanggal 17 April 2011 sebenarnya bisa dicatat sebagai tanggal penting dalam kronik kesenian di Indonesia. Karena di dua tanggal tersebut *tagline* BDMSP serempak mendatangi belasan kota di Indonesia dan sebuah kota di Singapura.

Kalau dilihat secara terpisah, *tagline* tersebut terlihat seperti kegiatan iseng yang dilakukan oleh beberapa orang. Serupa dengan rutinitas para *bomber* (sebutan untuk pegiat mural dan grafiti) atau orang yang sekedar menempel stiker. Akan tetapi jika sedikit mencermati, ada beberapa hal menarik di dalamnya.

BDMSP, Kenapa?

Dalam situs 'resmi' BDMSP (berbedadanmerdeka100persen.net), aksi BDMSP diinisiasi sebagai seruan pada seniman-seniman jalanan (*street-artist*) untuk secara kritis menyikapi situasi terkini bangsa ini.

Ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa saat belakangan. Dimana ada beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan bendera agama tertentu lantas menyerang kelompok-kelompok keyakinan lainnya. Serentetan peristiwa tersebut kemudian ramai dibicarakan di media massa, jejaring sosial, hingga warung-warung kopi.

Rasa tidak nyaman pada tetangga yang berbeda keyakinan menyebar, melihat orang yang menggunakan atribut tertentu membuat merinding, orang menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Singkatnya, rasa aman kolektif sudah tidak lagi hadir seperti sebelumnya. Kebebasan berkeyakinan yang sejatinya telah dijamin UUD negara ini, sirna dalam sekerjapan mata.

Pada perkembangannya, BDMSP mampu merekam keresahan yang hadir di tengah masyarakat tersebut. Ia bergerak dinamis, tersebar secara masif, dan direspon bahkan oleh mereka sehari-hari jauh dari praktek kesenian. Tidak kurang puluhan orang, baik seniman maupun warga biasa, di puluhan kota meresponnya lewat aksi-aksi kreatif. Tetapi mungkin hal ini pula yang menyebabkan ia luput dari perhatian para kritikus dan pengamat seni, karena pada beberapa level ia susah untuk disebut sebagai aktivitas kesenian.

Tidak mengherankan, kritikus seni hari ini hanya mau menatap ruang-ruang pameran, galeri, dan pameran.Tentu saja mereka tidak akan memberikan porsi yang cukup bahkan untuk sekedar menoleh pada praktek-praktek seni jalanan seperti ini. Ditambah lagi ketiadaan kurator dan katalog, membuat BDMSP tidak akan pernah masuk ke dalam pusaran wacana kesenian.

Jangankan kurator, 'katalog' yang dimiliki awak BDMSP hanyalah sebuah situsweb. Padahal sampai tulisan ini ditulis, ia telah hadir dua kali. Situsweb itulah yang memberikan sejumput keterangan beserta sekian dokumentasi karya-karya yang telah dieksekusi oleh para seniman yang terlibat. Katalog digital tersebut sekaligus menjadi medium komunikasi bagi para seniman yang sebelumnya mungkin tidak saling mengenal.

Akan tetapi pada aspek yang lain, BDMSP mampu memberikan tamparan keras pada kritikus dan penikmat seni yang sudah kepalang basah menjadi elitis. Mereka yang terkadang lupa kalau mereka juga bagian dari segala aktivitas sosial-politik yang terjadi di khalayak ramai. Di ruang-ruang yang sama-sama ditempati.

BDMSP juga seolah melampaui kritik seni yang kita kenal belakangan. Kritik seni yang berangkat dari diskursus-tekstual. Kritik-seni yang mereduksi muatan sosial strategis yang terjadi di dalam serentetan karya seni tersebut. Terlanjur meninggalkan faktor-faktor internal yang terjadi semenjak karya tersebut digagas, diproses, dan dikonsumsi oleh khalayak.

Beberapa orang yang terlanjur mendaulat dirinya atau didaulat sebagai seniman, seringkali merasa bahwa ia bukan lagi bagian integral dari masyarakat. Seolah hidup di dunia yang sama sekali berlainan. Terpisah dengan permasalahan lingkungannya. Jadi sama sekali apatis dengan isu-isu yang bergerak di tengah masyarakat umum.

Anehnya, ini malah dikuatkan oleh hampir seluruh kurator pameran dan kritikus seni. Karya-karya seni di dalam ruang pameran, galeri, atau museum lantas dijadikan standar dalam menentukan siapa-yang-seniman dan siapa-yang-bukan-seniman. Masalah-masalah di luar ruang tersebut diabaikan. Sama persis, beberapa tempat tersebut memiliki dunianya sendiri.

Persis seperti itulah yang ditolak oleh inisiator BDMSP. Siapa saja bisa berkarya seni, karena siapa saja yang mau berkarya tentu saja seniman. Dan memang, inilah gerakan kesenian. Kesenian yang bergerak di tengah-tengah masyarakat.

Mereka yang tertarik kemudian mengartikulasikan *tagline* tersebut menjadi karya seni. Mempraktekkan aktivitas kesenian di ruang publik. Baru setelah itu mengirimkan dokumentasi karya-karyanya pada situsweb milik bersama tersebut untuk 'diawetkan'. Semuanya tanpa publikasi berlebihan, apresiasi, apalagi kritik.

Poin menarik dari sini adalah para seniman tersebut seperti melakukan 'pameran' bersama, di tanggal 13 Februari dan atau 17 April. Tanpa berkomunikasi langsung, apalagi diskusi. Mereka hanya diikat oleh tema tersebut, yang sekaligus menjadi visi bersama.

BDMSP lalu dinikmati oleh masyarakat di masing-masing kota yang kebetulan melintasi tempat dimana si seniman membuat karyanya. Sejenak pameran ini seperti undangan bagi warga untuk bertanya, “ada apa sih?” tanpa memberi jawaban.

Para seniman yang berkarya dalam BDMSP mencoba merekonfigurasi sekaligus merekonstruksi pemahaman masyarakat

mengenai keberbedaan dan kemerdekaan. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap utuh sebagai nilai-nilai ideal, namun begitu besar memiliki lubang.Di lubang itulah para seniman mengisinya dengan praktek berkesenian.

Di sisi lain, ia adalah konsekuensi dari jiwa-jaman yang bergerak. Perkawinan nyata antara gagasan berkesenian dengan optimalisasi piranti teknologi. Hal yang masih jarang terjadi meski sudah lebih dari satu dasawarsa dinikmati. Ini yang kemudian mengakomodir perluasan kesadaran individu (si pembuat karya) pada masyarakat lewat artikulasi estetik di beberapa ruang dan fasilitas publik.

Apabila dilakukan beberapa dekade ke belakang, BDMSP punya kemungkinan besar akan gagal karena medium internet sebagai alat utama penyebarannya belum ditemukan. Penggunaan internet inilah yang menjadi titik-tolak BDMSP sebagai bentuk dampak kreatif dari apa yang disebut jiwa-jaman tersebut.

Perkawinan antara teknologi dengan kesenian di wilayah kerja inilah yang sejatinya menjadi kekuatan utama dari BDMSP. Ia mampu melintasi batas-batas

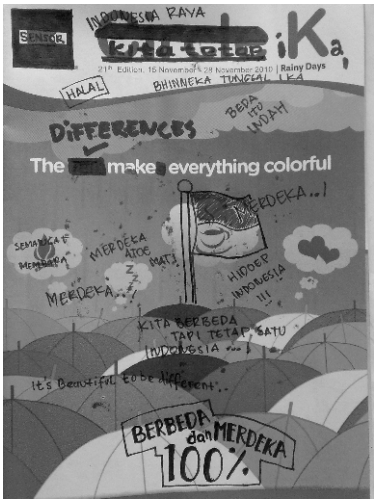

primordialisme dan kultur karena menggunakan perangkat yang telah menjadi 'universal'. Ia mudah diakses dan dieksekusi karena memang tidak ada tuntutan selain penyertaan *tagline* BDMSP untuk mempermudah kerja dokumentasi.

Kaki-Kaki 'Estetika'

Sepintas, BDMSP dapat dikatakan sebagai manifes mutakhir dari GSRB karena ia, seperti yang terdapat dalam Lima jurus gebrakan GSRB: yaitu mampu mewujudkan seni rupa yang lebih hidup, dalam arti tidak diragukan lagi kehadirannya, wajar, berguna, dan hidup meluas bagi masyarakat.

Mungkin kategori 'berguna' masih relatif bagi sebagian masyarakat. Bahkan mungkin ada yang merasa rugi karena melihat, taruhlah sebuah tembok yang biasanya putih bersih menjadi berwarna-warni dan ditulisi *tagline Berbeda dan Merdeka 100%*.

Namun apabila publik mau sedikit saja bersabar mencermati karya-karya yang hadir seperti karya dari Anggun Priambodo yang mengorbankan sisi kanan mobil silvernya dengan tagline tersebut. Awam akan terheran pada daya-kreatif seniman ini.

Bagaimana tidak, dengan eksperimen seperti itu, Anggun akan membawa 'karya seni'nya kemanapun. Setidaknya ada satu hal penting yang menjadikan coretan ini menjadi 'berbunyi'. Dengan menaruhnya pada mobil, pesan yang ingin disampaikan oleh Anggun akan langsung menancap pada siapa saja yang melihatnya. Secara sekilas saja tulisan tersebut akan terbaca dengan jelas. Ia menonjol karena warna tinta yang digunakan kontras dengan cat mobilnya.

Lalu Arif Maulana yang mencoba mengilustrasikan 'perbedaan' dengan sederhana, menggunakan tembok di Kota Surabaya untuk digambari dengan payung beragam warna, belum lagi tambahan teks "*the differences make everything colourful*" yang menambah 'sejuk' karya tersebut. Sudah barang tentu pesan yang ingin disampaikan terang dan langsung sampai pada siapapun yang melihatnya.

Serangkaian nama-nama dan variasi karya dari berbagai kota juga hadir. Ada Arief Adityawan (Jakarta), Gery Paulandhika (Medan), Supriyadi (Ciledug), Andrew

Lumban Gaol (Yogyakarta), dll., bahkan sampai di Singapura, yaitu Alexander Averil.

Tidak ada kriterium estetis di dalam BDMSP. Atau kalau ingin sebutlah sangat longgar. BDMSP bisa diungkapkan dengan gaya dan bentuk apa saja. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak lagi penting saat ia melaju dengan kecepatan kolektif. Dan dengan demikian kriterium estetis yang selama ini ditetapkan oleh kanon-kanon seni rupa tidaklah laku lagi.

Keadaan seperti ini, atau dapat disebut sebagai demokratisasi kesenian, menjadi penting karena seniman dituntut lebih bertanggungjawab saat menggunakan ruang publik. Ada sisi dimana keunggulan estetis si seniman adalah tanggungjawab sosial-politis seniman itu sendiri sebagai kelompok yang mungkin sedikit lebih 'tersadar'. Karena mereka tentu saja telah mengalami pergumulan estetik, yang kemudian disebarkan pada warga sebagai pemilik ruang publik.

Di wilayah yang lebih jauh, demokratisasi kesenian juga makin membuka peluang bagi publik untuk meneruskan hentakan yang telah dimulai oleh seniman-seniman tersebut. Seniman tidak lagi duduk di menara gading, ia hadir di tengah masyarakat, merekam keresahan masyarakat, dan mengingatkannya dengan segar.

Seperti yang sempat disentuh di awal, wilayah eksekusi seperti ini memang disengaja. Dengan mencuri perhatian publik, maka BDMSP mampu mengundang respon. Bagaimana tidak, semisal saat seorang pelajar atau pekerja kantoran secara kebetulan melihatnya di tempat biasa ia menuju sekolah atau tempat kerjanya, lalu menemukan *tagline* BDMSP, sedetik kemudian ia bisa mengakses gagasannya cukup ke mesin pencari digital.

Jika sepakat dan tertarik, ia cukup membeli spidol, mencetak stiker, atau menyablon kausnya dengan tagline BDMSP. Karena ketiadaan syarat khusus dalam menggunakan *tagline* BDMSP.

Sebelumnya…

Di masa-masa republik ini masih baru lepas dari kolonialisasi fisik, kesenian juga pernah sangat dekat dengan publik secara luas. Namun ada yang dengan terang membedakan antara gerakan berkesenian waktu itu dengan BDMSP. Para seniman disini bergerak dengan gagasan yang sama sekali tidak dikooptasi oleh nilai-nilai yang disebar oleh negara.

Negara yang sejatinya memiliki tugas memikul penyebaran nilai-nilai normatif hari ini malah abai. Maka tak salah jika banyak pihak, yang masih peduli dengan keberlanjutan kenapa-kita-bernegara mengambil alih tugas tersebut.

BDMSP membuktikan pada level ini bahwa seniman juga menawarkan andil dalam berkontribusi. Sembilan belas kota di dalam negeri, dan satu di Singapura membuktikan bahwa seniman juga merupakan komponen penting pada konstelasi sosio-politik masyarakat. Tawaran untuk sebuah pra-konsolidasi publik.

Ciri khas dari tiap pra-konsolidasi publik adalah pengambilalihan perspektif pihak lain. Mungkin sekelompok warga yang kemudian merasa tidak aman lagi akibat beberapa peristiwa barbar tersebut merasa tidak mungkin untuk mengintegrasikan dirinya di dalam kelompok yang menjadi terdakwa. BDMSP adalah percobaan menjembatani hal ini.

Karya-karya seniman BDMSP yang hadir miskin sekali pada tuduhan. Ia malah mendekatkan publik pada nilai yang mungkin telah dilupakan. Dilupakan karena kalap (pihak yang mengancam dan melakukan kekerasan) dan karena merasa tidak lagi aman (pihak yang terancam atau menjadi korban).

Istilah 'berbeda' dan 'merdeka 100%', menjadi amunisi ampuh yang cukup berat menyandang beban politis untuk mengungkapkan apa yang terlanjur berlubang. Selubung agama, kepentingan politis, ekonomis, dll., mungkin mampu membuat asas normatif tersebut berantakan, namun BDMSP juga memberi bukti yang cukup kalau artikulasi kreatif cukup memadai untuk menambalnya.

Pra-konsolidasi publik lewat medium digital pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Kita tentu masih ingat preseden Bibit-Chandra dan kemudian Koin Untuk Prita. Meskipun ada kemiripan

antara dua peristiwa tersebut dengan BDMSP, namun dua yang pertama tidak menimbulkan gejolak kreatif-estetik diantara simpatisannya, murni hanya gerakan aktivisme dan sama sekali tidak menyentuh wilayah estetika.

Selain itu, dua peristiwa tersebut memiliki posisi politis yang kuat. Artinya ada subyek tertentu yang dituju, contoh pada kasus Prita adalah RS Omni International dan Polri lalu kasus Bibit-Chandra adalah seluruh jajaran penegak hukum. Sehingga mau tidak mau, derajat normatif kedua gerakan tersebut tidak seluas BDMSP.

Secara paradigmatis juga muncul lebih besar lagi untuk menyatukan karena sama sekali tidak kalkulasi politis yang digunakan pada saat ber-BDMSP. Ia hadir sebagai karya dan pergi sebagai ingatan, hanya itu.

Namun tidak ada yang meragukan bahwa kekuatan seni dalam mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Ia digunakan bahkan sejak ribuan tahun lalu. Sejak Darius Agung (Darius the Great) menempelkan logo kuasanya di dinding aula kerajaan. Hal ini kemudian dimodifikasi oleh penakluknya, Alexander Agung (Alexander the Great) dengan menambahkan citra lewat koin-koin bergambar dirinya yang tersebar di seantero kekuasaannya yang sangat luas tersebut.

Di sisi lain BDMSP juga berhasil menyadari bahwa kuasa memang ada dimana-mana. Ia menyadari strategi diskursif yang menyebar lewat medium yang kebetulan di republik ini juga baru hadir setidaknya 2 dekade terakhir. Pemenggalan asas subyek-tertuduh menjadi poin lebih karena hal inilah yang menambah daya tangkap juga daya dorong bagi publik untuk meneruskan apa yang telah dimulai oleh sekelompok warga lainnya, yang kita kenal sebagai seniman jalanan.

Kecenderungan gerakan massa yang langsung mengarah pada tindakan praktis seperti dua hal tersebut adalah ia muda ditumpangi, bahkan oleh pihak yang sebelumnya didakwa publik menjadi pihak yang paling bersalah. Presiden SBY sebagai kepala negara-pemerintahan yang sebelumnya menjadi sasaran pada kasus Bibit-Chandra malah keluar jadi pahlawan lewat instruksinya untuk menghentikan kasus tersebut. Keuntungan terbesar BDMSP sebagai gerakan karena ia tidak mengarah secara langsung pada pihak-pihak tertentu. Hingga ia lebih susah ditumpangi. Ia juga bisa diselenggarakan kapan saja. Selama ada pihak yang merasa bahwa pemerintah masih belum becus memberikan prakondisi dan prasyarat bagi warganya untuk memberikan rasa aman. Hal yang nyata-nyata merupakan fundamen kenapa kita berbangsa dan bernegara.[]

Referensi:
Wawancara dengan FX Harsono tanggal 5 Juli 2011.
Situsweb:
www.berbedadanmerdeka100persen.net
Buku:
Jim Supangkat (ed.), 1979, *Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia*: *Kumpulan Karangan*, PT Gramedia.
Steven Best and Douglas Kellner (1991), *Postmodern Theory: Critical Interrogations*, Macmillan Education Ltd.
J.B. Kristanto dan Nirwan Ahmad Arsuka (eds.), 2002, *Esei-Esei Bentara Budaya 2002*, PT Kompas Media Nusantara.
Bre Redana, J.B. Kristanto, dan Nirwan Ahmad Arsuka (eds.), 2003, *Esei-Esei Bentara Budaya 2003*, Penerbit Buku Kompas.
Film:
Dr. Nigel Spivey, *How Art Made The World (Series)*, BBC.

BERBEDA DAN MERDEKA 100%.

Jejak Media

-Septiana Cahya Utami-

"At the heart of democracy is talk"
(Barber, 1990:17)

TERHITUNG sejak tahun 1962 jejak pertelevisian di Indonesia mulai tercipta. Hal ini terlihat dengan berdirinya Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tanggal 24 Agustus 1962, walau notabenenya peralatan yang akan digunakan masih sulit didapatkan.Minimnya peralatan yang memadai kala itu tetap tidak menjadi kendala bagi TVRI untuk menyiarkan dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah. Seperti salah satunya TVRI berhasil melakukan penyiaran Asia Games VI yang diselenggarakan di Jakarta saat itu.

Memasuki era Orde Baru diJuli 1976, Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia telah meluncurkan satelit Palapa. Akan tetapi perlu diingat bahwa jaman Orde Baru adalah masa dimana pemerintahannya sangat terpusat dan terkontrol.Semua aktivitas yang dilakukan publik diwaspadai. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa saja yang bisa menggoyahkan stabilitas pemerintah Orde Baru. Televisi yang merupakan salah satu media yang bisa diakses oleh masyarakat dilarang keras bersikap kritis dalam peranannya sebagai media informasi. Komunikasi massa akhirnya beralih fungsinya menjadi monolog penguasa.

Padahal jika dilihat dari sudut pandang positivistik, media massa seharusnya memberikan informasi atau memberitakan semua peristiwa sebagai kegiatan yang bebas nilai[1]. Tidak ada tekanan dari berbagai pihak pada media massa untuk memberikan informasi yang aktual dan sesuai fakta kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya di era Orde Baru melalui kebijakannya, Soeharto membatasi ruang bagi media massa khususnya media televisi. Program yang disajikan harus memperlihatkan sisi positif dari pemerintahannya saja.Segala bentuk penyimpangan yang terjadi di kalangan para penguasaha sengaja ditutup-tutupi.Korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat juga tak pernah tersentuh oleh kekuatan hukum.

TVRI adalah stasiun televisi yang memonopoli ruang media televisi di bawah kontrol para kroni Seoharto. Tidak ada acara-acara televisi yang menyinggung tentang kekurangan dari

kebijakan pemerintah. Semua elemen yang dianggap bisa menimbulkan isu-isu yang menyudutkan pemerintah dihapuskan. Media hanya menjadi perantara yang dikendalikan oleh para penguasa, sedangkan masyarakat diposisikan hanya sebagai komunikan. Kondisi yang berjalan searah ini tidak bisa menimbulkan atmosfer yang kritis ditubuh masyarakat.

Tekanan pemerintah terhadap media massa tak lantas menyusutkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan untuk keadilan rakyat. Salah satu bagian masyarakat yang berperan dalam pembangunan negeri ini adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa sendiri sudah berjalan terhitung sejak tahun 1960 saat mahasiswa juga ikut andil dalam menjatuhkan rejim Orde Lama. Pada saat itu, gerakan mahasiswa sempat mengalami stagnasi[2] karena adanya kebijakan dari pemerintahan yang sengaja mempersempit ruang politik dan hal tersebut berjalan lurus dengan kegiatan mahasiswa dalam beropini.

Barulah menginjak tahun 1990an, geliat pergerakan mahasiswa mulai kembali berkobar. Krisis ekonomi yang berlarut-larut dan mengakibatkan kemiskinan yang melanda seluruh daerah di Indonesia menjadi perangsang bagi kesadaran mahasiswa untuk lebih kritis terhadap kinerja pemerintahan Soeharto. Awalnya pola yang dilakukan masih terkesan sporadis dan hanya berada dalam lingkup kampus dan sekitarnya saja sama dengan pergerakan mahasiswa sebelumnya.

Awalnya hanya dimulai oleh beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang berada di kota-kota besar seperti Universitas Indonesia, Jakarta, dan Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta. Lalu diikuti oleh hampir seluruh pergerakan mahasiswa di semua kota yang memiliki perguruan tinggi.

Puncaknya pada Mei 1998, sebuah sejarah baru terukir bagi rakyat Indonesia. Rezim Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia tumbang karena gerakan mahasiswa. Demonstrasi dan orasi-orasi yang mereka lakukan saat itu bertujuan sama dan menghadapi musuh yang sama, Orde Baru.

Perilaku gerakan mahasiswa seperti ini bisa dikategorikan sebagai perilaku kolektif dalam paradigma sosiologi. Perilaku kolektif cenderung tak direncanakan dan tidak terstruktur dan muncul sebagai tanggapan atau respon dari sebuah fenomena. Perilaku kolektif seperti ini menurut Neil Smelser[3] akan muncul setelah terbentuk beberapa kondisi pada sebuah kelompok masyrakat. Neil Smelser memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam munculnya perilaku kolektif. Adapun enam syarat pra-kondisi yang harus terjadi; struktural (*structural conducivenes*), ketegangan struktural (*structural strain*), kemunculan dan penyebaran pandangan, faktor pemercepat (*precipitating factors*), Mobilisasi tindakan (*mobilization for action*), dan pelaksanaan kontrol sosial (*operation of social control*).

Dalam konteks gerakan mahasiswa di Indonesia, keenam syarat itu telah terpenuhi[4]. Pertama kondisi sosial masyarakat saat itu yang mendukung aksi-aksi mahasiswa.Kedua adanya kesamaan rasa tertindas oleh pemerintah. Ketiga penyebaran serta gagasan dengan landasan kebenaran, Hak Asasi Manusia dan rakyat sebagai dasar perjuangan. Keempat adanya faktor pemicu dengan gugurnya mahasiswa Universitas Trisakti yang kemudian berlanjut pada peristiwa lainnya seperti revolusi yang terjadi. Kelima adanya usaha mobilisasi aksi dengan berbagai elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah adanya tekanan dari negara atau bentuk kontrol sosial lainnya yang berusaha menggagalkan/menggangu

proses perubahan.

Kembali lagi pada perkembangan media massa di tahun 1990, turut andil dalam menciptakan kondisi tersebut. Dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor : 190 A/ Kep/ Menpen/ 1987 tentang siaran saluran terbatas, yang membuka peluang bagi televisi swasta untuk beroperasi[5]. Terhitung sejak saat itu munculah benih-benih pertelevisian di Indonesia.Rajawali Citra Televisi(RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan Indosiar Visual Mandiri (IVM) merupakan stasiun televisi swasta (terkecuali TPI yang memang dibangun atas permintaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu) yang lahir pra-reformasi. Disini TVRI sebagai televisi pemerintah mulai kehilangan pamornya.

Peranan media dalam membentuk perilaku kolektif pada gerakan mahasiswa 1998, sangat terlihat pada kondisi *precipitating factors.* Hal ini terlihat dari keberanian salah satu media televisi swasta yang mengekspos apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kepada para aktivis pergerakan mahasiswa disana. Seperti pemberitaan penembakan mahasiswa Trisakti dan penembakan Semanggi, walaupun saat itu tekanan pemerintah terhadap media khususnya televisi masih begitu ketat. Walaupun pergerakan media televisi sempat mendapat tekanan keras dari pemerintah melalui *TV Pool* (kebijakan yang dikeluarkan untuk pengendalian informasi melalui televisi oleh Departemen Penerangan RI). Media televisi saat itu tidak boleh menayangkan apa yang sebenarnya terjadi dengan alasan agar kerusuhan tidak semakin meluas. Kebijakan ini justru menuai kecaman keras dikalangan masyarakat. Hal ini yang bisa menghilangkan *sense of crisis* atau kepekaan masyarakat terhadap krisis yang kemudian menimbulkan kekecewaan pada tubuh masyarakat.

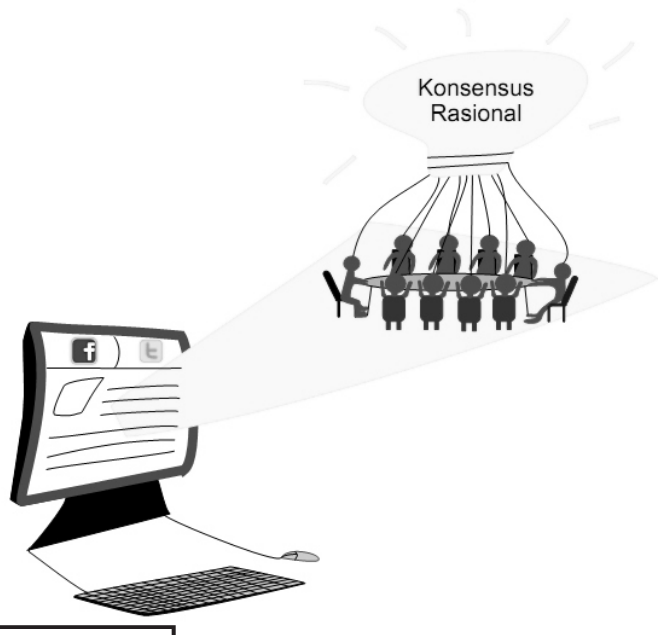

Ruang Publik dan Media

Kembali pada hakikat media yang berfungsi sebagai penyampai informasi kepada rakyat, disini penyorotan tindakan pemerintah (penembakan mahasiswa.red) khususnya media televisi yang menyiarkan sebuah kejadian dalam bentuk *audio visual* dan langsung menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bisa menjadi faktor pemicu bagi rakyat untuk bersikap lebih kritis pada apa yang sedang terjadi. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Potensi konflik semacam ini terutama lebih mudah terpicu jika yang menjadi perbedaan merupakan hal yang bersifat politis.

Pertentangan mahasiswa dan pemerintah yang terus-menerus bergejolak saat itu merupakan konflik yang disajikan oleh media televisi yang bertujuan untuk merangsang terciptanya Ruang Publik di kalangan masyarakat Indonesia. Meminjam pengertian ruang publik dari Jurgen Habermas, Ruang Publik adalah ruang bagi rakyat sebagai sarana menyatakan pikiran yang independen diluar intervensi atau kontrol negara.

Dalam bukunya, *Transformasi Struktural Ranah Publik*, Habermas[6] menjelaskan bahwa fungsi

dari Ruang Publik itu sendiri yakni sebagai perantara keprihatinan privat individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, yang dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan dan keprihatinan dari kehidupan sosial dan publik. Konsep ini terwujud dalam diskusi-diskusi dilematis untuk mencapai konsesus rasional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun terutama kepentingan pasar dan negara. Menurutnya, bentuk-bentuk ruang publik seperti ini selain ada pada badan media, juga terdapat pada salon-salon sastra, perdebatan politik, warung kopi, dan berbagai macam ruang publik lainnya.

Konsolidasi dari pergerakan mahasiswa pada tahun 1960 dan 1998 juga tercipta melalui Ruang Publik. Dalam buku *Menentang Tirani,* Edy Budiyanto[7] menjelaskan pola yang dilakukan dalam gerakan mahasiswa saat itu yakni setelah menyadari pemerintahan dan lembaga pendidikan yang tidak lagi bisa diharapkan, mereka mencoba untuk menciptakan ruang-ruang aspirasi mereka sendiri. Dan pola ini juga terjadi pada gerakan mahasiwa di tahun 1990an. Melalui diskusi-diskusi politis yang mereka lakukan, akhirnya mereka curahkan dalam bentuk demonstrasi.

Selain itu mereka juga memperkuat konsolidasi diantara mereka untuk menumbuhkan kekuatan yang besar. Konsolidasi menjadi peranan penting pergerakan mahasiswa saat itu karena dengan adanya konsolidasi jaringan diantara mereka seperti antara mahasiswa antar kota, selain itu konsolidasi menjadi sebuah antisipasi jika terjadi goncangan dikalangan mereka yang bisa mengganggu jalannya pergerakan.

Karena itu dulu, mahasiswa familier dengan istilah *informal meeting*. Kegiatan ini diadakan tidak di tempat yang sama, tetapi berpindah-pindah. Forum ini menjadi ajang aktivis mahasiswa melakukan konsolidasi gerakan. Di forum ini pula perkembangan gerakan sekecil apapun, mulai isu hingga variannya, disampaikan dengan tuntas.Ini penting agar gerakan mahasiswa di pusat dan daerah, nyambung. Menjadi gerakan yang serentak dan menyeluruh.[8]

Disini mahasiswa menunjukkan bahwa mereka bukan suatu kelompok politik yang berkeinginan meraih kekuasaan melainkan “kekuatan moral” yang menghendaki tercapainya cita-cita pemerintahan yang bersih. Disini terlihat bahwa memang ruang publik yang tercipta memenuhi kondisi yang digunakan sebagai prasyarat dalam proses pembentukan ruang publik itu sendiri yakni intersubjektif, politis serta dilematis.

Begitu pula dengan kehadiran televisi yang menjadi wadah atau media bagi opini rakyat dan sebagai Ruang Publik sendiri. Perlu diingat bahwa, dalam pelaksanaan dan pengoperasiannya, televisi menggunakan gelombang elektromagnetis dan basis material udara sebagai sarana pemancar. Dan udara sendiri adalah elemen yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang diatur oleh Negara. Maka seharusnya media televisi ini terbebas dari kekuasaan pihak tertentu apalagi Negara dan pasar. Mengingat bahwa media televisi adalah Ruang Publik yang ditempatkan sebagai sarana untuk menyalurkan opini publik.

Terciptanya Ruang Publik ini bertujuan untuk melahirkan nalar publik yang bisa mengontrol kekusaan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Menurut Habermas, individu dan kelompok dapat membentuk opini publik, memberikan ekspresi langsung terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka, seraya mempengaruhi praktik politik. Ranah publik borjuis memungkinkan terbentuknya area aktivitas opini publik, yang menentang kekuasaan negara yang opresif, serta kepentingan-kepentingan kuat yang membentuk masyarakat borjuis.

Prinsip-prinsip ranah publik melibatkan suatu diskusi terbuka tentang semua isu yang menjadi keprihatinan umum, di mana argumentasi-argumentasi diskursif (bersifat informal, dan tidak ketat diarahkan ke topik tertentu) digunakan untuk menentukan kepentingan umum bersama. Ranah publik dengan demikian mengandaikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak untuk secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, tak lantas dituangkan dalam bentuk Pemilu saja. Kebebasan pers dan media juga merupakan bentuk dari demokrasi tersebut. Dengan kata lain, pada sistem politik yang demokratis, media bebas dalam pergerakannya. Tak heran jika bisa dikatakan bahwa media merupakan salah satu pilar atau penopang dari demokrasi. Media menjadi sangat vital peranannya dalam menentukan dalam sebuah evolusi masyrakat demokratis. Karenanya dalam pengelolaan media, dari stuktur kepemilikan hingga produksi dari sebuah media akan menentukan bentuk dari Ruang Publik didalam sebuah sistem demokrasi.

Taruhlah media korporasi salah satunya. Terlepas dari kontrol negara, Ruang Publik pada televisi beresiko untuk dikendalikan oleh pasar. Dampaknya, ruang publik dalam media televisi bisa beralih menjadi persaingan antar pemilik modal. Media telah mereduksi dan memprogram informasi

yang kan diberikan kepada publik berbasiskan kepentingan-kepentingan pemilik modal. Ketimpangan tersebut terjadi karena disisi lain kewenangan pemerintah sebagai pengawas dalam produk yang diberitakan kepada masyarakat tak terwujud.

Keberadaan dari media televisi yang pemiliknya merupakan orang yang berkecimpung di dalam bidang politik tergambar pada dua stasiun televisi nasional Indonesia yakni TV One dan Metro TV. Jelas sekali adanya kepentingan pada pemberitaan yang mereka sajikan kepada khalayak umum. Belum lagi media korporasi sangat bergantung pada iklan. Bagi media korporasi, iklan yang mendatangkan profit bagi mereka sehingga terkadang informasi yang menyangkut kepentingan publiklah yang lalu terkorbankan dan tersisih jika tidak memenuhi syarat yakni dengan *rating* yang tinggi.

Kini bisa dilihat, pada praktiknya para politikus saat ini cenderung lebih memilih menampilkan diri mereka dalam bentuk iklan pada layar kaca daripada melakukan diskusi seraca langsung tentang visi dan misi yang mereka usung. Hal ini menginterpretasikan bahwa keberadaan media televisi sebagai instrumen politik memunculkan industrialisasi politik yang bagi mereka bisa membangun citra di masyarakat. Munculnya persepsi citra ini jelas sekali telah menyingkirkan rasionalitas.[9]

Disisi lain masyarakat membutuhkan informasi yang ada pada media televisisebagai ukuran dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sikap seperti inilah yang diharapkan bisa mewujudkan sistem demokrasi yang substansif, bukan lagi demokrasi yang prosedural. Terhitung setelah bendera reformasi dikibarkan di Indonesia, kebebasan pers benar-benar terbuka. Hal ini bisa dlihat dari banyaknya stasiun televisi yang beroperasi sampai saat ini, entah itu di lingkup nasional maupun lokal. Setidaknya menurut sebuah perusahan pencatat *rating* pertelevisian[10], sudah ada 10 stasiun televisi nasional yang telah menghiasi dunia pertelevisian di Indonesia, serta kurang lebih 227 stasiun televisi lokal diseluruh Indonesia.

Perkembangan media televisi saat ini juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membentuk Ruang-ruang Publik. Ada beberapa program televisi yang memang dirancang sebagai media bagi masyarakat untuk berdiskusi secara dialektis sebagai respon dan aspirasi mereka terhadap kinerja pemerintah dan permasalahan-permasalahan sosial yang mencuat di Negara ini. Kondisi seperti ini yang juga turut membentuk terciptanya ruang publik yang "bersih". Disisi lain masyarakat pun harus bisa lebih jeli dalam menyerap informasi yang disajikan dalam media televisi agar pada akhirnya tak menjadi konsumen yang pasif yang sengaja dikonstruk oleh pasar melalui iklan. []

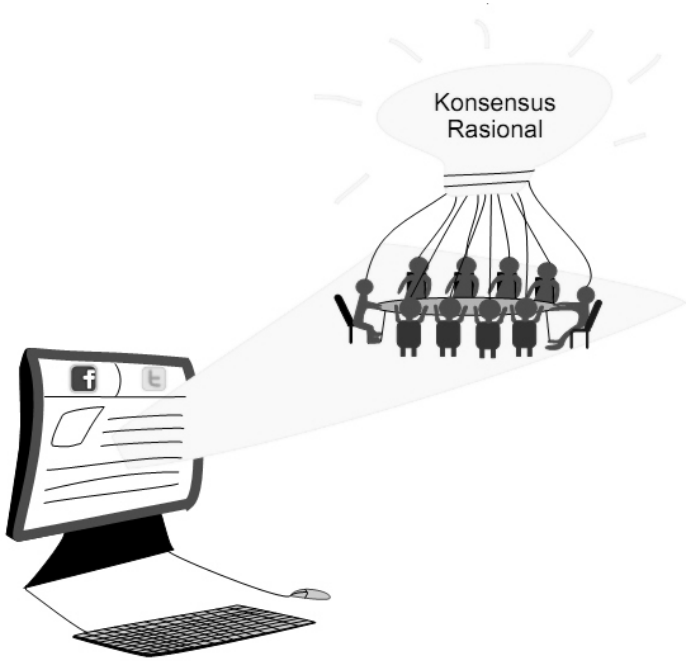

Catatan Akhir:

[1]Diunduh dari http://BeritaKonflikSuatuKritikPeranMediasebagaiRuangPublikdan PilarDemokrasi «VIRTUAL YEARRY.html
[2] Dalam buku *Menentang Tirani,* Edy Budiyanto
[3]Diunduh dari http://HouseofQuestion»GerakanMahasiswaIndonesiaTahun1998 Sebuah ProsesPerubahanSosial.html
[4]Ibid
[5]Diunduh dari http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2010/11/11/sejarah-pertelevisian-indonesia-dan-pengaruhnya-pada-masyarakat/
[6]Dalam buku, *Transformasi Struktural Ranah Publik*, Habermas
[7] Dalam buku *Menentang Tirani,* Edy Budiyanto
[8]Menurut sumber http://quo-vadis-gerakan-mahasiswa-pasca-1998.html
[9] Menurut Masni seorang admisi pada situs resmi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada: http://map.ugm.ac.id/index.php/admisi.html
[10] Diunduh dari sebuah situs peratingan di Internet : Nielsen Audience Measurement -

Ketika Ruang Melahirkan Suara

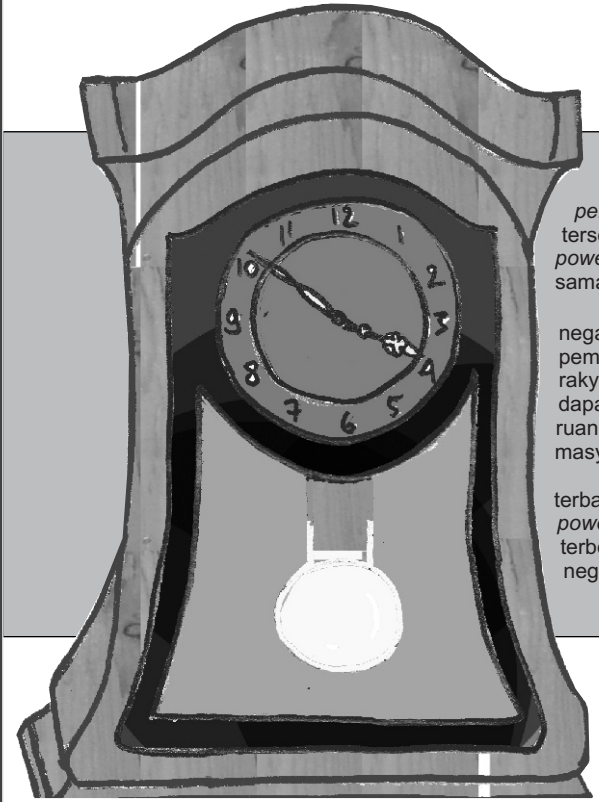

Presiden pertama Republik Indonesia mengatakan, "*Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia. Beri aku seratus pemuda maka akan kupindahkan Gunung Semeru.*" Pernyataan tersebut seolah membenarkan fakta akan betapa pentingnya *people power.* Keberadaan masyarakat dengan satu suara atau tujuan yang sama dapat merubah suatu keadaan.

Sejarah mencatat banyak perubahan yang dialami suatu negara karena masyarakatnya membulatkan suara menentang pemerintah. Otoritarian penguasa seolah kehilangan kekuatannya ketika rakyat sudah memasang badan menolak mereka. *Nah,* agar masyarakat dapat membentuk konsensus guna mengontrol pemerintah di negaranya, ruang publik mutlak dibutuhkan. Ruang publik tak ubahnya wadah bagi masyarakat untuk memonitor berbagai kebijakan pemerintah.

Jadi, mari kita lihat rentetan peristiwa yang menjadi saksi tak terbantahkan dari betapa pentingnya keberadaan ruang publik dan *people power* tersebut. Bagaimana ruang publik itu muncul menjadi tempat terbentuknya suara rakyat yang dapat mengguncang pemerintahan suatu negara dan bahkan dunia.[]

59 SM

Acta Diurna dari masa Romawi Kuno diakui sebagai Koran pertama di dunia. Acta Diurna berisi berita social dan politik. Saat itu Koran masih berupa lembaran berita yang ditulis tangan dan dipasang di tempat umum.

700

Koran cetak pertama adalah dalam Di-Bao yang lahir di China dan dicetak menggunakan balok kayu yang dipahat aksara China.

1400

Koran yang awalnya berbentuk lembaran kini berubah menjadi bentuk newsletter dan buku cerita. Tulisannya banyak berisi tentang bisnis dan pedagang Eropa.

1500

Newsletter berubah bentuk menjadi *newssheet* (lembar berita).

1619-1629

Pada masa penjajahan Belanda periode J.P. Coen, iklan pertama kali diperkenalkan di Indonesia.

1648

Iklan pertama yang dicetak di Inggris, ditemukan di *Imperial Intelligencer*.

1660

Leipziger Zeitung, koran harian pertama di dunia lahir di Jerman.

1665

Koran berkala pertama Inggris. *The London Gazette*.

1700

Didirikan *Hansard* untuk memberikan rekaman prosiding yang akurat di parlemen.

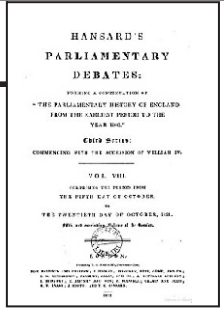

1702

The London Daily Courant, koran harian pertama di Inggris.

The Daily Courant.

1700-1800

Hansard [House of Commons Debates]

Pers tidak hanya menyampaikan opini secara luas, namun juga memberitakan secara penuh kegiatan parlemen.

1704

The Boston News-Letter

Iklan pertama di dunia yang dimuat di surat kabar. Iklan tersebut dimuat dalam surat kabar *Boston News-Letter*. Iklan ini berisi penawaran penjualan sebuah rumah di teluk Oyster, Long Island, Amerika Serikat.

1744

Surat kabar *Bataviasche Nouvelle* terbit, surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang terbit di Indonesia.

A. 1744. N. 38.

1776

Vendu Nieuws mengganti posisi *Bataviasche Nouvelles* sebagai Koran di Indonesia.

1905

Kekacauan terjadi selama seminggu di Rusia ketika para pekerja pabrik dan keluarganya melakukan demo ke kerajaan pada musim dingin untuk meberitahu Tsar Nicolas II bahwa mereka menderita setiap hari

1864

Iklan dalam majalah pertama kali muncul dalam majalah Harper.

1854

Majalah Bianglala terbit di Gambir, Jakarta, sebagai majalah pertama hasil pribumi.

1800-an

Terjadi refeodalisasi ruang publik. Ruang publik yang awalnya adalah ruang diskusi rasional, debat, membedah konsensus, serta menjadi wilayah konsumsi massa dijajah oleh korporasi serta kaum elite dominan.

1910

Koran Medan Prijaji terbit dengan skala harian. Inilah koran pertama yang dimiliki Indonesia yang dibangun oleh orang Indonesia asli.

1929

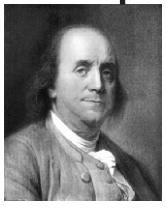

Benjamin Franklin membangun surat kabar bernama *Pennsylvania Gazette*. Surat kabar ini menyediakan halaman khusus untuk iklan.

18 juni 1929 Jurgen Habermas lahir. Dialah pencetus ide tentang ruang publik.

1969

Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk internet sebagai bagian dari jaringan komputer.

1962

Buku *The Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois-Society* terbit pertama kalinya di Jerman. Dalam buku ini tertuang pemikiran Habermas tentang ruang publik.

1942

Keng Po, yang berarti Berita Pemerintahan, merupakan Koran yang muncul di Indonesia pada masa penjajahan Jepang.

1977

Rakyat Mesir melakukan mogok massal dan demo agar Presiden Anwar Sadat merubah kebijakannya yang membatalkan peminjaman ke *World Bank* yang kemudian akan berdampak pada tidak adanya subsidi dan kenaikan gaji bagi masyarakat.

1980-an

Cikal bakal organisasi/kelompok tani mulai terbentuk dengan adanya berbagai pertemuan antar kelompok tani, aktivis mahasiswa, dan pemuda.

1989

Rakyat Rumania berdemo menuntut presiden Nicolae Ceau untuk mundur karena membuat kebijakan untuk mengatasi masalah hutang dengan dengan jalan yang semakin memyengsarakan dan memiskinkan rakyat.

1998

8 juli 1998 dideklarasikan Federasi Serikat Petani Indonesia di desa Loburapa, Asahan, Sumatra Utara.

Gerakan mahasiswa berhasil menggulingkan kekuasaan Soeharto dan membawa Indonesia kepada masa reformasi.

1992-1993

Masyarakat India melakukan demo sebagai respon atas kebijakan pemerintah saat itu yang hendak menghancurkan Masjid Babri.

2009

Muncul "gerakan satu juta *facebookers* dukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto" di *facebook* sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk pembebasan Chandra-Bibit.

Gerakan "koin peduli Prita" marak di jejaring sosial *Facebook* dan *Twitter*. Gerakan ini bertujuan untuk membantu Prita Mulyasari membayar denda kepada RS OMNI sebesar 204 juta rupiah.

2011

Rakyat Mesir dan Libya melakukan demo dan pemberontakan menuntut pengunduran diri presiden Negara masing-masing.

2012

- Buruh di Indonesia melakukan demo dengan turun ke jalan untuk meminta kenaikan gaji.

Maret 2012 terjadi gerakan demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia menolak rencana kenaikan BBM. Pada rapat paripurna DPR diputuskan harga BBM batal dinaikkan.

2011

- Gerakan "koin untuk presiden SBY" marak di *facebook* sebagai bentuk tanggapan rakyat atas pernyataan presiden yang mengungkapkan bahwa sudah beberapa tahun gajinya tidak naik.

QUOTATIONS

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Tergantung pemerintah. Kalau pemerintah campur tangan terus dalam segala hal yang terjadi, adalah kami tidak ada jalan lain adalah membisikkan pada para pemilih “golput aja bareng-bareng”.

John F. Kennedy

Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu!

Jimmy Carter

Kapasitas manusia untuk berbuat adil mengakibatkan demokrasi itu mungkin; kapasitas manusia untuk sewenang-wenang mengakibatkan demokrasi itu perlu.

Sun Tzu

Jangan bertindak sesuai dengan keyakinan atau dogma, melainkan dalam pancaran informasi tentang situasi atau momen saat itu. Tentanglah selalu kebijakan konvensional.

Adolf Hitler

Alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir.Aku tidak perlu berpikir karena aku adalah pegawai pemerintah.

Lyndon B. Johnson

Apabila dua orang selalu sepakat dalam segala hal, itu berarti cuma satu orang yang berpikir.

James Baldwin

Semua orang memuji-muji surga, tapi tidak ada yang mau pergi ke sana sekarang juga.

Soekarno

This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke!"

Wiji Thukul

Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan
di sana bersemayam kemerdekaan
apabila engkau memaksa diam
aku siapkan untukmu: pemberontakan!

C. L. Jansen

Dia kembali ke tradisional perempuan ibu-topik, rumah suami-istri, kesepian-tapi dengan pendekatan yang sangat modern .... Mereka berlabuh ke kesalahpahaman, sikap apatis moral, dan rasa tidak aman yang mengganggu kita saat ini Ndiaye itu "dongeng masyarakat dan ketidakpuasan yang" disajikan, sekali lagi, dari transposisi fantastis dari sehari-hari..

Albert Enstein

Dunia ini adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena orang-orangnya tak perduli.

Clement Attlee

Demokrasi adalah pemerintahan yang diisi dengan banyak diskusi, namun demokrasi hanya efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut.

D. H. Lawrence

Hasil dari kerja adalah uang. Hasil dari uang adalah lebih banyak uang. Hasil dari lebih banyak uang adalah kompetisi yang ganas. Hasil dari kompetisi yang ganas adalah dunia yang kita diami ini.

Anatole France

Buku sejarah yang tidak mengandung kebohongan pasti sangatlah membosankan.

R. E. Hartanto

Rasa curiga sebagai kecemasan sosial mewakili masalah perkotaan. Tekanan kota menghasilkan pengerasan identitas perseorangan, ketika orang mengidentifikasi diri sebagai 'kami' dan 'mereka'.

Bung Tomo

Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih,maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.

Aung San Suu Kyi

Prioritas utama saya ialah, agar rakyat menyadari bahwa mereka sendiri punya kekuatan untuk mengadakan perubahan itu. Kemudian sama-sama kita bisa berbuat.

Pramoedya Ananta Toer

Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana.

Will Rogers

Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.

Michele Filgate

Kebenaran dapat ditemukan dalam semua tulisan dan saya kira kebenaran yang keluar dari semua memoar palsu adalah manusia tidak dapat membantu diri mereka sendiri ketika datang untuk bercerita.

Mao Tse-Tung

Jika Anda ingin tahu teori dan metodologi revolusi, Anda harus ambil bagian dalam gerakan revolusi. Pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh dengan pengalaman langsung.

Garin Nugroho

Para pemimpin yang lahir dari bangsa yang mengapresiasi seni memiliki sensitivitas tinggi terhadap kehidupan.

Filosofi Leluhur Bali

Jangan menganggap diri pintar biarkan orang lain yang menilai.

Jimmy Carter

Terpisahnya kekuasaan dari rakyat kadang tak diketahui para pemimpin yang kuat. Sifat tak peka yang memang sudah terkandung dalam uap kekuasaan seharusnya merupakan peringatan bagi kita.

PUSTAKA WACANA

Judul: Skizoanalisis Deleuze + Guattari **Penulis: Agustinus Hartono** **Penerbit: Jalasutra, 2007**

"Bagi deleuze dan Guattari, hasrat ada dimana-mana. Hasrat tidak pernah benar-benar ditaklukkan. Kehadirannya pada realitas sosial dan diri tidak bisa direpresi". Itulah inti buku ini. Dipenuhi dengan berbagai diksi terkait dunia psikologi, buku ini mencoba menjelaskan dengan lugas bagaimana hasrat yang ada dalam diri manusia sejak kelahirannya. Ia juga mencoba memaparkan bagaimana hasrat itu bermetamorfosis ketika dihadapkan pada ranah sosial.

Judul: Etika **Penulis: K. Bertens** **Penerbit: Gramedia, Jakarta**

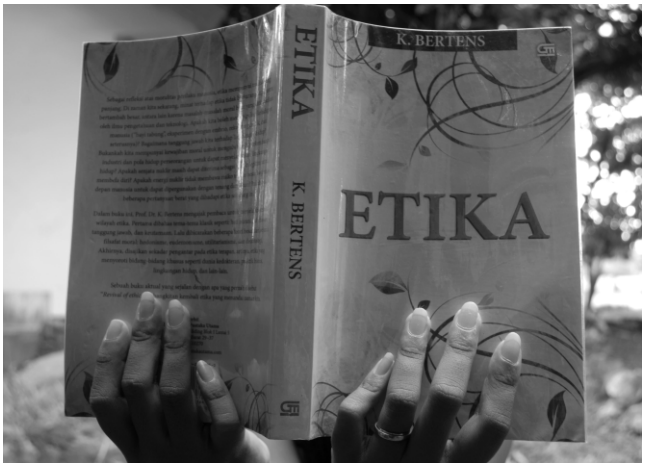

Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas tentang etika. Semua hal yang berkenaan dengan etika. Misalnya bahasan mengenai tema-tema etika umum seperti bahasan hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab. Dipaparkan pula dalam buku ini bahasan mengenai nilai dan norma. Pada bagian akhir buku dibahas pula tentang etika dalam bidang-bidang khusus, dan juga kode etik profesi.

Judul: Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya **Penulis: Kaelan** **Penerbit: Paradigma, Yogyakarta**

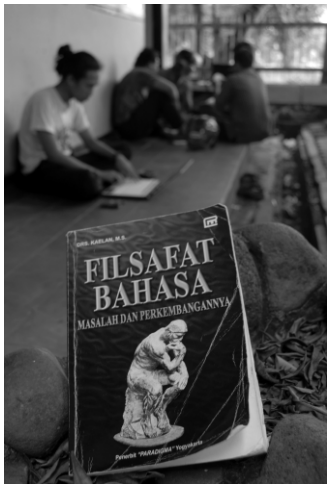

Kemunculan bahasa berawal dari manusia yang membutuhkan alat untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya bahasa berkembang mengikuti peradaban yang juga berkembang di sekitarnya. Dan buku Filsafat Bahasa ini membahas hal tersebut, yakni seluk beluk bahasa yang merupakan hasil kebudayaan manusia, yang tidak pernah berhenti berkembang, terus menyesuaikan dengan zamannya.

Judul: Sosiolinguistik **Penulis: Syukur Ibrahim** **Penerbit: Usaha Nasional, Surabaya**

Buku ini membahas tentang seluk beluk sosiolinguistik. Yang disajikan dalam buku ini adalah hasil pengamatan dan pengkajian penulis terhadap bahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yana ada di Indonesia, tetapi juga terdapat bagian yang menjelaskan tentang bahasa asing, seperti bahasa India, bahasa-bahasa di Eropa dan bahasa yang digunakan di Afrika Barat.

Judul: Sosio Ekonomi: Analisis Eksistensi Kapitalisme dan Sosialisme **Penulis: Save M. Dagun** **Penerbit: PT. Rineka Cipta**

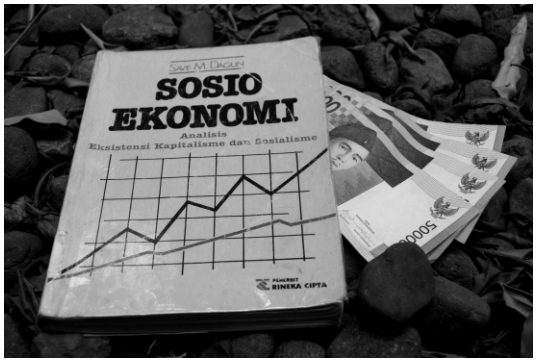

Analisis yang mengangkat perkembangan ilmu dan teknologi dapat membawa perubahan masyarkat modern. Kemajuan ilmu empiris telah memperlihatkan perubahan dalam metode teknologi. Ilmu ekonomi telah memegang peranan penting dalam perkembangan dunia. Meski demikian, masyarakat ekonomi modern mengalami kemelut dalam dirinya sendiri. Tantangan yang dihadapi bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah hubungan sosial dengan masyarakat lain. Masyarakat modern lahir karena terjadi revolusi industri, dimana peran tenaga manusia tergantikan oleh mesin. Untuk itu, muncullah apa yang disebut sebagai sosio-ekonomi agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan.

Buku ini juga mengkritik pendapat Adam Smith dan David Ricardo tentang ekonomi politiknya. Ekonomi politik hanya membicarakan keuntungan, persaingan, dan kebebasan. Mereka tidak memikirkan masyarakat yang menjadi pekerja "kasar" didalamnya. Pada tahap selanjutnya, pemikiran sosialisme dapat mengatasi pertentangan kapitalisme dan sosialisme. Intinya, konsep sosio-ekonomi bertujuan untuk menggali arus dasar persoalan ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Judul: Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya **Penulis: Pierre Bourdieu** **Penerbit: Kreasi Wacana**

Sejak awal 1970-an, Pierre Bourdieu menjadi suara teoritis utama di dalam kajian-kajian kritis tentang praktik-praktik kultural. Yang paling penting dari pemikiran Bourdieu barangkali adalah pemilahan antara hubungan sistem berpikir, lembaga-lembaga sosial, dan perbedaan bentuk-bentuk kekuatan material di satu pihak dengan berbagai macam kekuatan simbolis di pihak lain. Buku ini berisi kumpulan esai utama Pierre Bourdieu seputar kebudayaan, terutama yang terkait dengan seni, sastra, estetika serta posisi intelektual dan budayawan dalam kehidupan sosial. Bourdieu membangun sebuah teori arena kultural yang menempatkan karya seni di dalam kondisi-kondisi sosial produksi, sirkulasi, dan konsumsinya. Esai-esai yang termuat di sini mengkaji topik-topik beragam, salah satu pembahasan penting adalah penggambaran hubungan seni dengan kekuasan.

Judul: Carok **Penulis:** Latief Wiyata **Penerbit:** LKis, Yogyakarta

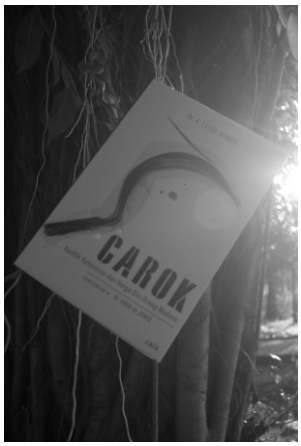

Buku ini memaparkan hasil penelitian penulis tentang Carok, salah satu budaya yang ada di Madura. Yang dipaparkan dalam buku ini antara lain adalah penjelasan tentang Carok yang berbeda dengan tindak kekerasan lainnya. Penulis menjelaskan semua detail tentang Carok, mulai pembahasan mengenai penyebab terjadinya Carok, ritual-ritual yang dilakukan sebelum mengadakan Carok, hingga situasi setelah Carok selesai.

Judul: Melacak Sejarah Pemikiran Agraria (Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor) **Penulis: Ahmad Nashih Luthfi** **Penerbit: Pustakan Ifada**

Persoalan agraria pada hakekatnya merupakan salah satu persoalan penting dalam pembangunan bangsa. Absennya kajian agraria dalam diskursus teori pembangunan dan konsep pembangunan berkelanjutan berimplikasi sosial amat luas.
Dalam wacana sosial mutakhir, konstruksi rancangan Undang-Undangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan telah membuktikan ketiadaan akar historis dan ideologi keberpihakan pada masyarakat. Untuk itulah, merevitalisasi diskursus agraria yang menempatkan masyarakat sebagai subyek menjadi semakin penting dan strategis.
Pada titik inilah kehadiran buku *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria, Sumbangan Mazhab Bogor* memberikan penyadaran bagi kita. Diperlukan cara untuk mengurai jerat hutang pedesaan, mempelajari dan meneguhkan kekuatan rakyat dalam soal kelola wilayah pertanian, perkebunan, hutan, dan daerah perairan.

Judul : Demokrasi Deliberatif- Menimbang 'negara hukum' dan 'ruang publik' dalam teori diskursus Jurgen Habermas
Penulis: F.Budi Hardiman Penerbit: Kanisius Yogyakarta, 2009

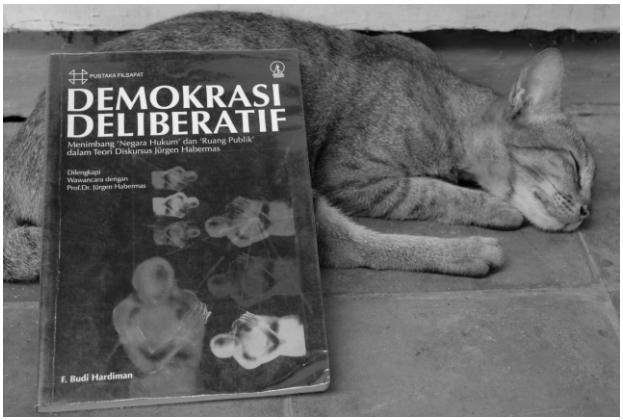

Memahami lebih dalam logika berpikir dari demokrasi deliberatif. suatu pendekatan yang jeli dalam menjelaskan pemikiran Jurgen Habermas. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya, tidak saja itu proses demokrasi juga sampai dalam tataran yang lebih *grassrootl*. Tetapi dalam pelaksanaanya pelaksanaan demorkasi di Indonesia seolah menemukan lubang-lubang yang perlu di benahi. Dan Demokrasi Deliberatif merupakan bentuk "alternative" "solusi" dari pelaksanaan demokrasi. Dikaitkan dengan locus Indonesia yang memiliki keanekaragaman masyarakatnya semakin memposisikan bahwa demokrasi deliberatif sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang diharapkan mampu menutupi celah-celah yang menganggu dalam pelaksanaan demokrasi deliberatif.

Judul: Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasan, dan Pembebasan Penulis: Paulo Freire Penerbit: ReaD (Research, Education, and Dialogue)

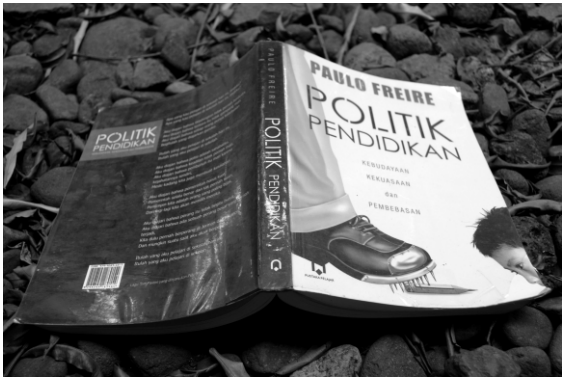

Daya tarik dan kekuatan Freire terletak pada kejujuran untuk mengungkapkan dan menyatakan, tanpa tedeng aling-aling kemanusiaan yang telah sedemikian rapuhnya. Kekuatan Freire sesungguhnya terletak pada kekuatan pemikiran yang mampu menukik langsung pada pokok-pokok persoalan dengan bahasa sederhana. Terutama dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan seluruh ikhtiar pembangunan nasional yang menjadi "cultural focus".
Buku ini memberikan kontribusi sangat penting bagi perkembangan teori pendidikan, dan secara politis memberikan alternatif solusi 'bersemangat' atas kebuntuan yang melanda praktik pendidikan di seantero dunia. Freire menciptakan model teori pendidikan mengaitkan dengan teori kritis-radikal untuk melawan suatu dominasi (penguasa).

Judul: Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas **Penulis: Budi Hardiman**

Penerbit: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI)

Habermas dalam buku ini mengkritik beberapa filsuf-filsuf lain untuk menuju masyarakat komunikatif. Hal ini ia teliti dengan berbagai konsep pandangan para filsuf seperti Max Weber, Sigmund Freud, dan Karl Marx. Ketiga aliran filsuf tersebut di kritik secara mendalam oleh Habermas. Habermas menekankan bahwa masyarakat komunikatif tidak hanya didasarkan rasionalitas, sebab hanya mencapai tujuan dan tidak menghayati nilai sebagai isi kesadaran. Untuk itu ia menekankan masyarakat komunikatif harus bersifat emansipatoris. Sebab , pemikiran emansipatoris menjadikan manusia terus berpikir.

GLOSARIUM

Anomali: ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan
Apriori: beranggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dsb) keadaan yang sebenarnya
Arbiter: orang yang disepakati oleh dua belah pihak yg bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak.
Atraktif: mempunyai daya tarik; bersifat menyenangkan
Deliberatif: konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang
Derivasi: *Ling* pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata;
Dialektika: hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah.
Diakroni: bersifat historis (berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu)
Direpresi : penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan
Egaliter: bersifat sama; sederajat
Eksklusifitas: terpisah dari yang lain; khusus
Federasi: gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu badan, tetapi tetap berdiri sendiri
Feodalisme: sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah
Hegemoni: pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, suatu negara atas negara lain (atau negara bagian)

Implementasi: pelaksanaan; penerapan
Infantil: bersifat kekanak-kanakan
Inklusifitas: termasuk; terhitung
Intensifikasi: perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat; pengintensifan
Isbat: penyungguhan; penetapan; penentuan
Kolektif: secara bersama; secara gabungan
Kompatriot: teman setanah air
Konsensus: kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
Konsolidasi: perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sabagainya)
Konstituen: unsur bahasa yg merupakan bagian dr satuan yang lebih besar; bagian dari atau pendukung konstruksi
Kooperatif: bersifat kerja sama; bersedia membantu
Korporasi: badan usaha yang sah; badan hukum
Kroni: teman (kawan) dekat
Legitimasi: *Huk* keterangan yg mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan
Linguistik: telaah bahasa secara ilmiah
Manipulatif: bersifat manipulasi; secara manipulasi
Masifikasi: kuat; kukuh
Mobilisasi: pengerahan orang untuk

dijadikan tentara

Monolog: pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri

Ngeri: berasa takut atau khawatir (karena melihat sesuatu yang menakutkan atau mengalami keadaan yang membahayakan)

Oase: tempat, pengalaman, dan sebagainya yang menyenangkan di tengah-tengah suasana yang serba kalut dan tidak menyenangkan

Oligarkhi: pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu

Omzet: jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual

Orasi: pidato

Otoriter: berkuasa sendiri; sewenang-wenang

Paradigmatik: tentang hubungan unsure-unsur bahasa dalam tingkat tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tingkat itu yang dapat dipertukarkan.

Populis: penganut paham populisme

Positivistik: pasti; tentu; tegas

Pragmatis: bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis

Pragmatisme: kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya), bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia

Praksis: praktik (bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia)

Preservasi: pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan

Rekonsiliasi: perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan

Resistansi: ketahanan

Represif: bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas)

Rezim: tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa

Semantis: berhungan dengan ilmu tata makna dalam bahasa; menurut atau mengenai semantik

Sintagmatik: tentang hubungan linier antara unsur-unsur bahasa di tataran tertentu.

Sporadis: keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini

Stagnasi: keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan

Stratifikasi: pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise

Substansi: watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti

Supremasi: kekuasaan tertinggi (teratas)

Terminologi: peristilahan (tentang kata-kata)

Transendental: sukar dipahami; abstrak

Transmisi: pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain

Virtual: (secara) nyata

Ruang Emansipatif yang Mendidik

-Didik Saputra-

APA yang anda pikirkan tentang ruang publik? Setelah membaca kumpulan esai pada lembar-lembar sebelumnya di majalah ini, setidaknya dapat diambil sebuah terma mengenai ruang publik. Yaitu sebagai tempat para cendekiawan atau kaum intelek untuk duduk setara dengan masyarakat kecil (kaum tertindas), kemudian melakukan dialog demi mencapai konsensus bersama. Tentu saja di luar pengaruh pasar atau pemerintah (negara). Setidaknya dari cendekiawan-cendekiawan inilah kita bisa berharap dinamika ruang publik semakin berkecamuk.

Sebenarnya dari aspek pedagogis sudah tampak jurang pemisah yang cukup lebar antara 'publik' dan 'masyarakat kecil'. Publik pada umumnya terdiri dari orang-orang yang mampu menjangkau pendidikan formal, dan memiliki kesadaran ilmu pengetahuan. Sedangkan masyarakat kecil, kaum tertindas yang kesehariannya berada di pusaran tekanan kaum penguasa dan selalu hidup dalam ketidaksadaran. Kesadaran yang terbentuk hanyalah keinginan bertahan hidup, tanpa orientasi menjangkau pendidikan formal.

Bagi Habermas, salah satu syarat terbentuknya sebuah ruang publik adalah keberadaan cendekiawan. Kaum intelek ini menjadi penting karena mereka adalah aktor yang mampu membentuk ruang dialektis dan membangun kesadaran kolektif di dalam ruang publik. Mereka telah dibekali dengan ilmu-ilmu teoritis, pendidikan politik, diplomasi, dan pemahaman birokrasi struktur pemerintah dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, cendekiawan berperan sebagai corong delegasi yang dapat menembus *lobby-lobby* di parlemen. Menjadi aktor-aktor politis oposisi atau non pemerintah yang bersedia mengusung hak-hak masyarakat sipil dan turut mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Baik masyarakat kecil maupun publik 'yang berpendidikan formal' pada dasarnya adalah sama-sama masyarakat sipil. Hanya nalar berpikir kritis dan pengetahuan melalui pendidikan formal saja yang membedakan. Artinya aspek pendidikan di sini menjadi faktor determinan ketika harus dihadapkan pada realitas sosial. Seperti dikatakan Paulo Freire, pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia. Sehingga secara metodologis pendidikan bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total. Menghubungkan antara teori -yang kita dapatkan di dalam kelas- dan *praxis* -sumbangan kepada masyarakat-, tanpa memberi jarak pada keduanya.

***

Bagaimana jika kita menilik kondisi real bangunan pendidikan saat ini? Bangunan-bangunan yang mengungkung mahasiswa atau murid. Mereka jauh dari realitas sosial karena selalu disibukkan dengan hal-hal bersifat akademis. Mengejar *cumlaude* atau ranking, semua diukur melalui nilai-nilai yang tertorehkan di dalam Indeks Prestasi (IP) atau rapor. Kegiatan-kegiatan lebih dimassifkan pada hal-hal yang berpatokan pada ekonomi. Pelatihan wirausaha, lomba Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui usaha mandiri. Generasi sekarang dituntut bersaing, berlomba untuk mencapai kesejahteraan, tidak berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Berujung pada logika kapitalis yang berwujud persaingan bebas itu.

Ki Hadjar Dewantara, seorang cendekiawan pribumi ini sebelumnya juga pernah berujar bahwa mendidik dalam proses pendidikan adalah perkembangan memanusiakan manusia (humanisasi). Pendidikan merupakan prinsip kemerdekaan utama bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan asas “Tut Wuri Handayani”, ia menawarkan konsep pendidikan dengan membentuk siswa yang merdeka lahir batin sehingga terbentuk karakter kepribadian nasionalnya. Karena tanpa karakter kepribadian nasional maka bangsa ini tidak dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain.

Pendidikan yang dimaksud adalah metode pengajaran dengan kemampuan dialog yang sehat dan benar antara guru dengan peserta didik. Pendidikan yang mengedepankan dialog interaktif, bukan monolog (searah) dari si pengajar. Sistem pendidikan yang kita laksanakan saat ini terlalu berpusat pada fase pedagogi. Terlalu mementingkan aspek intelektualisme yang menyebabkan para pelajar jauh dari rakyatnya. Konsep ini menempatkan murid sebagai peserta didik yang pasif, dan pendidikan hanya dimaknai sekedar *transfer knowledge*.

Lalu apa yang bisa diharapkan dari sistem pendidikan sekarang? Apakah akan terbentuk kaum intelektual yang berlandaskan hati nurani dan moral? Bagaimana mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja dengan merdeka demi kemajuan bangsa? Pendidikan pada akhirnya hanya akan menggerus nilai-nilai kemanusiaan ketika pendekatan manusiawi tergerus oleh nilai-nilai pedagogi semata.

Sekilas pendidikan sekarang hanya menjanjikan pesimisme bagi perkembangan bangsa. Kapitalisasi pendidikan yang berorientasi pada pendidikan biaya tinggi berdampak sistemik pada gerakan-gerakan mahasiswa. Mahasiswa semakin fokus pada penyelesaian pendidikan ketimbang merespon dan mengevaluasi ketimpangan sosial di negeri ini. Maka tidak heran jika mahasiswa saat ini identik dengan apatis, individualistis, pragmatis, dan oportunis. Anggaplah seperti itu. Sehingga pendidikan akhlak dan empati rasanya tidak bisa lagi kita harapkan melalui ruang-ruang pendidikan, melainkan dengan berani mengorbankan diri kepada masyarakat dengan beraktualisasi di luar kegiatan akademis.

Sejarah telah membuktikan, bahwa negeri ini telah melahirkan banyak pemikir bangsa yang memberikan tonggak penyadaran bagi rakyat. Kita mengenal sosok Tirto Adhi Soerjo dengan tulisan-tulisannya yang banyak memberi pengetahuan tentang penindasan kolonial kepada rakyat. Kemudian Tjokroaminoto, sang penyambung lidah rakyat sebagai tokoh pergerakan politik pertama di Indonesia. Dan Agus salim, diplomator ulung yang menyumbang berbagai dialog guna mendapatkan legitimasi kemerdekaan indonesia. Mereka cendekiawan yang memberikan pencerahan dan menyadarkan bangsa ini tentang arti kemerdekaan.

Selain berperan bagi kemerdekaan bangsa, ketiga orang tersebut juga menjadi guru dan suri teladan yang melahirkan anak didik revolusioner bagi bangsanya. Diantaranya kita mengenal Soekarno, Hatta, Sjahrir, juga Natsir yang meneruskan estafet perjuangan kemerdekaan bangsa. Apakah di zaman yang sudah merdeka ini para guru atau pengajar mampu membentuk anak didik bermental nasionalis? Generasi yang peka dengan permasalahan bangsa. Menciptakan sebuah ruang emansipatif di dalam kelas dengan mengusung pendidikan yang setara antara pengajar dan yang diajar. Bukan pendidikan searah yang diarahkan oleh pemilik modal, melainkan nilai-nilai kultur yang tertanam pada bangsa sendiri. Semoga.[]

edisi
XVI

Majalah Tegalboto

Pion Dalam Ruang Dialektis